



PEMERINTAH KOTA BATAM



# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

# TAHUN 2021



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Tahun 2021 dengan tepat waktu.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ Wali Kota Batam Tahun 2021 berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, di samping sebagai tugas dan kewajiban menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, juga mencerminkan tekad, semangat dan wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah kepada seluruh masyarakat Kota Batam melalui DPRD Kota Batam atas pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

Wali Kota Batam selaku Kepala Daerah dengan Perangkat Daerah beserta jajarannya menyadari akan segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan program pemerintah daerah dimaksud. Untuk itu masukan dan saran yang membangun, sangat kami harapkan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan menjadi tolok ukur dalam memantapkan strategi pembangunan daerah pada masa yang akan datang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Batam, 23 Maret 2022

**WALI KOTA BATAM,**



**MUHAMMAD RUDI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	2
1.3 Data Umum Daerah.....	10
1. Data Geografis Wilayah.....	10
2. Jumlah Penduduk.....	11
3. Pertumbuhan Penduduk.....	12
4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	13
5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan.....	13
6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	16
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	17
<b>BAB II    PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN           DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>1</b>
A. Risalah Perubahan Atas Perwako Tentang Penjabaran APBD Kota Batam TA. 2021 dan Perwako Tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APBD TA 2021.....	1
1. Perubahan Pertama Penjabaran APBD TA 2021.....	1
2. Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2021.....	2
3. Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2021.....	3
4. Perubahan Keempat Penjabaran APBD TA 2021.....	5
5. Perubahan Kelima Penjabaran APBD TA 2021.....	7
6. Perubahan Keenam Penjabaran APBD TA 2021.....	8
7. Perubahan Ketujuh Penjabaran APBD TA 2021.....	10
8. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021.....	12
9. Perubahan atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2021.....	14

<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....</b>	<b>1</b>
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	1
3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	148
3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....	152
<b>BAB IV</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN .....</b>	<b>1</b>
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.....	1
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>1</b>

## DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021.....	11
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021.....	12
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Tahun 2020-2021.....	12
Tabel 1.4.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 di Kota Batam .....	13
Tabel 1.5.	Realisasi pendapatan Menurut Jenis Pendapatan di Kota Batam Tahun 2021 .....	15
Tabel 1.6.	Realisasi Belanja Menurut Jenis Pembelanjaan Kota Batam Tahun 2021.....	15
Tabel 1.7.	Realisasi Pembiayaan Kota Batam Tahun 2021 .....	16

### BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tabel 2.1.	Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2021.....	2
Tabel 2.2.	Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2021 .....	3
Tabel 2.3.	Perubahan Keempat Penjabaran APBD TA 2021.....	5
Tabel 2.4.	Perubahan Kelima Penjabaran APBD TA 2021 .....	7
Tabel 2.5.	Perubahan Keenam Penjabaran APBD TA 2021.....	9
Tabel 2.6.	Perubahan Ketujuh Penjabaran APBD TA 2021 .....	10
Tabel 2.7.	Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD TA 2021 .....	13
Tabel 2.8.	Perubahan Penjabaran Perubahan APBD TA 2021 .....	14

### BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Tabel 3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	1
-------------	--	---

Tabel 3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	33
Tabel 3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	116
Tabel 3.1.4	Pelaksanaan Urusan Penunjang.....	125
Tabel 3.2	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	150
Tabel 3.3	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	152

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Hukum**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar tersebut, maka disusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Akhir Tahun Anggaran 2021 yang merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Kota Batam dimulai pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada tanggal 07 Desember 1983. Berdasarkan PP tersebut sejak tanggal 24 Desember 1983 diresmikan Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam yang bersifat administratif dipimpin oleh Wali Kota yang berkedudukan setingkat dengan kabupaten/kotamadya daerah tingkat II lainnya dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.

Keberadaan Kotamadya Batam merupakan implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Pertimbangan dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam sebagai daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Oleh sebab itu dilakukan peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri

dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administratif Batam, yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam yang membawahi 8 Kecamatan dan 35 Kelurahan serta 16 desa, kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan maka wilayah administrasi Kota Batam membawahi 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan.

Pada bulan Juni tahun 2006 Pemerintah Kota Batam memberlakukan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah Kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 Kecamatan dan jumlah Kelurahan dari 51 menjadi 64 Kelurahan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun dalam lima bab sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, yang terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
- Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan
- Bab V Penutup

## **1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi, misi dalam konteks ini merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Muhammad Rudi - Amsakar Achmad yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kota Batam sehingga menjadi pemenang pada pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam secara langsung pada bulan Desember 2015. Lebih lanjut, RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan penjabaran

atau operasionalisasi dari visi, misi ini.

## 1. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi tersebut adalah:

**“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”**

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

**Misi Pertama:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.

Misi 1 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan	1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	1 Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1 Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.
			2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah
			3 Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan
	2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.	1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara lain dengan melibatkan dana CSR	1 Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya
			2 Pengembangan pola

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	1 Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	1 Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas
		2 Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung pelayanan publik	1 Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi 2 Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3 Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat	1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1 Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	1 Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota

**Misi Kedua:** Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera.

Misi 2 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa	1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	1 Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah serta Peningkatan Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat	1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini 2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah 3 Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumberdaya masyarakat
		2 Meningkatkan budaya baca masyarakat di Kota Batam	1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan arsip kepada masyarakat
5 Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	1 Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1 Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pustu, puskesmas rawat inap dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						1	peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional
						2	Menerapkan Sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga miskin
						3	Penguatan Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat
6	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	1	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan pengarusutaman gender (PUG) dalam pembangunan	1	Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian perempuan
				2	Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT serta perdagangan perempuan dan anak
		2	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata
				2	Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.	1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
		3	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan layanan kependudukan	1	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
						2	Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
		4	Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	1	Menyelenggarakan pembinaan Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	1	Meningkatkan Pendidikan Politik, kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan
5	Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat	1	Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga yang disertai dengan pembinaannya.		
7	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran	6	Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah	1	Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi	1	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan SDM tenaga kerja

**Misi Ketiga:** Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa.

Misi 3 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
8 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	1 Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	1 Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
	2 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	1 Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang
		2 Pengembangan sistem informasi spasial	2 Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
			1 Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial
9 Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	1 Meningkatkan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor privat dalam penyediaan RTH	1 Meningkatkan luasan RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora
		2 Meningkatkan kualitas ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam	1 Meningkatkan perlindungan, Pemanfaatan dan penataan lingkungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam
		3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	1 Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Batam
	2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko	1 Meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebakaran	1 Peningkatan penanganan dan pencegahan kebakaran
		2 Mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas sarana dan	1 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	bencana	prasarana kebencanaan	sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana
10 Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas untuk mengatasi masalah perkotaan	1 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman	1 Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal	1 Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum
		2 Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi	1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat dan laut 2 Pembuatan Jalur Sepeda
	2 Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik	1 Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas	1 Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan/pelantar melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta memperlebar lahan badan jalan
			2 Menunjang Percepatan Pembangunan Flyover dan pengembangan ruas jalan tol
			3 Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan
	2 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.	1 Pengembangan sistem tata air yang terpadu dan berkualitas	1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir
			2 Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai
	3 Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas	1 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan nilai keekonomian sampah melalui Sistem 3R dan kepatuhan tentang kawasan bebas sampah serta Pendampingan pembentukan Bank Sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja Bank Sampah
			2 Mendorong percepatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem WTE (Waste to Energy) melalui pola KPBU
			3 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
		2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1 Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
							lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai
11	Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi	1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat	1	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa dan rusunami dengan pemerintah pusat dan stakeholders, peningkatan kualitas operasional dan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) serta Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman	1	Mendorong Pelaksanaan Pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta Percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota.
						2	Peningkatan Penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman
						3	Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat
12	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	1	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan Pemko Batam serta penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan pelayanan publik	1	Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah Kota Batam, dan dokumen tanah dalam meningkatkan pelayanan publik	1	Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah Kota Batam
		2	Terwujudnya penyelesaian Kampung Tua Kota Batam	1	Mendorong percepatan penyelesaian kawasan kampung tua.	1	Mempercepat penyelesaian penetapan definitif kampung tua.

**Misi Keempat:** Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah.

Misi 4 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
13 Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor perikanan dan pertanian	1 Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Melakukan pembinaan hubungan industrial dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi perusahaan-perusahaan	1 Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial
		2 Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan
		3 Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan	1 Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan
		4 Meningkatkan peran Pemko Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi	1 Mendorong percepatan pertumbuhan investasi

**Misi Kelima:** Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik. Misi 5 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
14 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya	1 Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan	1 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1 Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sektor UMKM
		2 Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga	1 Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang
	2 Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan tertentu	1 Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan tertentu	1 Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku serta revitalisasi pasar

**Misi Keenam:** Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam.

Misi 6 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
15 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland	1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland	1 Melakukan pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland.	1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland
	2 Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal	1 Mengembangkan dan memelihara sumber air baku secara berkesinambungan	1 Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar konsesi ATB
		2 Pengembangan pengelolaan air limbah domestic system setempat	1 Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septitanc standar lingkungan hidup, dan pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat
	3 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	1 Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan beserta pemukiman di hinterland	1 Peningkatan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland
	4 Meningkatnya konektivitas transportasi di hinterland	1 Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland

### 1.3 Data Umum Daerah

#### 1. Data Geografis Wilayah

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan luas wilayah Kota Batam 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.309 Ha dan luas wilayah perairan/laut 354.715 Ha Wilayah Kota Batam meliputi lebih dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan Negara. Topografi dan Kemiringan Lereng.

Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan

air untuk cadangan air baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru.

Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0-3% tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3-10% tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur dari Teluk Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10-20% sebagian besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20-40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum. Sementara itu wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan Bukit Tiban 110 m.

## 2. Jumlah Penduduk

Gambaran penduduk Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021**

Kecamatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Belakang Padang	20.518	20.298	20.469	22.439	22.666
Bulang	11.132	11.112	11.31	10.707	10.872
Galang	15.941	15.942	17.183	16.989	17.267
Sei Beduk	83.186	83.875	86.22	96.193	98.282
Nongsa	65.766	67.599	71.847	81.451	85.766
Sekupang	131.13	133.549	141.314	156.283	163.832
Lubuk Baja	90.555	90.317	90.56	84.533	85.252
Batu Ampar	63.395	62.293	62.093	60.450	60.865
Bengkong	107.054	108.671	111.923	119.836	123.438
Batam Kota	166.368	169.772	176.287	198.617	203.370
Sagulung	181.49	181.363	188.333	209.386	217.175
Batu Aji	127.406	126.44	130.012	139.512	141.312
<b>Jumlah</b>	<b>1.063.941</b>	<b>1.071.231</b>	<b>1.107.551</b>	<b>1.196.396</b>	<b>1.230.097</b>

Sumber: BPS Kota Batam (Batam Dalam Angka Tahun 2022)

**Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021**

Kecamatan	TAHUN									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	LK	PR								
BELAKANG PADANG	10,318	10,046	10,282	10,016	10,318	10,046	10,282	10,016	12.568	10.098
BATU AMPAR	33,261	30,677	32,342	29,951	33,261	30,677	32,342	29,951	31.408	29.457
SEKUPANG	66,711	63,693	68,015	65,534	66,711	63,693	68,015	65,534	82.866	80.966
NONGSA	34,067	30,653	35,345	32,254	34,067	30,653	35,345	32,254	44.560	41.206
BULANG	5,686	5,329	5,741	5,371	5,686	5,329	5,741	5,371	5.701	5.171
LUBUK BAJA	45,797	45,536	45,151	45,166	45,223	45,337	41,919	42,614	42.245	43.007
SUNGAI BEDUK	42,314	41,058	42,647	41,228	42,314	41,058	42,647	41,228	50.422	47.860
GALANG	8,485	7,445	8,458	7,484	8,485	7,445	8,458	7,484	9.137	8.130
BENGGONG	54,423	51,930	55,499	53,172	54,423	51,930	55,499	53,172	62.758	60.680
BATAM KOTA	82,890	81,818	85,095	84,677	82,890	81,818	85,095	84,677	101.414	101.956
SAGULUNG	94,474	87,180	93,874	87,489	94,474	87,180	93,874	87,489	111.913	105.262
BATU AJI	65,901	62,558	64,684	61,756	65,901	62,558	64,684	61,756	71.601	69.711
<b>Sub Total</b>	<b>544,327</b>	<b>517,923</b>	<b>547,133</b>	<b>524,098</b>	<b>544,327</b>	<b>517,923</b>	<b>547,133</b>	<b>524,098</b>	<b>626.593</b>	<b>603.504</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1,063,941</b>		<b>1,071,231</b>		<b>1,107,551</b>		<b>1,196,396</b>		<b>1.230.097</b>	

Sumber: BPS Kota Batam (Batam Dalam Angka Tahun 2022)

### 3. Pertumbuhan Penduduk

**Tabel 1.3. Pertumbuhan Penduduk Kota Batam Tahun 2020-2021**

Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2021	2020	2021
Belakang Padang	22.439	22.666	1.88	0.76
Bulang	10.707	10.872	1.13	1.15
Galang	16.989	17.267	1.22	1.22
Sei Beduk	96.193	98.282	1.76	1.62
Nongsa	81.451	85.766	4.87	3.95
Sekupang	156.283	163.832	4.40	3.60
Lubuk Baja	84.533	85.252	0.44	0.64
Batu Ampar	60.450	60.865	0.28	0.51
Bengkong	119.836	123.438	2.59	2.25
Batam Kota	198.617	203.370	1.98	1.19
Sagulung	209.386	217.175	3.30	2.78
Batu Aji	139.512	141.312	0.88	0.97
<b>Jumlah</b>	<b>1.196.396</b>	<b>1.230.097</b>	<b>2.32</b>	<b>2.11</b>

Sumber: BPS Kota Batam (Batam Dalam Angka Tahun 2022)

Penduduk Kota Batam pada Tahun 2021 berjumlah 1.230.097 atau bertambah sekitar 285.812 jiwa penduduk dari sensus Tahun 2010 lalu yang berjumlah 944.285 jiwa, namun dilihat dari pertumbuhan penduduk

Kota Batam dibanding dengan sensus penduduk periode Tahun 2000-2010 mengalami perlambatan, yang mana laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 7.64% sedangkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2010-2020 sebesar 2.11% atau berkurang sebesar 5.53%.

#### 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pada Tahun 2021 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 132(serratus tiga puluh dua) orang. Tepatnya menurun dari 5.785 orang di tahun 2020 menjadi 5.662 orang di tahun 2021. Dari 5.662 orang pegawai, 3.116 menjabat fungsional tertentu dan sebagian besar pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu Sarjana (S1). Sedangkan menurut jenis kelamin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam didominasi Perempuan yaitu sebanyak 3315 orang.

Untuk lebih rinci mengetahui kondisi Pegawai Negeri Sipil di Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2021 di Kota Batam**

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Laki-Laki	2.791	2.475	2.407	2.440	2.405	2.347
Perempuan	3.588	3.179	3.142	3.337	3.380	3.315
<b>Total</b>	<b>6.379</b>	<b>5.654</b>	<b>5.549</b>	<b>5.777</b>	<b>5.785</b>	<b>5.662</b>

Sumber: BKPSDM Kota Batam

#### 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas

keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah berasal dari sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Pendapatan Transfer yang meliputi Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID);
3. Lain – lain pendapatan yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

Pandemi wabah Covid-19 pada tahun ini masih memberikan pengaruh terhadap realisasi pendapatan daerah baik dari sisi PAD, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain pendapatan yang sah sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021 mengalami perubahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah:

1. Adanya kebijakan insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam yaitu Perpanjangan Jatuh Tempo, Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan/atau Denda PBB-P2 sesuai Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2021 serta Pembebasan Sanksi Administrasi berupa Penghapusan Denda dan/atau Bunga Pajak Daerah sesuai Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS 309/HK/VIII/2021;
2. Adanya target rencana penerimaan tidak sesuai dengan asumsi yang ditargetkan dalam penerimaan APBD Kota Batam Tahun 2021 dikarenakan adanya penerapan PPKM di Kota Batam sebagai dampak Covid-19 yang mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi Batam dan Nasional jika dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi;
3. Adanya peraturan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan kewenangan daerah yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah antara lain Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimana masih dilakukan penyesuaian

Ranperda sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor: 011/5976/SJ Tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

**Tabel 1.5. Realisasi pendapatan Menurut Jenis Pendapatan di Kota Batam Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	%	Selisih
		Anggaran	2021		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.668.291.189.898,00</b>	<b>2.527.649.556.975,96</b>	<b>94,73</b>	<b>140.641.632.922,04</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.219.335.537.677,00</b>	<b>1.094.271.008.952,96</b>	<b>89,74</b>	<b>125.064.528.724,04</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	945.743.797.151,00	796.567.7579.905,17	84,23	149.176.217.245,83
4.1.02.	Retribusi Daerah	127.906.700.000,00	95.790.366.876,33	74,89	32.116.333.123,67
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.648.420.047,00	12.648.420.047,00	100	-
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.036.620.479,00	189.264.642.124,46	142,27	(56.228.021.645,46)
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.290.883.306.402,00</b>	<b>1.275.530.823.196,00</b>	<b>98,81</b>	<b>15.352.483.206,00</b>
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.059.024.062.402,00	1.056.071.178.732,00	99,72	2.952.883.670,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.859.244.000,00	219.459.644.464,00	94,65	12.399.599.536,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>158.072.345.819,00</b>	<b>157.847.724.827,00</b>	<b>99,86</b>	<b>224.620.992,00</b>
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	1.746.888,00	-	1.746.888,00
4.3.03.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	158.072.345.819,00	157.845.977.939,00	99,86	226.367.880,00

Sumber: BPKAD Kota Batam

## 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

**Tabel 1.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Pembelanjaan Kota Batam Tahun 2021**

No.	URAIAN	Belanja		%	Selisih Kurang/Lebih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.938.893.690.414,00</b>	<b>2.643.101.721.752,08</b>	<b>89,94</b>	<b>295.791.968.661,92</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.256.646.934.982,00</b>	<b>2.025.396.550.140,74</b>	<b>89,75</b>	<b>231.250.384.841,26</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.004.632.516.013,00	950.960.936.070,07	94,66	53.671.579.942,93
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.202.567.235.630,00	1.030.032.380.731,67	85,65	172.534.854.898,33
5.1.05.	Belanja Hibah	48.843.563.339,00	43.823.613.339,00	89,72	5.019.950.000,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	603.620.000,00	579.620.000,00	96,02	24.000.000,00

No.	URAIAN	Belanja		%	Selisih Kurang/Lebih
		Anggaran	Realisasi		
5.2.	BELANJA MODAL	666.839.344.855,00	613.296.002.304,84	91,97	53.543.342.550,16
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.770.112.576,00	98.458.812.772,19	91,36	9.311.299.803,81
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.345.116.595,00	131.566.727.138,05	88,69	16.778.389.456,95
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	383.026.934.311,00	357.491.316.103,06	93,33	25.535.618.207,94
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.697.181.373,00	25.779.146.291,54	93,07	1.918.035.081,46
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.407.410.577,00</b>	<b>4.409.169.306,50</b>	<b>28,62</b>	<b>10.998.241.270,50</b>
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	15.407.410.577,00	4.409.169.306,50	28,62	10.998.241.270,50

Sumber: BPKAD Kota Batam

## 7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Tabel 1.7. Realisasi Pembiayaan Kota Batam Tahun 2021

No.	URAIAN	Belanja		%	Selisih Kurang/Lebih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>270.602.500.516,00</b>	<b>270.602.500.515,78</b>	<b>100</b>	<b>0,22</b>
6.1.01.	Sisal Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	270.602.500.516,00	270.602.500.515,78	100	0,22

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **A. RISALAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PENJABARAN APBD KOTA BATAM TA. 2021 DAN PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA. 2021**

##### **1. Perubahan Pertama Penjabaran APBD TA 2021**

Dalam perubahan pertama penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Penjabaran APBD TA 2021 dengan menggeser Anggaran RSUD Embung Fatimah Kota Batam, yang semula berada di bawah SKPD Dinas Kesehatan sebagai Unit SKPD RSUD Embung Fatimah Kota Batam diubah menjadi SKPD RSUD Embung Fatimah Kota Batam.

Perubahan Penjabaran APBD ini berpedoman kepada:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
2. Surat Edaran Nomor 820/6923/SJ tentang Larangan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Yang Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan sehubungan telah diundangkannya Peraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Pada Dinas Kesehatan Kota Batam.

## 2. Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2021

Pada perubahan kedua penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dilakukan dalam rangka penanganan bencana alam dan penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Perubahan ini dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran pada Belanja Tidak Terduga di SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke beberapa SKPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perubahan Kedua Penjabaran APBD TA 2021**

No	SKPD	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	9.242.458.800,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.242.458.800,00</b>

Total anggaran tersebut direalokasikan untuk SKPD sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	2.780.386.800,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	775.000.000,00
3	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	3.188.050.000,00
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	2.499.022.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.242.458.800,00</b>

Perubahan tersebut di atas berpedoman pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan

APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### 3. Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2021

Pada perubahan ketiga penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, hal-hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam rangka mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kota Batam. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor:17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan mendukung penanganan pandemi COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perubahan Ketiga Penjabaran APBD TA 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	1.878.092.000,00
2	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	292.193.440,00
3	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	262.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	64.382.500,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	654.370.500,00
6	Dinas Pertanahan Kota Batam	117.700.000,00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	74.119.705.000,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam	968.891.000,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	1.759.701.000,00
10	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam	2.299.393.100,00
11	Sekretariat DPRD Kota Batam	2.368.273.200,00
12	Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kota Batam	3.507.808.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.292.509.740,00</b>

Hasil penyesuaian anggaran tersebut dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengurangan Alokasi DAU sesuai Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemic COVID-19 dan dampaknya	20.719.086.000,00
2	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Batam	27.136.100.000,00
3	Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di RSUD Kota Batam	8.354.700.000,00
4	Penganggaran Posko COVID-19 di seluruh kecamatan	1.512.000.000,00
5	Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga	30.570.623.740,00
<b>TOTAL</b>		<b>88.292.509.740,00</b>

Perubahan penjabaran ketiga dilakukan dengan berpedoman pada :

- a. Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;

- c. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

#### 4. Perubahan Keempat Penjabaran APBD TA 2021

Pada perubahan keempat penjabaran APBD Kota Batam Tahun 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan pergeseran anggaran pada beberapa SKPD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan Penyediaan Anggaran untuk Operasional PPKM di Kecamatan dan Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perubahan Keempat Penjabaran APBD TA 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	11.749.728.644,00
2	Dinas Kesehatan Kota Batam	4.098.490.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.848.218.644,00</b>

Hasil penyesuaian anggaran tersebut dialokasikan ke SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Perhubungan Kota Batam	3.538.973.760,00
2	Seluruh Kecamatan Kota Batam	851.774.884,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	840.066.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	4.307.029.000,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	5.837.775.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	472.600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>15.848.218.644,00</b>

Perubahan keempat penjabaran APBD ini berpedoman pada :

- a. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kerja Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil;
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

## 5. Perubahan Kelima Penjabaran APBD TA 2021

Dalam perubahan kelima penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terdua (BTT) dalam rangka penanganan COVID-19 Penyediaan Anggaran untuk Operasional PPKM di Kecamatan dan Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perubahan Kelima Penjabaran APBD TA 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam (BTT)	19.497.301.955,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.497.301.955,00</b>

- **Di alokasikan ke :**

No	Uraian	Jumlah
1	Seluruh Kecamatan	88.342.616,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah	19.108.559.339,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	300.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.497.301.955,00</b>

Perubahan kelima penjabaran APBD ini berpedoman :

- a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurattermasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 ,Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kerja Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil;
- e. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## **6. Perubahan Keenam Penjabaran APBD TA 2021**

Dalam perubahan keenam penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan *Refocusing* Anggaran di beberapa SKPD dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 dan Penyediaan Anggaran untuk Percepatan Vaksinasi dan Operasional PPKM di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW di Kota Batam yang dilaksanakan oleh beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Perubahan Keenam Penjabaran APBD TA 2021**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	11.406.397.437,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	1.637.600.000,00
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	1.000.000.000,00
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	10.613.355.394,00
5	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam	2.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.657.352.831,00</b>

- **Di alokasikan ke :**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Kesehatan Kota Batam	4.367.692.831,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	8.654.700.000,00
3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	233.260.000,00
4	Sekretariat Daerah Kota Batam	1.726.000.000,00
5	Seluruh Kecamatan	11.675.700.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>26.657.352.831,00</b>

Perubahan Penjabaran APBD ini berpedoman pada :

- a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

## 7. Perubahan Ketujuh Penjabaran APBD TA 2021

Dalam perubahan ketujuh penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan *Refocussing* anggaran di beberapa SKPD dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan mendukung operasionalisasi Asrama Haji sebagai tempat isolasi pasien Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Perubahan Ketujuh Penjabaran APBD TA 2021**

- **Penambahan Pendapatan :**

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Dana BOS	3.150.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.150.000.000,00</b>

- **Pengurangan/Penyesuaian Belanja :**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	6.040.771.294,00
2	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	1.400.000.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	700.000.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	700.000.000,00
5	Sekretariat Daerah Kota Batam	5.226.000.000,00
6	Sekretariat DPRD Kota Batam	1.300.000.000,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	1.100.000.000,00

No	Uraian	Jumlah
8	Inspektorat Kota Batam	1.500.000.000,00
9	Kecamatan Batu Aji Kota Batam	1.000.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.966.771.294,00</b>

• **Di alokasikan untuk Belanja :**

No	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Kota Batam	3.150.000.000,00
2	Dinas Kesehatan Kota Batam	3.580.000.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	12.028.380.294,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	3.076.516.000,00
5	Dinas Perhubungan Kota Batam	281.875.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.116.771.294,00</b>

Perubahan penjabaran ini dilakukan dengan berpedoman kepada:

- a. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi Tahun Anggaran 2021;

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak.

## **8. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021**

Dalam penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Batam melakukan pergeseran antar rekening belanja Sub Rincian Objek pada Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di beberapa SKPD terkait, dikarenakan adanya beberapa rekening belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang merupakan belanja wajib mengikat terdapat kekurangan anggaran.

Perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021, dimana perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan dalam ringkasan sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,432,639,685,193</b>	<b>1,219,335,537,677</b>	<b>-213,304,147,516</b>	<b>15%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1,156,408,239,166	945,743,797,151	-210,664,442,015	18%
4.1.02	Retribusi Daerah	145,516,700,000	127,906,700,000	-17,610,000,000	12%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11,685,992,811	12,648,420,047	962,427,236	8%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119,028,753,216	133,036,620,479	14,007,867,263	12%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,319,207,339,209</b>	<b>1,290,883,306,402</b>	<b>-28,324,032,807</b>	<b>2%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,087,348,095,209	1,059,024,062,402	-28,324,032,807	3%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231,859,244,000	231,859,244,000	0	0%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>109,016,200,000</b>	<b>158,072,345,819</b>	<b>49,056,145,819</b>	<b>45%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	109,016,200,000	158,072,345,819	49,056,145,819	45%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,860,863,224,402</b>	<b>2,668,291,189,898</b>	<b>-192,572,034,504</b>	<b>7%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,301,424,533,959</b>	<b>2,256,646,934,982</b>	<b>-44,777,598,977</b>	<b>2%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1,045,221,940,830	1,004,632,516,013	-40,589,424,817	4%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,211,726,102,790	1,202,567,235,630	-9,158,867,160	1%
5.1.05	Belanja Hibah	42,043,188,339	48,843,563,339	6,800,375,000	16%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2,433,302,000	603,620,000	-1,829,682,000	75%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>643,660,681,695</b>	<b>666,839,344,855</b>	<b>23,178,663,160</b>	<b>4%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,622,820,489	107,770,112,576	22,147,292,087	26%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157,219,666,839	148,345,116,595	-8,874,550,244	6%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	383,565,578,022	383,026,934,311	-538,643,711	0%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,252,616,345	27,697,181,373	10,444,565,028	61%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>23,488,842,415</b>	<b>15,407,410,577</b>	<b>-8,081,431,838</b>	<b>34%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	23,488,842,415	15,407,410,577	-8,081,431,838	34%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,968,574,058,069</b>	<b>2,938,893,690,414</b>	<b>-29,680,367,655</b>	<b>1%</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-107,710,833,667</b>	<b>-270,602,500,516</b>	<b>-162,891,666,849</b>	<b>-151%</b>

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>107,710,833,667</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>162,891,666,849</b>	<b>151%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107,710,833,667	270,602,500,516	162,891,666,849	151%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>107,710,833,667</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>162,891,666,849</b>	<b>151%</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>107,710,833,667</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>162,891,666,849</b>	<b>151%</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

## 9. Perubahan atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2021

Dalam Perubahan penjabaran atas Perubahan APBD Kota Batam TA.2021, Pemerintah Kota Batam melakukan perubahan atas penjabaran Perubahan APBD Kota Batam TA.2021 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 2.8. Perubahan atas Penjabaran Perubahan APBD TA 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		PENJABARAN PERUBAHAN APBD	PERGESERAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN APBD	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1,219,335,537,677</b>	<b>1,219,335,537,677</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.01	Pajak Daerah	945,743,797,151	945,743,797,151	0	0%
4.1.02	Retribusi Daerah	127,906,700,000	127,906,700,000	0	0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,648,420,047	12,648,420,047	0	0%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	133,036,620,479	133,036,620,479	0	0%
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,290,883,306,402</b>	<b>1,290,883,306,402</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,059,024,062,402	1,059,024,062,402	0	0%

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		PENJABARAN PERUBAHAN APBD	PERGESERAN ATAS PENJABARAN PERUBAHAN APBD	(Rp)	%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231,859,244,000	231,859,244,000	0	0%
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>158,072,345,819</b>	<b>158,072,345,819</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	158,072,345,819	158,072,345,819	0	0%
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,668,291,189,898</b>	<b>2,668,291,189,898</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2,256,646,934,982</b>	<b>2,256,646,934,982</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1,004,632,516,013	1,004,632,516,013	0	0%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,202,567,235,630	1,202,567,235,630	0	0%
5.1.05	Belanja Hibah	48,843,563,339	48,843,563,339	0	0%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	603,620,000	603,620,000	0	0%
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>666,839,344,855</b>	<b>666,839,344,855</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107,770,112,576	107,770,112,576	0	0%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148,345,116,595	148,345,116,595	0	0%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	383,026,934,311	383,026,934,311	0	0%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27,697,181,373	27,697,181,373	0	0%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15,407,410,577</b>	<b>15,407,410,577</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15,407,410,577	15,407,410,577	0	0%
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,938,893,690,414</b>	<b>2,938,893,690,414</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-270,602,500,516</b>	<b>-270,602,500,516</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	270,602,500,516	270,602,500,516	0	0%
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>270,602,500,516</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>



**BAB III**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

**3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan memuat:

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**Tabel 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini	Program Wajib Pendidikan Dasar	1. APK SD 1.1. APK SD Laki-Laki 1.2. APK SD Perempuan 2.APM SD 2.1. APM SD Laki-laki 2.2. APM SD Perempuan 3. APK SMP 3.1. APK SMP Laki- Laki 3.2. APK SMP Perempuan 4.APM SMP 4.1. APM SMP Laki- laki 4.2. APM SMP Perempuan 5.Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 6.Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 7.Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi	102,24% 109,76% 103, 35% 95,25% 97,5 % 93 % 96,75 % 98.50 % 95 % 93,75% 94 % 93,5 % 24,51% 61,71% 44,70% 46,92% 0 0,5 % 100% 100%	104.53% 104.98% 104.07% 95.65% 95.71% 95.58% 106.04% 105.18% 106.92% 94,27% 94 % 94.54% 34,51% 74.70% 44,70% 73.30% 0.3 0.55 100.00% 100.00%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 53,95% 8. Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32% 9. Angka Putus Sekolah SD 10. Angka Putus Sekolah SMP 11. % tingkat kelulusan SD 12. % tingkat kelulusan SMP					
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Jenjang SD	6,6 %	6,6 %			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Jenjang SMP	6,55%	6,55%			
				Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah SMP Yang difasilitasi Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	63 Sekolah	63 Sekolah			
				Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1. APK PAUD 1.1. APK PAUD Laki-laki 1.2. APK PAUD Perempuan 2. APM PAUD 2.1. APM PAUD Laki-laki 2.2. APM PAUD Perempuan 3. Persentase TK Berakreditasi Minimal A	85,88 % 34,28 % 51,60 % 82,33 % 32,16 % 50,17 % 44,78 % 48, 52 %	83,22 % 82,35 % 84,09 % 75, 82 % 75, 01 % 76, 63 % 45,00 % 48, 89 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>4.Persentase TK Berakreditasi Minimal B</b>					
				Kegiatan Pengolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Jenjang PAUD	75,4%	75,4%			
				Kegiatan Pengolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Persentase Rata-rata Capaian Nilai Mutu Pendidikan Jenjang Kesetaraan	60,2 %	60,2 %			
	Non Urusan	Dinas Pendidikan Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Daerah						
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Batam	1. Pengembangan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pusku, puskesmas rawat inap, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai rumah sakit rujukan regional 2. Menerapkan sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mencapai target	100%	79.26%	1. Tahun 2021 penyebab kematian Ibu karena Covid 19 2. Faskes membatasi kegiatan karena Pandemi Covid 19 3. Terbatas Nakes kerena banyak bertugas dalam Penanganan Covid 19 4. Partisipasi masyarakat masih rendah untuk datang ke posyandu 5. Penurunan daya beli Pangan karena Covid 19	1. Upaya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pemberian pelayanan ibu hamil terkonfirmasi Covid 19	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			bagi warga miskin 3. Penguatan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat							
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penerbitan izin rumah sakit C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan untuk UKM dan UKM kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKM kewenangan daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksannya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 Tahun	1 Tahun			
			<b>Penguatan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Persentase Kelurahan dengan memiliki minimal 3 upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) (posyandu, posbindu dan posyandu remaja)</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>			
				Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kelurahan dengan memiliki minimal 3 upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) aktif	14%	14%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Penguatan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (9) jenis tenaga kesehatan sesuai standar ( Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Kefarmasian & Analis Kesehatan) sesuai standar	47,5%	42,86%	Distribusi Tenaga Kesehatan Tidak Merata		
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Puskesmas memiliki sumberdaya manusia kesehatan (SDMK) sesuai standar	35%	27,67%	1. Rencana kebutuhan tidak sama dengan pemenuhan SDM 2. Pemetaan SDM yang tidak merata	1. Melakukan verifikasi dan validasi data 2. Relokasi tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan 3. Usulan penambahan tenaga Kesehatan melalui jalur CPNS, PPPK, NS	
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terterselenggaranya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun		1. Mensosialisasikan pengisian rekrutmen agar sinkronisasi antara rencana dan kebutuhan sesuai 2. Pengusulan tenaga kesehatan dan tenaga dokter intensif dari Kemenkes dapat membantu pemenuhan tenaga yang kurang 3. Berkoordinasi dengan Subbag Umum dan Kepegawaian serta BKPSDM	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									dalam pemerataan pegawai	
			Penguatan pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan	40%	72,85%			
				Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0%	0, %			
				Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak	Persentase produk makanan minuman industri rumah tangga	0%	77,70%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	yang memenuhi syarat dan ketentuan					
			Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah					
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pelayanan BLUD	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
3	Kesehatan	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Meningkatkan Aksesibilitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau Dan Merata	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Obat, BHP dan alat kesehatan rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam	88%	91.68%			
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/ Kota						
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi	100%	40.41%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase terpenuhinya Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	100%	39.8%			
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM yang terpenuhi	100%	35.94%			
				Kegiatan Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Non Urusan	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	91.1%			
					Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%				
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Urusan Pemerintah Daerah						
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD	1 tahun	1 tahun			
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Melakukan pembangunan, pelebaran, rekonstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan.	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	36 km	50.84 Km			
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	36 km	50.84 Km			
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah peralatan	1 unit	1 unit			
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peralatan	1 paket	1 paket			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah lampu PJU yang dibangun	260 titik	346 titik			
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	Terbangunya lampu PJU Kota Batam	260 titik	346 titik			
				Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terbangunya lampu PJU Kota Batam	260 titik	346 titik			
			1.meningkatkan ketersediaan Infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	33 unit	33 unit			
				Kegiatan Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah	Terlaksananya operasional peralatan alat berat	33 unit	33 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/ Kota						
			2. Melakukan Pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	5000 m	61719 m			
				Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terbangunya drainase Kota Batam	3334 m	61719 m			
	Non Urusan	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100 persen	100 persen			
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Perangkat Daerah						
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	1 tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum perkantoran	1 tahun	1 tahun			
5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perencanaan dan pemanfaatan/ data dan informasi bidang keciptakaryaan dan tata ruang.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	43,49%	43,85%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			<b>Meningkatkan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang</b>							
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	1.100 jiwa	1.396 jiwa			
				<b>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>Persentase penduduk yang terlayani sanitasi</b>	<b>12,22%</b>	<b>12,16%</b>			
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	1.500 jiwa	1.095 jiwa	Terjadi penurunan pagu untuk DAK Bidang Sanitasi dan harga satuan dari Kementerian PUPR		
				<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola</b>	<b>16,67%</b>	<b>21,82%</b>			
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota,	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/revitalisasi/ rehabilitasi	440 unit	576 unit			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						
				<b>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>	<b>Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi</b>	<b>17,23%</b>	<b>17,66%</b>			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi sertifikasi terampil untuk konstruksi yang mempunyai sertifikat terampil serta sosialisasi tentang Peraturan Bidang Jasa Konstruksi di Kota Batam	125 orang	318 orang			
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya informasi jasa konstruksi tentang tukang bersertifikat, data IUJK (Ijin Usaha Jasa Konstruksi), Badan usaha dan data proyek yang sedang berjalan	1 dokumen	1 dokumen			
				Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100 dokumen	100 dokumen			
				<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang</b>	<b>54,95%</b>	<b>78,24%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Ruang	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi perencanaan ruang dan dokumen pemanfaatan ruang yang tersedia, direkomendasikan dan diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen			
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen perencanaan ruang, dokumen pemanfaatan ruang yang tersedia, direkomendasikan dan diterbitkan	45 dokumen	128 dokumen			
	Non Urusan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelayan BLUD	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	25.940 jiwa	25.940 jiwa			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	Mendorong pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota	Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	581 Unit	228 Unit	Realisasi tidak tercapai sesuai dengan target dikarenakan alokasi anggaran DAK lebih rendah lebih tahun sebelumnya baik di Perangkat Daerah maupun SNVT	Melakukan koordinasi dengan SNVT dan Kementerian terkait perihal prioritas penanganan RTLH Kota Batam	
			Peningkatan penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman		Panjang drainase/saluran lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	17.193 M	7.508,33 M	Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD		
					Jumlah bangunan rusunawa dan PSU rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	5 TB	5 TB			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat		Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	64 Kelurahan	62 Kelurahan	Ada 2 kelurahan yang tidak melaksanakan Program Infrastruktur Kelurahan (PIK) (Muka Kuning, Tanjung Pinggir) karena tidak adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria Perwako PIK No.7 Tahun 2019		
					Panjang jalan lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi serta dipelihara dikawasan permukiman perkotaan	57.570 M	21.828,20 M	Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD		
					Panjang pembangunan/rehabilitasi turap/talud/bronjong permukiman dan fasilitas umum dikawasan perkotaan	1.521 M	984,10 M	Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD		
					Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan Panjang Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland	12.975 M	1.206,50 M	Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD		
			Mendorong pelaksanaan pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah bangunan rusunawa dan PSU rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	5 TB	5 TB			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota							
				Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	Terlaksananya Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	30 Twin Block	30 Twin Block			
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Program Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	581 Unit	228 Unit	Realisasi tidak tercapai sesuai dengan target dikarenakan alokasi anggaran DAK lebih rendah tahun sebelumnya baik di Perangkat Daerah maupun SNVT	Melakukan koordinasi dengan SNVT dan Kementerian terkait perihal prioritas penanganan RTLH Kota Batam	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	78 Unit	78 Unit			
				<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>Panjang pembangunan/rehabilitasi turap/talud/bronjong permukiman dan fasilitas umum dikawasan perkotaan</b>	<b>1.521 M</b>	<b>984,10 M</b>	<b>Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD</b>		
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang diserahkan	45 Akte	19 Akte	Realisasi fisik tidak sesuai dengan target di karenakan Banyak hasil verifikasi Lapangan PSU perumahan tidak bisa dilanjutkan ketahap pembuatan akta pelepasan Hak atas tanah dikarenakan beberapa kendala seperti : 1. Ditemukan pembangunan perumahan yang belum selesai terbangun 2. Menunggu kesiapan Developer untuk melakukan penandatanganan akta Notaris		
				<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan Panjang Turap/Talud/</b>	<b>12.975 M</b>	<b>1.206,50 M</b>	<b>Dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anggaran APBD</b>		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>Bronjong di Wilayah Hinterland</b>					
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Panjang Drainase/Saluran Lingkungan, Panjang Jalan Lingkungan dan Panjang Turap/Talud/ Bronjong di Wilayah Hinterland	952.16 Meter	896 Meter	Volume pekerjaan disesuaikan dengan alokasi anggaran DAK		
	Non Urusan	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dan fungsi perangkat daerah					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	1. Jumlah aksi demo yang diamankan	50 kali	30 kali	Target tidak terealisasi karena bersifat insidental		
					2. Jumlah Linmas yang diberdayakan	344 orang	-	Target tidak terealisasi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19		
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Terlaksananya penegakan perda dan perwako di Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pegawai	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengadaan milik daerah penunjang urusan daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang aset milik daerah di Satpol PP Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			
8	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan Pelayanan Pemadaman kebakaran	92 %	97 %			
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase masyarakat Kota Batam yang mendapatkan Pelayanan Pemadam Kebakaran	92 %	97 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
	Non Urusan	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100 %	100 %			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD Kebakaran Kota Batam	100 %	100 %			
					Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun			
9	Sosial	Dinas Sosia dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Meningkatnya Pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang aktif	100%	100%			
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PSKS yang difasilitasi	100%	100%			
				Program Rehabilitasi Sosial	Terlindungi dan Terjaminnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	69%	Situasi pandemi COVID 19 yang terjadi mengakibatkan proses penjangkauan PPKS yang ada di lapangan terkendala oleh hal hal yang terjadi di lapangan karena tidak memungkinkan untuk melakukan penjangkauan		
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	Teridentifikasinya dan Termonitor Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
				<b>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT, BST)</b>	<b>77,76%</b>	<b>72,69%</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase DTKS yang divalidasi	95,53%	78,28%	Perhitungan Dengan Menggunakan Pencacah Sebanyak 87 Orang	42240 KK, Yang Terealisasi 47054, KK Presentase yang didapat = 111%, dengan memakai 64 Pencacah	
				<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>Persentase korban bencana dari kelompok rentan yang dilindungi dan diberikan penjaminan sosial</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Tersedianya Kebutuhan Dasar Dalam Bentuk Bahan Bakar Makanan Pada Korban Bencana	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			manusia aparatur yang memiliki kompetensi							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran/Umum	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Dan Terpeliharanya Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Dan Terpeliharanya Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	1 Tahun	1 Tahun			

**Tabel 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahannya	23,44%	23,44%			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang berprestasi	3 kelurahan	3 kelurahan			
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan kelurahan yang aktif	93,55%	93,55%			
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	97,01%	97,01%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Mewujudkan sumberdaya manusia daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender	61.05 %	59,10%	Target tidak terealisasi dikarenakan: 1. Adanya pandemi Covid-19 2. Strategi gender perlu pembenahan lebih lanjut 3. Cakupan indikator luas	Memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender	
				Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kader dan pengurus PKK serta perempuan Kota Batam yang dibina dan diberikan pelatihan keterampilan agar mampu meningkatkan taraf hidup	700 Orang	6090 Orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,54%	94,43%			
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,05%	59,10%	Target tidak terealisasi dikarenakan: 1. Adanya pandemi Covid-19 2. Strategi gender perlu pembenahan lebih lanjut 3. Cakupan indikator luas	Memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.	
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD yang mendapatkan Pelatihan Anggaran yang Responsif Gender	15 OPD	41 OPD			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang mendapatkan Pembinaan Pelatihan Perempuan Berkepribadian dan Hebat Politik (seminar kepribadian, lomba hari ibu, sarasehan organisasi)	3 Organisasi	4 Organisasi			
				<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>	<b>94,54%</b>	<b>94,43%</b>			
				Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Diperbaharui	100%	100%			
				<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu					
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	100%	100%			
				<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan</b>	100%	100%			
				Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Meningkatnya Anak yang Mendapat Perlindungan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						
				<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Persentase perempuan dan anak yang mendapatkan perlindungan</b>	100%	100%			
				Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Capaian Skor Kota Layak Anak (HAN Kota Batam, Pembentukan Kelurahan Layak Anak, terfasilitasinya kegiatan KPPAD Kota Batam)	750 Skor	920 Skor			
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam</b>	<b>Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Persentase Pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)</b>	74%	78,70%			
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PUS di Kota Batam yang mengikuti Program KB dan Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	1000 PUS	993 PUS	Terkait teknis pelaksanaan di lapangan kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat terkendala PPKM masa Pandemi Covid-19		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Lini Lapangan yang Dibina	396 Orang	396 Orang			
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Sarana/ Prasarana KB	12 Kecamatan	12 Kecamatan			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Ketersediaan Sarana dan Prasarana KB	13 Kampung KB	13 Kampung KB			
				<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Sejahtera (KS)</b>	<b>Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)</b>	74%	78,70%			
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Jumlah Anggota Bina Ketahanan Keluarga yang dibina	268 Kelompok	268 Kelompok			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
				<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Persentase pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)</b>	74%	78,70%			
				Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya dokumen GDPK Kota Batam	1 Buku	1 Buku			
	Non Urusan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan OPD	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun	1 Tahun			
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Meningkatkan kualitas <i>Home Industry</i> dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase ketersediaan pangan	38%	38%			
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					
				<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>Prosentase ketersediaan pangan</b>	<b>38%</b>	<b>38%</b>			
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan			
4	Pertanahan	Dinas Pertanahan Kota Batam	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan set	Program Penatagunaan Tanah	Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	200 dokumen	122 dokumen	Dari 181 Dokumen lahan aset pemko yang diajukan ke BPN, yang terbit sertipikat lahan nya 122 dokumen		
					Jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam	14 persil	14 persil			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik		Fasilitasi Pengurusan Sertifikat lahan Masyarakat	100 dokumen	100 dokumen			
				Kegiatan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam 200 dok, Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 100 dok, jumlah pengadaan lahan aset Pemko Batam 14 persil, penataan lahan Kampung Tua di 3 lokasi	100%	90,25%	Aset tanah Pemko Batam sebagian belum termasuk dalam Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam yang menjadi dasar penerbitan hak kepemilikan aset tanah	Pemerintah Kota Batam mengajukan permohonan kepada Kepala BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diproses penerbitan sertifikat HPL pada lokasi aset Pemko Batam. Setelah diterbitkannya HPL, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak kepemilikan aset tanah Pemko Batam	
	Non Urusan	Dinas Pertanahan Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	98,45%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	99,91%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tupoksi SKPD	100%	76,54%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Tupoksi SKPD	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	86,76%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencacatan sipil	100%	96%	Masih adanya sebagian masyarakat yang menunda pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online berbasis Web dan Android</li> <li>- Pelayanan jemput bola Pendaftaran Penduduk (RUTAN/LAPAS, Panti Jompo, Orang Sakit, Daerah Hinterland)</li> <li>- Percepatan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran bekerjasama dengan beberapa RS dan Klinik (Layanan 3 in 1 : Akta Lahir, KK, KIA)</li> </ul>	
				Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencacatan sipil sesuai ketentuan	100%	96%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Non Urusan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung daya sumber manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Persentase Kebutuhan Barang Milik	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi					
				Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%			
6	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Meningkatkan perlindungan pemanfaatan dan penataan lingkungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di pulau batam	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	60%	66,15%			
			Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung daya	Kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/kota	Terlaksananya KLHS rencana detail tata ruang 2 kecamatan	1 tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			tampung Kota Batam							
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Ketata Usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	60%	41,57%	Perubahan target capaian indikator KLHS RDTR 2021 yg awalnya 2 WP/ kecamatan, berubah menjadi 3 WP/kecamatan krn penyesuaian dengan KRP (Kegiatan, Program, Kegiatan) penyusunan RDTR Kota Batam (melalui Dinas CKTR) bertambah 1 WP/kecamatan, yaitu Kec. Belakang Padang shg capaian berubah menjadi 3 kecamatan		
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota	Terlaksananya Dokumen Hasil Pemantauan Udara ambient, Emisi Sumber Bergerak dan Kualitas air permukaan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemulihan dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ Kota	Terlaksananya Jumlah Pemulihan terhadap Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	60%	67,91%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan	60%	60%			
				Kegiatan Pembinaan dan pengasawan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Terlaksananya penanganan limbah B3 medis COVID 19 isoter dan isoman	3 bulan	3 bulan			
				Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	Penanganan Limbah B3 medis Covid-19 ISOTER dan ISOMAN	3 bulan	3 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kabupaten/ Kota						
				<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	<b>Presentase jumlah pengaduan lingkungan yang ditindak lanjuti/terverifikasi</b>	<b>90%</b>	<b>93,50%</b>			
				Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Adiwiyata	1 tahun	1 tahun			
				<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>Persentase pengangkutan sampah (Dinas Lingkungan Hidup)</b>	<b>80%</b>	<b>94,58%</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Persentase Pengangkutan Sampah	1 tahun	1 tahun			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung daya sumber manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93,02%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Terlaksananya gaji dan tunjangan gaji	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					PNS DLH Kota Batam					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya fasilitas sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	<b>Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1 Tahun</b>	<b>1 Tahun</b>			
7	Urusan Lingkungan Hidup	Kecamatan Batu Ampar Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	80%	80%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai							
				Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah	Persentase Sampah yang Diangkut	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Batu Ampar Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 512 org	PKK 29 LPM 4 Posyandu 196 orang Kader Siaga Aktif 8 org			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 orang KSA 640 orang	PKK 29 LPM 4 Posyandu 196 orang Kader Siaga Aktif 8 org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan masyarakat di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkup Pemukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat	10%	92,37%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>Kecamatan Batu Ampar</b>					
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Penyeleng- garan Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Penyeleng- garan Pemerintah dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Kecamatan Batu Ampar Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten / Kota</b>	<b>Tersediannya Administrasi Perkantoran Yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			daya sumber manusia aparatur yang memiliki kompetensi							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perankoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran Kecamatan Batu Ampar	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi Perkantoran Kecamatan Batu Ampar	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi Perkantoran Kecamatan Batu Ampar	1 Tahun	1 Tahun			
8	Lingkungan Hidup	Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terangkut	36 ton/hari	36 ton/hari			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggara	Jumlah RT,RW,dan LPM yang aktif	263 RT, RW, LPM / Tahun	263 RT, RW, LPM / Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan Persentase sarpras kelurahan yang dibangun	100%	100%			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Umum	Kemasyarakatan	Siaga Aktif 640 org	Kader Siaga Aktif 640 org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya event tingkat kecamatan dan kelurahan	5 Event / Tahun	3 Event / Tahun	Target tidak terealisasi dikarenakan adanya pandemi covid-19		
	Non Urusan	Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Urusan Pemerintah Daerah						
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
	Lingkungan Hidup	Kecamatan Sekupang Kota Batam	Menyediakan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Tingkat Kota dan Kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan Kecamatan Sekupang	Persentase Pengangkutan Sampah	80%	80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Sekupang Kota Batam	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan,	Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/	PKK 77 LPM 77 POSYANDU	PKK 77 LPM 77 POSYANDU 700			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Pemerintahan Umum	Organisasi Kemasyarakatan	700 KPM 320 Org KSA 640 Org	KPM 320 Org KSA 640 Org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Tersedianya Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1 Tahun	1 Tahun			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 POSYANDU 700 KPM 320 Org KSA 640 Org	PKK 77 LPM 7 POSYANDU 700 KPM 320 Org KSA 640 Org			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Kecamatan Sekupang Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Tersedianya Administrasi Perkantoran Yang	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung daya sumber manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Daerah Kabupaten/ Kota	Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah					
				Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peralatan Dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun			
10	Lingkungan Hidup	Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			membangun kelurahan							
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya kapasitas lembaga/	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Umum	organisasi Kemasyarakatan	org Kader Siaga Aktif 640 org	Kader Siaga Aktif 640 org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kecamatan)	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
11	Lingkungan Hidup	Kecamatan Nongsa Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Nongsa Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan	Persentase penyediaan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pelayanan Publik	dan pelayan publik					
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; persentase warga yang berdaya	10 %	10 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Persentase Penyediaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Ketertiban Umum	Umum yang Terlaksana					
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase penyediaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Kecamatan Nongsa Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
12	Lingkungan Hidup	Kecamatan Bengkong Kota Batan	Menyediakan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah di Tingkat Kota dan Kecamatan yang Ramah Lingkungan Melalui Penyediaan Lahan Untuk Fasilitas Persampahan dan Peningkatan TPS yang Berkualitas Standar Lingkungan Hidup, Peningkatan Pembersihan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Sampah di Aliran Sungai							
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Bengkong Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pogram Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan	100%	100%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Bengkong Kota Batam	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
13	Urusan Lingkungan Hidup	Kecamatan Batam Kota	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	72,80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	% jumlah keluhan terhadap pengangkutan sampah	80%	72,80%	Kurangnya Armada Pengangkutan Sampah	Mengajukan Penambahan Armada dan Satgas Sampah	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Batam Kota	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10%	10%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan Batam Kota)	10%	10%			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban	Penyediaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Ketentraman Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana					
			Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 Org			
	Non Urusan	Kecamatan Batam Kota	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi	Tersedianya administrasi	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Umum Perangkat Daerah	perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah					
				Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
14	Lingkungan Hidup	Kecamatan Batu Aji Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	80%	94,55			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai							
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Tahun	1 Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Batu Aji Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org			
				Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	terlaksananya koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100%	100%			
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org			
				Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan	penyediaan koordinasi upaya penyelenggaraan	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				ketentraman dan ketertiban umum	ketentraman dan ketertiban umum yang terlaksana ketertiban umum					
				<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandy 700 KPM 320 org KSA 640 org</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandy 700 KPM 320 org KSA 640 org</b>			
				Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya wawasan kebangsaan dan kerukunan antar suku umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	1 Tahun	1 Tahun			
			<b>Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat</b>	<b>99,97%</b>	<b>93,11%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	terlaksananya pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Kecamatan Batu Aji Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	95%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya kualitas ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya pakaian dinas beserta atribut	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Urusan Pemerintah Daerah						
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Tahun	1 Tahun			
15	Lingkungan Hidup	Kecamatan Sagulung Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terangkut	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Sagulung Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org	PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah RT,RW,dan LPM yang aktif	577 RT, 132 RW, 6 LPM pertahun	577 RT, 132 RW, 6 LPM pertahun			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10 %	10 %			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tembesi	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya	Terlaksananya kegiatan koordinasi	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org</b>	<b>PKK 77 LPM 77 Posyandu 650 KPM 320 org Kader Siaga Aktif 640 org</b>			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	1 Tahun	1 Tahun			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Kecamatan Sagulung Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					fungsi PD Kota Batam					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
16	Lingkungan Hidup	Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengangkutan sampah	80%	80%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai							
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	1 Tahun	1 Tahun			
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	10%	10%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	Peningkatan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	KK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org	KK 77 LPM 77 Posyandu 700 KPM 320 org KSA 640 org			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
	Non urusan	Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan	Tersedianya Pengadaan	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Peralatan dan Mesin Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
17	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Kecamatan Bulang Kota Batam	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas lembaga/ organisasi kemasyarakatan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang kelurahan dan kecamatan serta pemberian insentif rt,rw dan lpm yang aktif	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	Terlaksananya Kegiatan penanganan COVID-19 dikecamatan Bulang	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				dan Ketertiban Umum						
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan</b>	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman</b>	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
	Non urusan	Kecamatan Bulang Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
18	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Galang Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi ke masyarakatan	PKK 77, LPM 77, POSYANDU 700, KPM 320 org, KSA 640 org	PKK 77, LPM 77, POSYANDU 700, KPM 320 org, KSA 640 org			
				Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyediaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Covid 19 di Kecamatan Galang	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	PKK 77, LPM 77, POSYANDU 700, KPM 320 org, KSA 640 org	PKK 77, LPM 77, POSYANDU 700, KPM 320 org, KSA 640 org			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Pemberdayaan Kelurahan	1 Tahun	1 Tahun			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Kecamatan Galang Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
19	Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Batam	Mengembangkan sistem parkir yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	65%	41%	Penyesuaian Anggaran		
					Jumlah sarana prasarana transportasi terpelihara	60%	39%	Penyesuaian Anggaran		
					Meningkatnya cakupan pelayanan parkir	228 Lokasi	542 Lokasi			
					Jumlah penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing	3 Juta Penumpang	1.172.264 penumpang	Target tidak terealisasi dikarenakan berkurangnya jumlah jam operasional bus dan jumlah armada bus yang beroperasi karena adanya pembatasan pergerakan penumpang sejak		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								awal tahun akibat pandemi covid-19		
					Panjang Kota Batam yang dilalui Trans Batam untuk melayani masyarakat	246 km	166,5 km	Target tidak terealisasi dikarenakan berkurangnya jumlah jam operasional bus dan jumlah armada bus yang beroperasi karena adanya pembatasan pergerakan penumpang sejak awal tahun akibat pandemi covid-19		
					Jumlah Koridor Trans Batam	10 Koridor	8 Koridor	Target tidak terealisasi dikarenakan jumlah sarana belum memadai untuk pembukaan koridor baru		
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun	65%	41%	Penyesuaian Anggaran		
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Titik Lokasi Parkir	228 Lokasi	542 Lokasi			
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen	Jumlah sarana dan prasarana	65%	41%	Penyesuaian Anggaran		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	transportasi terbangun					
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Titik Lokasi Parkir	228 Lokasi	542 Lokasi			
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penumpang Trans Batam	3.000.000 Penumpang	1.172.264 penumpang	Target tidak terealisasi dikarenakan berkurangnya jumlah jam operasional bus dan jumlah armada bus yang beroperasi karena adanya pembatasan pergerakan penumpang sejak awal tahun akibat pandemi covid-19		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemerataan Pembangunan hingga di hinterland	Program Pengelolaan Pelayaran	Sarana angkutan penumpang dan barang laut	15 kapal	-	Berdasarkan RPJMD 2016-2021 : 12 Kapal. Di 2017 dibangun 3 Kapal, 2018 : 5 Kapal (jumlah 8 kapal, semua dari DAK). Kebijakan DAK tahun 2017, pembangunan kapal harus diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memiliki badan hukum. Karena sulitnya mencari Pihak Ketiga yang Berbadan Hukum, Dinas terkait tidak melanjutkan lagi.		
				Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/ Kota	Operasional Kapal untuk Masyarakat Hinterland	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah sarana dan prasarana transportasi terbangun	65%	41%	Karena adanya penyesuaian penganggaran pembangunan sarana dan prasarana perhubungan		
	Non Urusan	Dinas Perhubungan Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya sarana aparatur selama 1 tahun	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan	Presentase Terpenuhinya	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tupoksi SKPD					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpeliharanya Prasarana Kantor yang Menunjang Tupoksi SKPD	100%	100%			
				Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD	Operasional Bus Trans Batam	3 Koridor	3 Koridor			
20	Komunikasi dan Informatikaa	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Pengembangan pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	81.25-100	83			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah kota	100 %	100%			
			Membangun dan menerapkan system informasi pelayanan public yang terintegrasi	Program Aplikasi Informatika	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online	100%	83%	Terkendala untuk mendapatkan data terkait layanan energi, perbankan, dan sumber daya alam disebabkan kewenangan urusan tersebut berada pada instansi lain. Terkendala untuk mendapatkan data		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								terkait pengajaran karena Pemko Batam belum mempunyai layanan pengajaran berbasis elektronik		
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terselenggaranya pengelolaan nama domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kelengkapan data SIPD Kota Batam	100%	0%	Perubahan kebijakan satu data, dimana penerbitan Batam Dalam Angka merupakan kewenangan BPS		
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	1 Tahun	1 Tahun			
	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi yang berkualitas di Pemerintah Kota Batam	50%	50%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.							
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang terlaksana	18,10%	18,10%			
	Non Urusan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam ; Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun			
21	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Fasilitas pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikat halal, TDI dan standarisasi Internasional dalam produk serta mendorong pembentukan BPR dalam	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya jumlah pengurus koperasi aktif	100 orang	100 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			rangka membantu pendanaan sector UMKM							
				Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	10 bulan	10 bulan			
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro 1 (satu) daerah kabupaten kota	Meningkatnya jumlah UMKM yang di bina	72 UMKM	72 UMKM			
				<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>Jumlah Sentra UMKM yang dibina</b>	<b>1 Sentra UMKM</b>	<b>1 Sentra UMKM</b>			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemudahan, Kemudahan, Perizinan Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah UMKM yang di bina di Kota Batam	60 UMKM	150 UMKM			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengembangan UMKM	Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	400 Usaha Mikro yang di latih dan mengikuti pameran dan bazar	260 UMKM			
				Kegiatan Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Terlaksananya pelaku usaha yang mengikuti pameran, pelatihan sertifikat halal, dan pelatihan kewirausahaan	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas yang menunjang disiplin aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pemeliharaan perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1 tahun	1 tahun			
22	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Mendorong percepatan pertumbuhan investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase izin yang ditindaklanjuti	5%	5%			
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya pemetaan peluang potensi investasi daerah	1 Paket	1 Paket			
				Program Promosi	Persentase kepedulian investasi	90%	90%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Penanaman Modal</b>						
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal	2 Kali	1 Kali	Adanya penundaan rencana kegiatan pameran promosi investasi di bulan Juli 2021, dikarenakan PPKM level 3	Mengikuti pelaksanaan kegiatan pameran promosi investasi di bulan November 2021	
				<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP</b>	<b>90%</b>	<b>89,17%</b>	<b>Target tidak terealisasi dikarenakan adanya perubahan perizinan pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.</b>	<b>Disusun Perwako No. 4/2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan DPMPSTSP Kota Batam; disusun Perwako No. 5/2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kota Batam; disusun Perwako No. 6/2022 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu; disusun SK Tim Teknis Perizinan dan Nonperizinan Pada Penyelenggaraan</b>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
									Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam.	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang efektif dan efisien	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan 38 ASN di Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38 Orang	38 Orang			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
23	Kepemudaan Dan Olahraga	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam	Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan Dan Olahraga Yang Disertai Dengan Pembinaannya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terlaksananya Prestasi/ Capaian kepemudaan	40 orang	45 orang			
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap	Terlaksananya peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	45 orang	45 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota						
				Kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>	<b>Sarana Prasarana Terbangun</b>	0	0			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga terbangun	30 unit	71 unit			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				<b>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>Prestasi Kepramukaan</b>	<b>80 orang</b>	<b>80 orang</b>			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	1 Tahun	1 Tahun			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya adminstrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum	1 Tahun	1 Tahun			
24	Perpustakaan dan Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan dan arsip kepada masyarakat	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung dalam 1 tahun	9%	6,76%	Dengan adanya Pandemi Covid 19, menjadikan angka kunjungan Pemustaka ke Perpustakaan berkurang		
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Perpustakaan yang dibina dan Meningkatnya Koleksi Perpustakaan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah kunjungan ke Perpustakaan di Lingkungan Kota Batam	7 bulan	7 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>ASN Arsiparis yang dibina di setiap OPD</b>	<b>8 OPD</b>	<b>8 OPD</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya bimbingan teknis kearsipan	220 peserta	220 peserta			
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Jumlah Khasanah Arsip Statis	150 Buku	150 Buku			
				Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	44 Orang	44 Orang			
	Non Urusan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun			
25	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)	6 Event	4 Event	Pelaksanaan Kegiatan pada masa Pandemi dengan mengumpulkan masyarakat berusaha dikurangi agar dapat mencegah penularan covid-19, sehingga berdampak pada anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan	Event KSM dan MTQ Kota tetap diselenggarakan dengan pembatasan penonton dan Tarian Jogi serta Makyong dibuat dokumentasi dan ditampilkan secara virtual untuk penikmat seni	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dilapangan, contohnya Tarian Jogi dan Seni Makyong yang seharusnya dapat dibuat pagelaran/even, di ganti menjadi kegiatan dokumenter narasumber saja		
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Event dan Pagelaran Seni dan Budaya	3 event	2 event	1 event MTQ Provinsi tidak diikuti karena adanya pandemi (yang dilaksanakan KSM dan MTQ Kota)		
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Adat Budaya Daerah yang dilestarikan	3 Adat Budaya	2 Adat Budaya	Penyesuaian Anggaran	Penyesuaian Anggaran	
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terbinanya Lembaga dan Masyarakat Adat	1 tahun	1 tahun			
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan/atau yang diduga cagar	3 lokasi	3 lokasi			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>budaya yang dipelihara</b>					
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya dan/atau yang diduga cagar budaya yang dipelihara	3 lokasi	3 lokasi			
				<b>Program Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>Jumlah Museum yang dipelihara</b>	<b>1 lokasi</b>	<b>1 lokasi</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah Museum yang dipelihara	1 lokasi	1 lokasi			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Perangkat Daerah dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor					
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasana Aparatur	1 tahun	1 tahun			
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dan Terpeliharanya	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Sarana dan Prasarana Kantor					
26	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan aparatur	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi	2.200	630	Penyesuaian Anggaran		
					Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	2.000	711	Penyesuaian Anggaran		
					Jumlah tenaga kerja yang terserap/ditempatkan	20.000	11.808	Banyaknya perusahaan yang tutup/pengurangan tenaga kerja yang disebabkan pandemi covid' 19	Himbauan kepada perusahaan agar menjalankan kewajiban laporan lowongan kerja. * Mengembangkan aplikasi Karir hub lebih optimal dan praktis. * Belum ada sanksi tegas kepada perusahaan perihal penyampaian data Ak.III s.d Ak.V, lowongan dan penempatan (Kementerian mendorong Pemerintahan Kab/Kota untuk membuat kebijakan perihal tersebut.)	
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Tersedianya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	711 orang	711 orang			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					berdasarkan kluster kompetensi					
				Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya bimtek dan sertifikasi	630 orang	630 orang			
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya pengembangan kelembagaan yang berkualitas.	20 LPK, 18 Instruktur dan 18 Assesor	20 LPK, 18 Instruktur dan 18 Assesor			
			Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial	Program Hubungan Industrial	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja Per Tahun	94%	94,5%			
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya rapat LKS Tripartit	10 kali	10 kali			
	Non Urusan	Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi		Perangkat daerah					
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Dinas Tenaga Kerja	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
27	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam	Meningkatkan luas RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora	Program Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau	0.2 %	0.2 %			
					Kawasan Pemakaman yang dikelola	2 kawasan	3 Kawasan			
					Jumlah ruang terbuka hijau/ publik yang dibangun/ ditingkatkan	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)			
				Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Jumlah ruang terbuka hijau/ publik yang dibangun/ ditingkatkan	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)			

**Tabel 3.1.3 Pelaksanaan Urusan pilihan**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	20.849 Ton	84.433 Ton			
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	20.849 Ton	84.433 Ton			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%			
				Program Pengendalian Kesehatan	Meningkatnya Produksi	20.849 Ton	84.433 Ton			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Pertanian dan Peternakan</b>					
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular di Kota Batam	100%	100%			
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner di UPTD Pukeswan	700 Ekor	1.255 Ekor			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	100%			
				<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan</b>	<b>20.849 Ton</b>	<b>84.433 Ton</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian Dikota Batam	30 Kelompok	30 Kelompok			
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan Kota Batam	Menguatkan kualitas home industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan	39.804 ton	47.764,56 ton			
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang disediakan	6 unit kapal, 6 unit mesin, 77 alat penangkap ikan (89 unit kapal/mesin/alat penangkap ikan)	6 unit kapal, 6 unit mesin, 77 alat penangkap ikan (89 unit kapal/mesin/alat penangkap ikan)			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan yang dibina	1.850 nelayan	1.790 nelayan			
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan	39.804 ton	47.764,56 ton			
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang dibina	20 pembudidaya	20 pembudidaya			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Non Urusan	Dinas Perikanan Kota Batam Kota Batam	Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	12 bulan			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.2 Jt	2.651	Target tidak terealisasi karena adanya Pandemi Covid-19		
				Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara; 2. Length Of Stay (Lama Kunjungan) Target	2.1 Juta Wisatawan	2.651 Wisatawan	Target tidak terealisasi karena adanya Pandemi Covid-19		
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Terpeliharanya Sarana Dan Prasarana Objek Wisata	1 Objek Wisata	1 Objek Wisata			
				Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Pameran Atau Promosi Yang Diadakan	1 Pameran	1 Pameran			
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Lama Kunjungan	1 Tahun	1 Tahun			
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.2 Juta	2.651 kunjungan	Target tidak terealisasi karena adanya Pandemi Covid-19		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terwujudnya Pengelolaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya Di Kota Batam, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terwujudnya Pengelolaan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Dan Budaya Di Kota Batam, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain Dan Iptek	1 Tahun	1 Tahun			
4	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan yang berlaku serta revitalisasi pasar	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah PKL yang dibina	100 PKL	942 PKL/Pedagang			
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa	Terlaksananya tera/tera ulang dan pengawasan metrologi	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						
			Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Memperlancar Jalur Distribusi Kebutuhan Barang Pokok	80%	80%			
				Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya operasi pasar reguler di Kota Batam	12 Kecamatan	12 Kecamatan			
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Memperlancar Jalur Distribusi Kebutuhan Barang Pokok	80%	80%			
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan	1 Tahun	1 Tahun			
	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah sentra industri yang dibentuk	1 Sentra industri	1 Sentra industri			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			dalam rangka membantu pendanaan umkm							
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah di Kota Batam	80 pelaku usaha	145 pelaku usaha			
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya administrasi umum	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya administrasi umum	100%	100%			

Tabel 3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Melakukan dan meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya	Perencanaan pembangunan daerah.	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	65%	55%	Traget tidak terealisasikan dikarenakan: 1. Kemampuan keuangan daerah tidak sebanding dengan banyaknya usulan masyarakat pada Musrenbang. 2. Terjadinya penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19	Membuat pembatasan jumlah usulan masyarakat	
				Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	100%	100%			
				Kegiatan Analis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	65%	55%	Traget tidak terealisasikan dikarenakan: 1. Kemampuan keuangan daerah tidak sebanding dengan banyaknya usulan masyarakat pada Musrenbang. 2. Terjadinya penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19		
				Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Presentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	65%	55%	Traget tidak terealisasikan dikarenakan:		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				1. Kemampuan keuangan daerah tidak sebanding dengan banyaknya usulan masyarakat pada Musrenbang. 2. Terjadinya penurunan pendapatan karena pandemi Covid-19		
	Non Urusan	Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pemerintahan Daerah						
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
2	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan	Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP			
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Rencana Anggaran Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan Akutansi dan Laporan Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengelolaan Keuangan Daerah						
				<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Opini pemerikasaan BPK</b>	<b>WTP Opini BPK</b>	<b>WTP Opini BPK</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen penilaian pemanfaatan dan pemindah tangan Aset Pemerintah Kota Batam	1 Dokumen	1 Dokumen			
	<b>Non Urusan</b>	<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam</b>	<b>Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Efesien yang didukung Sumber Daya Manuasia, Aparatur yang memiliki Kompetensi</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Penilaian Pemanfaatan dan Pemindahtangan Aset Pemerintah Kota Batam	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2 Kali	2 Kali			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Perundang-Undangan					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Operasional	100%	100%			
	<b>Keuangan</b>	<b>Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam</b>		<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>Peningkatan PAD</b>	<b>1,7 T</b>	<b>1,09 T</b>			
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah	1,7 T	1,09 T			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Non Urusan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif dan Efesien yang didukung Sumber Daya Manuasia, Aparatur yang memiliki Kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Poko dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan	Meningkat dan Terpeliharanya	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintah					
	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Program Kepegawaian Daerah	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	56%	Formasi yang telah disetujui melalui SK Menpan 542/2021 adalah sebanyak 2.958 orang untuk tahun 2021, namun pada Desember 2021 terbit Surat Kepala BKN No. 18256/B/KS.04.01/SD/K/2021 Perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021 sehingga pelaksanaan lanjutan seleksi CPNS harus dilanjutkan pada Tahun 2022.	pengisian formasi yang belum terpenuhi pada tahun berikutnya (tahun 2022)	
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%			
				Program Pengembang	Presentase ASN yang meningkat	93%	93%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				an Sumber Daya Manusia	kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat					
				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa	Tersedianya administrasi perkantoran yang	100%%	100%%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah					
					Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah	100%	100%			
	Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Meningkatkan Pendidikan Politik, Kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan serta jumlah total calon peserta yang seharusnya. dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	100%	100%			
					Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi Pancasila dan karakter	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>kebangsaan yang dilaksanakan</b>					
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta yang bersertifikat kegiatan penguatan ideologi kebangsaan. ditindaklanjuti	100%	100%			
					Persentase rumusan kebijakan bidang penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan yang ditindaklanjuti	100%	100%			
				<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	<b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
					Persentase Peningkatan Pemahaman peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					<b>Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>					
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Rumusan Kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang diusulkan	100%	100%			
					Persentase Pemahaman peserta peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Etika serta Budaya Politik					
					Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	75%	75%			
				<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>	<b>1 Kebijakan</b>			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1). Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang diusulkan. 2). Persentase peserta Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	1). 30 rekomendasi 2). 100 %	1). 30 rekomendasi 2). 100 %			
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1). Jumlah kebijakan bidang Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya yang ditetapkan	1 Kebijakan	1 Kebijakan			
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	1. Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan Koordinasi bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dan Masyarakat yang ditindaklanjuti.					
				<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	1). <b>Persentase Potensi Konflik yang tertangani .</b> 2). <b>Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan</b>	1. 80% 2. 100%	1. 61% 2. 100%	1) Konflik yang belum tertangani/diselesaikan oleh instansi terkait		
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1). Jumlah Potensi Konflik yang terdeteksi . 2). Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi bidang Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial. 3). Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan Kewaspadaan dan Deteksi Dini	1. 15 Konflik 2. 100% 3. 75%	1. 13 Konflik 2. - 3. 65%	2). Kegiatan FORKOPIMDA belum terlaksana		
	Non Urusan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan	100 %	100 %			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Daerah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Daerah					
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi.	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang layak fungsi	1 tahun	1 tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Urusan Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif	Sekretariat Daerah Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Pemerintah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersediannya Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan BPOP KDH/WKDH	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Sekretariat Daerah Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan	100%				

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Kabupaten/ Kota	Fungsi Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penataan Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi Pemerintah Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersedianya Administrasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pencegahan Konflik Sosial dan Keagamaan</b>	0	0			
				Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Terselenggaranya Koordinasi dan Administrasi Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kewilayahan Serta Pengelolaan Perbatasan	6 Kegiatan	6 kegiatan			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Produk Hukum (Perda) dan Bantuan Hukum</b>	5 Kasus	5 Kasus			
				Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Produk Hukum (MoU) dan Bantuan Hukum</b>	<b>15 MoU</b>	<b>18 MoU</b>			
				Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	Terakomodirnya Usulan Pembangunan Dari Masyarakat Melalui Forum TSP	8 Rakor	2 Rakor	Kegiatan Rakor dianggarkan untuk 8 kali pertemuan dan terealisasi 2 kali pertemuan, dikarenakan: - Situasi pandemi Covid-19 - Kondisi Covid-19 yang berdampak pada dunia usaha		
				<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya persentase realisasi investasi</b>	<b>22.05%</b>	<b>22.05%</b>			
				Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Kota Batam	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Nilai Laporan Kinerja</b>	<b>B Penilaian Kemenpan</b>	<b>B Penilaian Kemenpan</b>			
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	1 Tahun	1 Tahun			
				<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Tersediannya Administrasi Perkantoran yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Ketentuan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	Tersediannya Laporan Bidang SDA Triwulan dan Tahunan	124 Buku	124 Buku			
	Urusan Penunjang	Sekretariat DPRD Kota Batam	Memacu terwujudnya Bandar Dunia Madani yang Berdaya saing, maju, sejahtera dan bermanfaat	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	80%	88,82%			
				Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Rancangan KUA PPAS Ranperda APBD yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Telaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan kapasitas pimpinan DPRD yang difasilitasi	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya sarana dan prasarana, administrasi keuangan dan operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1 Tahun	1 Tahun			
	Non Urusan	Sekretariat DPRD Kota Batam	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	80%	88,05%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dalam menunjang tugas	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					pokok dan fungsi Perangkat Daerah					
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sarana dan prasana administrasi perkantoran dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya sarana dan prasarana administrasi perkantoran dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya sarana dan prasarana layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Administrasi Perkantoran dalam Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas Serta Tugas dan Fungsi DPRD	1 Tahun	1 Tahun			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kota Batam	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	95%	95%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terselenggaranya pengawasan Internal	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 tahun	1 tahun			
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	62%	84%			
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	1 tahun	1 tahun			
	Non Urusan	Inspektorat Daerah Kota Batam	Melaksanakan Penguatan Kelembagaan, Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien Yang Didukung Sumber Daya Manusia Aparatur Yang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Memiliki Kompetensi							
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administarasi Perkantoran	1 tahun	1 tahun			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	1 Tahun	1 Tahun			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun			

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang meliputi peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang Kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> </ul>	Mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat Daerah, mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejala kenaikan harga pangan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut
2	Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</li> <li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan</li> </ul>	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Batam, dan memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

		Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah	
3	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
4	Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemakaman Di Tempat Pemakaman Kota Batam	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman	Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Batam telah meningkatnya kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pengguna tanah untuk tempat pemakaman maka perlu diatur berdasarkan aspek keagamaan, sosial budaya, pendidikan, keamanan dan lingkungan.
5	Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi</li> <li>• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi</li> </ul>	Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu Kota lokasi fokus penanganan Stunting di Indonesia sejak tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, sehingga diperlukan intervensi secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama (konvergensi stunting terintegrasi), mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kota Batam
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman	• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat belum terwujud sepenuhnya

	Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan • Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	
7	Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ul>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Batam dan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8	Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</li> <li>•</li> </ul>	Dalam rangka menjawab kebutuhan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi Penduduk Kota Batam yang memenuhi kriteria di masukkan kedalam DTKS akan tetapi belum terdaftar dalam DTKS dan bukan penerima bantuan Iuran Pusat dan juga bukan peserta mandiri JKN di Daerah.
9	Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	Sebagai acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan/atau optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta sebagai dasar dalam mengkoordinasikan

	Batam Tahun Anggaran 2021-2024	Keterbukaan Informasi Publik	pelaksanaan SP4N Daerah dan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman, kesatuan langkah dan tindakan seluruh Penyelenggara dalam mewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan nasional.
10	Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
		CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>Indikator Makro Ekonomi dan Sosial setidaknya meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbatas, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Disparitas antar Wilayah.</p> <p>Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada capaian kondisi makro ekonomi Kota Batam, beberapa indikator makro ekonomi mengalami penurunan yang cukup</p>	<p>1. Guna terciptanya kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) pada akhir tahun 2021, perlu dilakukan percepatan dan kelancaran pelayanan vaksinasi bagi kelompok rentan dan pelayanan publik serta pekerja ekonomi kerakyatan. Tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan pada semua aktifitas pemerintah kota batam dan masyarakat yang berpotensi besar terjadi penularan Covid-19.</p>	<p>Dinas Kesehatan sudah melaksanakan imunisasi Covid-19 pada saat ini sudah pada tahap 3 dengan sasaran adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, seperti guru, lansia dan Dinas Kesehatan dengan berkoordinasi dengan OPD lainnya telah melakukan pengawasan/ razia pelaksanaan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat umum</p>	

		<p>signifikan dari target yang ditetapkan dalam RKPD 2020.</p> <p>Namun demikian, kontraksi ekonomi pada tahun 2020 Kota Batam paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri, demikian juga dampak sosialnya dibanding daerah lainnya, yakni pengangguran terbuka yang meningkat 3,98%, namun penduduk miskin dapat ditekan bahkan kemiskinan turun sebesar 0,10% disaat daerah lainnya kemiskinan meningkat di masa Pandemi Covid-19.</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang salah satunya adalah Indeks Pendidikan mesti menjadi perhatian khusus. Akibat dampak Pandemi Covid-19 proses pembelajaran dilaksanakan dengan daring, hal ini tentu berdampak pada capaian kualitas pendidikan, dan ini berpotensi menjadi ancaman baru</p>	<p>2. Guna terciptanya percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Batam harus segera melakukan peng-identifikasi-an sektor perekonomian penyumbang PDRB yang terdampak Pandemi Covid-19, dengan 3 (tiga) kategori, yakni sangat terpuruk, terpuruk dan normal. Hal ini agar dapat dicarikan kebijakan yang tepat sasaran atau efektif. Dari data peng-identifikasi-an tersebut, pemerintah Kota Batam pada perubahan APBD 2021, segera mengambil langkah taktis dan strategis berupa kebijakan, baik regulasi maupun anggaran yang memadai, untuk: menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk, pemulihan sektor yang terpuruk, dan akselerasi sektor yang masih normal, agar perekonomian segera recovery.</p> <p>Selanjutnya, mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan cara</p>	<p>1. Pemerintah Kota Batam sedang sedang menggalakan program vaksinasi, program ini ditargetkan mampu mencegah dan/atau meminimalisasi penyebaran Covid-19, sehingga diharapkan aktivitas sosial masyarakat kembali berjalan normal, dan imbasnya perekonomian nasional bergerak cepat ke arah pertumbuhan ekonomi positif;</p> <p>2. Pemerintah Kota Batam memberikan Insentif Pajak Daerah berupa penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap;</p> <p>3. Bahwa Pemerintah Kota Batam dan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Tahun 2020 memberikan Bantuan Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 39.167 pelaku usaha dengan jumlah anggaran : Rp. 94.000.800.000 dan pada tahun 2021 akan mengusulkan kembali bantuan usaha mikro (BPUM);</p> <p>4. Pemerintah Kota Batam terus melakukan sosialisasi bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM;</p>	
--	--	---	---	--	--

		<p>bagi kualitas pendidikan di Kota Batam.</p> <p>Di masa pandemi, pendidikan seperti kekurangan asupan gizi, dan dalam jangka panjang berpotensi terjadinya “stunting pendidikan”. Sebagaimana dipahami bahwa tidak ada pendidikan yang lebih baik kecuali tatap muka di sekolah. Penanaman kejujuran, kedisiplinan, dan perilaku luhur atau akhlak mulia, tentu harus dibelajarkan lewat tata muka dan tidak melalui daring. Sekali lagi, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah kota Batam. Untuk itu, Pansus mendorong harus ada kebijakan kreatif dan inovatif agar sumber daya manusia di Kota Batam tidak ikut menurun di tengah Pandemi Covid-19.</p>	<p>menekan laju inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja.</p> <p>Dan, yang tak kalah pentingnya adalah mempercepat realisasi konsumsi pemerintah Kota Batam (Belanja APBD) dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak kembali.</p>	<p>5. Pelaksanak Bazar sembako murah,</p> <p>6. Pelaksanakan peningkatan kompetensi usaha mikro dan Industri kecil menengah di Kota Batam;</p> <p>7. Pemberian hibah Pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial karena Pandemi Covid19 pada pelaku pariwisata;</p> <p>8. Pemerintah Kota Batam berusaha uk memenuhi kebijakan travel bubble yang berusia 18 Tahun keatas, minimal 70 %;</p> <p>9. Pemerintah menghimbau dan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi prokes dalam menjalankan usahanya;</p> <p>10. Pemerintah Kota Batam menggalakan transaksi belanja non tunai melalui keris dan lainnya dalam mencegah penyebaran covid-19;</p> <p>11. Pemerintah Kota Batam melakukan MOU dengan daerah Kab. Kerinci penghasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan Batam dan kerjasama bersama swasta dalam mewujudkan pasar TPID;</p>	
--	--	---	---	--	--

				<p>12. Pemerintah Kota mempermudah akses penjualan dan pemasaran pelaku usaha mikro pada bazar, pameran dan bekerjasama dengan toko modern;</p> <p>13. Melalui Mall pelayanan mempermudah pelayanan perizinan dan investasi di Kota Batam.</p>	
			<p>3. Guna terciptanya pemulihan kualitas pendidikan dan kesehatan maka pemerintah Kota Batam perlu segera melakukan perencanaan kebijakan sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dengan pemanfaatan test Covid-19 bagi siswa setiap hari yang mudah dan cepat, dengan mempergunakan Genose</p>	<p>Dalam merumuskan kebijakan sekolah tatap muka Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kota Batam. Sehingga penetapan pelaksanaan sekolah tatap muka tetap mendapatkan masukan dan pertimbangan SATGAS.</p> <p>Dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia</p> <p>Nomor 03/KB/2020</p> <p>Nomor 612 TAHUN 2020</p>	

				<p>Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020</p> <p>Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>4. Melakukan reformasi pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kebijakan promotive dan preventive dibanding curative. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data tingkat kematian tinggi selama Pandemi Covid-19 adalah disebabkan comorbid (penyakit penyerta). Maknanya, penyakit tidak menular yang dimulai dari meja makan seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, stroke dan lainnya, dapat dicegah dengan program dan kegiatan yang orientasinya untuk membentuk pola hidup sehat.</p>	<p>Untuk mengendalikan dan mencegah penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, stroke, jantung, obesitas dll) yang merupakan komorbid penyebab kematian Covid-19, maka sangat diperlukan skrining/ deteksi dini PTM, dan pelayanan terpadu PTM, sehingga masyarakat yang masih sehat bisa dicegah sedangkan masyarakat penyandang PTM (yang sudah menderita PTM) dapat terkontrol dengan edukasi dan minum obat teratur. Dalam hal ini Dinkes Batam sudah melakukan berbagai upaya baik dalam secara langsung melalui upaya deteksi dini dan secara tidak langsung dengan melibatkan lintas sektor dan tokoh masyarakat.</p>	
<b>EVALUASI KINERJA BERDASARKAN MISI DAERAH</b>					
		<p>Sebagaimana yang disajikan dalam dokumen LKPJ 2020, bahwa pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Disamping itu,</p>	<p>Kepada Bapelitbangda sebagai OPD atau leading sector atas penyusunan dokumen LKPJ 2020 bertanggungjawab dan kepada Walikota agar memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini, kemudian</p>	<p>Dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2020 tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan memang tidak dapat mewujudkan 100 persen pencapaian visi dan misi sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Dalam</p>	

		LKPJ 2020 juga disusun berdasarkan RPJMD kota batam tahun 2016 – 2021, dimana LKPJ 2020 merupakan tahun tahapan akhir RPJMD untuk mencapai visi dan misi daerah.	memastikan agar tahun depan tidak terjadi kembali.	pelaksanaan program dan kegiatan Kota Batam pada Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kendala terutama terkait pelaksanaan <i>refocusing</i> dan <i>realokasi</i> anggaran untuk penanggulangan dampak <i>Covid 19</i> .  Untuk tahun 2021 Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan dan menginventarisir permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan yang masih belum tercapai pada tahun 2020 sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir/tahun transisi.	
		Dari pengkajian data pada Bab III dokumen LKPJ 2020, ternyata masih sama dengan LKPJ tahun sebelumnya, yakni tidak seluruh indikator sasaran yang targetnya telah ditetapkan dalam RPJMD kota batam, dilaporkan hasil capaiannya dalam dokumen LKPJ 2020. Dari 76 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD kota batam yang dilaporkan dalam LKPJ 2020 hanya 59 indikator, sedangkan sisanya 17 indikator tidak dilaporkan capaian kerjanya. Pemerintah kota batam pada tahun 2020 berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja	1. Meminta agar Walikota menginstruksikan kepada Bapelitbangda untuk melakukan evaluasi bersama dengan OPD-OPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator sasaran pembangunan yang pada tahun 2020 gagal mencapai target RPJMD tersebut.  Harus diidentifikasi dengan baik masalah, hambatan dan penyebabnya sehingga banyak indikator sasaran pembangunan yang menjadi	Bapelitbangda telah melakukan evaluasi dan menyusun Perubahan RPJMD menyesuaikan dengan kondisi Kota Batam. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batam melalui Bapelitbangda telah melakukan penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 salah satunya berdasarkan reuiu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada evaluasi SAKIP Kota Batam terkait tidak tepatnya indikator sasaran dan program yang masih berorientasi kepada <i>output</i> bukan <i>outcome</i> . Dan pada tahun 2019 sudah dilakukan penyampaian Ranperda Perubahan	-Ranperda Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021; - Kronologis Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021

		<p>sasaran misi pertama dan kelima dengan prestasi sedang (56% dan 60% target indikator sasaran tercapai).</p>	<p>target RPJMD tidak tercapai atau gagal. Dan hasil evaluasi serta indentifikasinya dilaporkan kepada DPRD Kota Batam pada kesempatan pertama.</p>	<p>RPJMD 2016-2021, namun Perubahan RPJMD tidak sampai pada pengesahan Perda. Sehingga permasalahan, hambatan dan penyebab banyaknya indikator sasaran dan program tidak dapat tercapai hingga akhir periode RPJMD tidak dapat ditindaklanjuti dan hal ini yang menyebabkan rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan Kota Batam.</p>	
--	--	--	---	---	--

		<p>Selanjutnya, berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja sasaran misi kedua, ketiga, keempat dan keenam dengan prestasi rendah (target hanya tercapai dengan besaran 39%, 37%, 20% dan 43% dari target yang ditetapkan RPJMD).</p> <p>Jika dinilai secara agregat keseluruhan dari 76 indikator sasaran untuk tahun 2020 hanya sebesar 41% target indikator kinerja sasaran berhasil dicapai. Untuk tahun tahapan akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021 (tahun percepatan pembangunan), capaian sebesar 41% tersebut tentu sangat rendah, walaupun Pandemi Covid-19 dapat menjadi alibi atas kinerja yang rendah tersebut.</p>	<p>2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD kota batam tahun 2016 – 2021, sekaligus tahun transisi dengan RPJMD yang baru tahun 2021 – 2026, untuk itu perencanaan pembangunan tahun perubahan 2021 harus memperhatikan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya.</p> <p>Keadaan darurat kesehatan sebagai dampak Pandemi Covid-19 harus menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat sampai terjadinya kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity). Dengan demikian, arah kebijakan APBD Perubahan 2021 dapat menjadi solusi taktis atas dampak Pandemi Covid-19, sehingga perekonomian Kota Batam dapat segera pulih, pelayanan umum menjadi normal kembali dan</p>	<p>Dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Bapelitbangda setiap tahunnya melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Kota Batam yang dilaporkan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, dokumen ini juga dijadikan bahan fasilitasi RKPD Kota Batam oleh Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya hasil evaluasi tahun sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam penyusunan perencanaan tahunan untuk tahun selanjutnya.</p>	<p>-Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2020</p>
--	--	---	---	---	--

			keamanan serta ketertiban masyarakat terjamin.		
--	--	--	--	--	--

**EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH**

		<p>Perlu diketahui bersama, SILPA indikatif (<i>unaudited</i> BPK) tahun berjalan tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2020, sehingga Pansus harus menghitung sendiri berapa besaran SILPA sebelum audit BPK tahun 2020. Dan ini kembali mengulang pada LKPJ tahun lalu. Hal ini tentu patut disayangkan dan mengurangi derajat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020.</p> <p>Pertanyaannya: Kenapa besaran SILPA Indikatif selalu tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ kepada DPRD?</p>	<p>1. Dalam melakukan penggalan potensi pendapatan daerah harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang saat ini kurang menguntungkan. Jangan sampai menimbulkan gejala di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di masa sulit sekarang ini.</p>	<p>Salah satu langkah yang dilakukan BPPRD Kota Batam dalam penggalan potensi pendapatan daerah serta dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dimasa pandemi yaitu dengan membuat kebijakan Insentif Pajak Daerah berupa penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: Tahap I : 16 Maret 2020 s.d 30 Juni 2020 Tahap II : 1 Juli 2020 s.d 30 September 2020 sehingga dengan kebijakan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.</p>	
			<p>2. Sebelum terciptanya <i>herd immunity</i>, dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah hendaknya Pemerintah Kota Batam dapat sejalan dengan kebijakan nasional, seperti pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah serta berbagai bentuk kemudahan</p>	<p>Dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam telah sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu dengan membuat Kebijakan Insentif Pajak Daerah dalam rangka memberikan keringanan kepada dunia usaha berupa : A. Penghapusan Denda Administrasi Pajak Lainnya berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu :</p>	

			<p>kepada dunia usaha dan masyarakat yang menjadi obyek PAD, dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini.</p>	<p>Tahap I : 15 April 2020 s.d 30 Juni 2020 Tahap II : 21 September 2020 s.d 31 Desember 2020</p> <p>B. Penundaan Pembayaran Pajak Daerah untuk jenis Pajak Self Assessment (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) dan untuk jenis Pajak Official Assessment (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu :</p> <p>Tahap I : berlaku selama 3 Bulan terhitung dari masa pajak Maret 2020 s.d masa pajak Mei 2020 Tahap II : berlaku selama 3 Bulan terhitung dari masa pajak Agustus 2020 s.d masa pajak Oktober 2020.</p>	
			<p>3. Peningkatan dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha serta menekan potensi kebocoran dalam pengumpulan PAD.</p>	<p>Beberapa upaya guna meningkatkan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah khususnya Pajak Daerah serta untuk menekan potensi kebocoran dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah antara lain :</p> <p>1. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pelayanan pajak antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disdukcapil Kota Batam terkait Pemanfaatan NIK untuk Pelayanan Pajak Daerah.</li> <li>- DJPK Kanwil Provinsi Kepulauan Riau terkait Optimalisasi Peningkatan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.</li> <li>- BPN terkait Integrasi data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB</li> </ul>	

				<p>2. Pelaksanaan transaksi Non Tunai pembayaran pajak melalui e-billing serta Host to host untuk pembayaran PBB-P2 melalui e-commerce (Gopay, Link aja, Tokopedia, Bukalapak) dan Gerai (Indomaret/Alfamart).</p> <p>3. Kebijakan Insentif Pajak Daerah dalam rangka memberikan keringanan kepada dunia usaha dan masyarakat.</p>	
			<p>4. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi merebut Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat dengan dukungan program dan kegiatan yang berkualitas serta didukung anggaran yang cukup, sehingga DID dapat menjadi sumber pendapatan kreatif daerah, yakni memperoleh tambahan dana pembangunan melalui peningkatan prestasi.</p>	<p>1. Pada tanggal 16 Maret 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyiapan data Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2022, dengan kesimpulan rapat perlu diterbitkan SK Kepala Daerah.</p> <p>2. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 159/HK/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Pembentukan TIM Penguatan Data dalam rangka pencapaian indikator pada Dana Insentif Daerah di Kota Batam.</p> <p>3. Pada tanggal 27 April 2021 dilaksanakan Rapat Kerja TIM Penguatan Data dalam rangka pencapaian indikator pada Dana Insentif Daerah (DID) dengan kesimpulan adanya indikator data yang belum terupdate dengan instansi vertikal.</p> <p>4. Direncanakan akan dilaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait indikator yang belum terupdate.</p>	

			<p>5. Arah kebijakan belanja daerah tahun Perubahan APBD 2021 direkomendasikan agar difokuskan pada mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat (percepatan vaksinasi massal) dan reformasi pelayanan kesehatan, normalisasi pelayanan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan akibat tidak adanya tatap muka selama 3 semester, mempercepat pemulihan ekonomi dan pemantapan ketahanan pangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta normalisasi pelayanan umum kepada masyarakat.</p>	<p>Pemerintah Kota Batam telah melakukan upaya untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat (percepatan vaksinasi massal) dan reformasi pelayanan kesehatan pada kebijakan belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan refocusing belanja kesehatan untuk vaksinasi massal yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2021, Selanjutnya terkait normalisasi pelayanan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan akibat tidak adanya tatap muka selama 3 semester, percepatan pemulihan ekonomi dan pemantapan ketahanan pangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta normalisasi pelayanan umum kepada masyarakat telah dtuangkan dalam kebijakan belanja daerah pada APBD Tahun 2021.</p>	
			<p>6. Kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan Covid-19, dan selalu melakukan</p>	<p>Terkait dengan kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protocol kesehatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan COVID-19 dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengtasi Pandemi Covid-</p>	

			<p>sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam mengatasi Pandemi Covid -19.</p>	<p>19, Pemerintah Kota Batam telah melakukan refocusing anggaran pada perubahan Peraturan Walikota Batam tentang penjabaran APBD Tahun 2021 untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Masyarakat oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di 64 Kelurahan.</p>	
			<p>7. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.</p> <p>Perbaiki manajemen keuangan program dan kegiatan agar serapan anggaran tahun 2021 meningkat sehingga SILPA tahun berjalan tidak kembali semakin membesar setiap tahunnya.</p> <p>Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum (gagal) dilaksanakan secara maksimal (akibat Pandemi Covid-19) dalam</p>	<p>1. Surat Sekretaris Daerah Nomor 62/BPKAD-BEND/II/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perihal Percepatan Realisasi APBD TA. 2021 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.</p> <p>- Bahwa dikarenakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri masih belum berjalan lancar diminta kepada Setiap SKPD agar melakukan percepatan penyerapan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 secara manual (excel) dengan berpedoman dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 83/BPKAD-BEND/IV/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Penggunaan Aplikasi</p>	

			<p>mendukung program unggulan daerah.</p>	<p>Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan tindak lanjut atas Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor : 903/235/Keuda tentang Tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021.</li> <li>- Pemerintah Kota Batam daklam rangka mempercepat realisasi APBD TA. 2021 melakukan proses penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan SKPD tetap melakukan rekam dalam SIPD.</li> <li>3. Melakukan Online system yang terintegrasi antara BPKAD, SKPD dan Bank Mitra.</li> <li>4. Melakukan pematangan perencanaan penggunaan Digital Signature dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka proses pengajuan pencairan.</li> <li>5. Meningkatkan penggunaan Cash Management System (CMS) sehingga memudahkan bendahara SKPD dalam melakukan pembayaran/pendebetn rekening bendahara.</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

			<p>8. Terus meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selalu menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam <i>website</i> Pemerintah Daerah Kota Batam, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.</p>	<p>Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik maka Pemerintah Kota Batam telah menyediakan layanan data/dokumen APBD kepada masyarakat secara berkala yang dapat diakses pada link <a href="https://bpkad.batam.go.id">https://bpkad.batam.go.id</a></p>	
--	--	--	---	---	--

			<p>9. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. Meningkatkan mutu proses dan output reses DPRD dan forum RKPD agar perencanaan daerah komprehensif dan aspiratif, sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD.</p>	<p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengikuti prioritas pembangunan di tahun berikutnya dan evaluasi pada tahun berjalan. Hasil evaluasi pasca pelaksanaan musrenbang menjadi bahan dalam melakukan perbaikan dalam menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan tahunan dan musrenbang tahun selanjutnya.</p>	
<b>EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH</b>					
1	INSPEKTORAT	<p>Sebagai OPD yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Batam, Pansus melihat pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kurang optimal. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Banyaknya OPD di Kota Batam tidak sebanding</p>	<p>1. Perlunya peningkatan dan penambahan SDM baik dari segi kualitas juga kuantitas di lingkungan Inspektorat Kota Batam.</p>	<p>1. Terhadap rekomendasi pansus tentang perlunya penambahan SDM baik dari segi kuantitas juga peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kota Batam telah melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta mengusulkan kepada Walikota Batam melalui surat Nomor.217/INS-BTM/VI/2020 tentang Pemenuhan ASN Inspektorat Daerah</p>	

		dengan jumlah tenaga Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.		Kota Batam. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor.542 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebanyak 24 orang dengan rincian sbb: untuk JFA 20 orang dan Jabatan Pelaksana 4 orang. Untuk peningkatan kualitas SDM, telah dan akan terus mengikutsertakan ASN mengikuti Diklat Fungsional dan dan Diklat Tekhnis/Substansi setiap tahunnya sesuai kebutuhan.	
			2. Dalam menyusun program dan kegiatannya OPD ini lebih inovatif sehingga dapat menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang makin dinamis. Jangan terjebak dengan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas semata.	2. Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menyusun program dan kegiatan selalu mengacu dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta peraturan kementerian dalam negeri tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang setiap tahun selalu dijadikan pedoman untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	

2	BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPELITBANGDA)	Sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan dan leading sector dalam penyusunan dan penyajian data dokumen LKPJ tahun 2020, biarpun sudah ada langkah perbaikan namun dengan masih adanya ketidaksesuaian antara data yang disajikan dalam dokumen LKPJ tahun 2020 dengan yang disampaikan oleh OPD-OPD, termasuk tidak dilaporkannya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam dokumen LKPJ tahun 2020.	1. Meminta agar bapelitbangda mengevaluasi OPD-OPD berkenaan dengan penyajian data dan memastikan bahwa berkaitan dengan data pada LKPJ tahun depan tidak bermasalah kembali	1. Akan dilakukan evaluasi tim penyusun LKPJ Pemerintah Kota Batam bersama OPD-OPD terkait guna mengantisipasi dan memperbaiki dokumen LKPJ.	
		Terlalu lamanya Kepala Bapelitbangda menduduki jabatan tersebut, disamping melanggar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen ASN, juga berdasarkan hasil konsultasi Pansus ke Kemendagri bahwa praktik seperti ini akan mengganggu proses regenerasi atau kaderisasi di tubuh ASN.	2. Terkait potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan berkenaan terlalu lamanya kepala bapelitbangda menduduki jabatan tersebut, agar dapat menjadi perhatian Walikota dan meminta tindaklanjut dari permasalahan ini untuk dapat disampaikan ke DPRD pada kesempatan pertama. Selanjutnya, Pansus sebagaimana hasil konsultasi ke Kemendagri akan	2. Terkait tentang jabatan kepala Bapelitbangda merupakan kewenangan prerogatif Walikota Batam, Sepanjang memenuhi kriteria dan melalui proses seleksi jabatan sehingga bukan kewenangan Bapelitbangda untuk menentukan jabatan eselon II.	

			melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur selaku pembina Pemerintah Daerah		
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	<p>OPD ini mempunyai tugas pokok manajemen pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam, mulai dari pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan SDM, serta pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Dari sisi SDM perlu dilakukan penguatan dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat lebih optimal dalam pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam.</p> <p>Pengalokasian anggaran pada OPD ini juga mesti sebanding dengan beban kerja, terutama dengan kebutuhan SDM yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui diklat. Kecilnya alokasi anggaran mengakibatkan tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Terlebih, adanya kebijakan bahwa peningkatan kualitas SDM hanya melalui satu pintu yakni di OPD ini.</p>	1. Perlunya penambahan anggaran kepada BKPSDM khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam.	<p>Terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM perlu disampaikan bahwa Penyelenggaraan Diklat baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan pola pengiriman peserta Diklat membutuhkan anggaran yang cukup besar yang saat ini anggarannya belum dapat dipenuhi secara optimal sebagaimana mestinya.</p> <p>Belum terpenuhinya anggaran Diklat tersebut tentu saja terkait kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas yang semakin diperburuk dengan adanya pandemi covid 19 saat ini. Pandemi covid 19 menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap capaian APBD Kota Batam sehingga pada akhirnya untuk mengatasi defisit anggaran maka semua program/kegiatan mengalami refocusing anggaran termasuk anggaran berkenaan Diklat SDM.</p>	Terlampir bukti salinan Job Fit, Profil Kompetensi dan Rekomendasi KASN

				<p>Namun demikian mengingat pentingnya kualitas SDM yang handal sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka kedepannya Pemerintah Kota Batam akan berupaya untuk memperhatikan pemenuhan anggaran terkait Pendidikan dan Pelatihan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang saat ini anggaran dan penyelenggaraannya berada di BKPSDM Kota Batam, tentu saja tetap dengan mengacu kepada kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</p>	
			<p>2. Dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Pansus LKPJ 2019, terkait pimpinan OPD yang telah lama menjabat (puluhan tahun) pada suatu OPD, Pansus kembali merekomendasikan agar dapat diganti, sehingga terjadi regenerasi, disamping itu juga bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen ASN, tepatnya pasal 133</p>	<p>Terkait rekomendasi Pansus berkenaan penggantian pimpinan OPD yang sudah puluhan tahun menjabat, perlu disampaikan bahwa sesuai Pasal 133 ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa Kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dapat diperpanjang untuk menduduki jabatan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencapaian Kinerja;</li> <li>b. Kesesuaian Kompetensi;</li> <li>c. Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK;</li> <li>d. Rekomendasi KASN.</li> </ol> <p>Berdasarkan kriteria di atas, Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan evaluasi kepada seluruh kepala OPD dengan</p>	

				<p>melaksanakan job fit pada tahun 2016 dengan hasil sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil tersebut maka Kepala OPD yang masih memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diperpanjang masa jabatannya pada OPD tersebut maka akan didudukkan kembali pada jabatan Kepala OPD yang sama, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan digantikan oleh pejabat baru. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa terkait adanya Kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun sudah dilakukan proses evaluasi dengan mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>	
			3. Agar BKPSDM membuat kajian dan hasil kajiannya disampaikan ke DPRD pada kesempatan pertama	Dokumen Terlampir	
4	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BP2RD)	Pandemi Covid-19 yang melanda Kota Batam membuat BP2RD sebagai OPD penghasil bagi pendapatan asli daerah harus bekerja keras agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan.	1. Perlunya penguatan dalam pengelolaan parkir tepi jalan dikarenakan potensi kebocoran yang cukup besar.	Pengelolaan parkir tepi jalan merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Terkait hal tersebut BPPRD Kota Batam selaku koordinator pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selalu berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain dengan melakukan rapat evaluasi pendapatan pajak dan retribusi	

		Apresiasi yang tinggi Pansus berikan kepada BP2RD, walau target pendapatan daerah tahun 2020 tidak tercapai, namun dengan langkah dan kebijakan yang tepat, dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-19 tidak begitu signifikan menggerus pendapatan daerah Kota Batam, yang mana disaat yang bersamaan di daerah lain mengalami kontraksi perekonomian yang sangat luar biasa.		daerah secara berkala dengan OPD penghasil.	
			2. Perlu disegerakan pemasangan tapping box pada sejumlah wajib pajak guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan memperkecil kebocoran.	BPPRD Kota Batam selalu berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri selaku bank mitra dalam hal kerjasama pengadaan alat perekaman data transaksi pembayaran (tapping box). Saat ini jumlah tapping box yang telah terpasang sebanyak 525 unit dan pada tahun 2021 BPPRD Kota Batam telah menyurati Bank Riau Kepri dengan mengajukan usulan untuk penambahan alat tapping box sebanyak kurang lebih 100 unit.	
			3. Agar kebocoran sejumlah obyek pajak dan retribusi daerah dapat ditekan, maka perlu dilakukan audit oleh BPKP.	Kami menyambut baik adanya rekomendasi terkait audit oleh BPKP guna mencegah kebocoran pada objek pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatkan transparansi dalam	

			Disamping rekomendasi diatas, ada sejumlah rekomendasi yang terkait dengan BP2RD, tepatnya rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah.	pengelolaan pendapatan pajak daerah. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dalam optimalisasi pajak daerah.	
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan dan aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam laporan kinerja telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Pansus mengapresiasi atas kinerja tersebut.	<p>1. Dalam hal kebijakan refocussing anggaran akibat Pandemi Covid-19 tidak melakukannya dengan pukul rata kepada semua OPD. Namun melalui kajian yang baik, sehingga didapatkan mana program dan kegiatan yang tidak perlu dan kurang penting dari masing-masing OPD yang dapat dilakukan refocussing.</p> <p>Dengan kebijakan refocussing berbasis data dan kajian tersebut, diharapkan kinerja dari masing-masing OPD masih dapat dioptimalkan.</p>	<p>1. Pemerintah Kota Batam melalui BPKAD mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami atas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah berkinerja dengan baik.</p> <p>2. Terkait dengan pelaksanaan refocussing tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 atas APBD Kota Batam dapat dijelaskan bahwa refocussing yang dilakukan telah mempedomani ketentuan:</p> <p>a. Pasal 4 Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran</p>	

				pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.	
			Disamping itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pansus juga memberikan rekomendasi yang disampaikan di bagian evaluasi kinerja keuangan daerah diatas.	b. Lampiran Inmendagri No 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, diantaranya dari hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya.	
				c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Keuangan R.I Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disesase 2019 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian	

				<p>nasional, yang menyatakan bahwa rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;</li> <li>2. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;</li> <li>3. Cetak dan penggandaan;</li> <li>4. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;</li> <li>5. Pemeliharaan;</li> <li>6. Perawatan kendaraan bermotor;</li> <li>7. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;</li> <li>8. Sewa sarana mobilitas;</li> <li>9. Sewa alat berat;</li> <li>10. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;</li> <li>11. Jasa konsultasi;</li> <li>12. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;</li> <li>13. Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;</li> <li>14. Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau</li> <li>15. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				(focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.	
				Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk: 1. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional; 2. Pengadaan mesin dan alat berat; 3. Pengadaan tanah; 4. Renovasi ruangan/gedung, meubelier, dan perlengkapan perkantoran; 5. Pembangunan gedung baru; dan/atau 6. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP)	Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perizinan usaha dan investasi, Dinas PM-PTSP semestinya dapat lebih inovatif dalam menyusun program dan kegiatan, terlebih dalam kondisi Pandemi Covid-19.  OPD ini juga perlu membangun sistem yang terintegrasi dengan beberapa OPD lainnya, yang terkait dengan perizinan, baik izin mendirikan bangunan (IMB) maupun	1. Membuat terobosan program dan kegiatan dalam rangka menarik investasi di Kota Batam.	Terobosan yang dilakukan oleh DPMPSTSP Kota Batam dalam rangka menarik investasi di Kota Batam di tahun 2021, yakni dengan menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), guna memberikan informasi mengenai potensi investasi daerah kepada investor dan melakukan promosi investasi melalui media sosial.	

		perizinan lainnya. Semisal, tidak sedikit rumah di Kota Batam yang sudah dilakukan renovasi, namun tidak melapor sehingga IMB masih mempergunakan IMB yang lama. Bila potensi ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pendapatan daerah yang cukup signifikan. Dan ini dapat terjawab dengan membangun sistem terintegrasi dengan beberapa OPD dan/atau instansi yang berkaitan.			
			2. Membangun sistem terintegrasi dengan berbagai OPD dan instansi terkait dalam kaitannya dengan perizinan.	DPMPTSP Kota Batam telah membangun sistem terinterasi dengan BP2RD terkait dengan perizinan online, yakni data PBB yang tidak valid tidak dapat melanjutkan proses perizinan online.	
			3. Mengoptimalkan gedung milik Pemerintah Kota Batam dan tidak melakukan sewa ruangan kembali yang nilai sewanya sangat besar yakni 5,8 miliar per tahun dan hingga saat ini telah mencapai angka sekitar 22 Miliar (sejak 2017).	DPMPTSP Kota Batam telah melakukan upaya dalam rangka memanfaatkan gedung milik Pemerintah Kota Batam, dengan adanya surat permohonan inventarisasi kebutuhan lahan di tahun 2020 Nomor : 040/DPMPTSP.01/02/2020 tanggal 23 Februari 2020 dan tahun 2021 Nomor: 198/DPMPTSP.01/03/2021 tanggal 26 Maret 2021.	

7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<p>Tahun 2020 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 melanda tidak hanya dunia namun juga Indonesia. sebagai salah satu OPD yang mendapat anggaran besar akibat Pandemi Covid-19, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mendapatkan tugas berat dan mulia yakni menyelenggarakan bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 disamping juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dinas sendiri.</p> <p>Berdasarkan penelusuran dan hasil rapat yang telah dilakukan, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, tidak bersumber dari data yang valid. Hal ini terbukti bahwa tidak sinkronnya data yang diberikan oleh dinas dengan dokumen LKPJ 2020 yang merupakan dokumen pijakan yang digunakan dalam pembahasan di Pansus.</p>	1. Perlu membuat sebuah sistem yang terintegrasi dengan melibatkan tidak hanya instansi vertikal namun juga horizontal dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Kota Batam khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat pra sejahtera.	Langkah OPD Dinsos adalah membangun sistem Aplikasi yang terintegrasi secara Online di setiap Kelurahan.data tersebut setelah dilakukan Musyawarah Kelurahan (MusKel) selanjutnya di verivikasi oleh Tim pencacah di setiap kelurahan. kemudian data tersebut di import ke Pusdatin Kemensos (SIKS-NG).	
---	--	--	--	---	--

		<p>Selain itu, dikarenakan tidak sinkronnya data tersebut membuat penyelenggaraan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 menjadi tumpang tindih pada tataran kecamatan dan kelurahan.</p> <p>Dengan adanya refocusing anggaran yang terjadi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan tidak tercapainya indikator, baik kinerja maupun keuangan yang telah termaktub dan terencana pada rencana strategis dan rencana kerja dinas, dan hal ini berpengaruh langsung pada pencapaian RPJMD Kota Batam 2016-2021.</p> <p>Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Batam bagi masyarakat pra sejahtera, sampai dengan saat ini belum valid dan pasti. Koordinasi antara tim pencacah di tingkat kelurahan dengan lurah dan camat tidak terjalin baik. Selain itu, keterbatasan jumlah dari tim pencacah membuat verifikasi dan</p>			
--	--	---	--	--	--

		validasi DTKS tidak berjalan maksimal.			
			2. Peningkatan kualitas SDM di dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan <i>right man in the right place</i> .	Untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dimaksud sudah terpadu di OPD BKPSDM (Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai)	
			3. Meminta kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pembinaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di OPD ini, dan hasilnya dapat dilaporkan ke DPRD pada kesempatan pertama	3. Inspektorat Daerah Kota telah melakukan pembinaan berupa consulting dan rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kota Batam juga telah melakukan pendampingan dalam bentuk monitoring agar penyelenggaraan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.	
8	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19, terdapat beberapa langkah dan kebijakan strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, antara lain: melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di bidang perdagangan dan perindustrian; menerapkan pasar online; melakukan jaring pengaman sosial; bekerjasama dengan distributor sembako memberikan sembako kepada	1. Terkait pemberian sembako gratis kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebagai bagian dari kegiatan jaring pengaman sosial yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat, Disperindag perlu menjalin sinergitas dan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, kecamatan dan kelurahan	1. Apresiasi Pansus LKPJ DPRD Kota Batam terkait kebijakan strategis yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag) Kota Batam dalam menghadapi dampak pandemi Covid19 kami haturkan terima kasih, semoga senantiasa menjadi mitra kerja yang terus bersinergi dan bersifat membangun. Begitu juga masukan yang diberikan melalui rekomendasi terkait data penerima sembako gratis yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020.	

	<p>masyarakat yang terpapar Covid-19; himbauan kepada para pengusaha untuk tidak melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok; membuat surat kepada bea cukai agar IKM dapat mendapatkan bahan baku dengan mudah; melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DID (dana insentif daerah); dan bekerjasama dengan Pertamina dan BRI dalam penyaluran BBM bersubsidi.</p> <p>Langkah dan kebijakan strategis tersebut, Pansus berikan apresiasi mengingat masa Pandemi merupakan masa yang sulit khususnya bagi sektor perindustrian dan perdagangan.</p>	<p>dalam memvalidasi data masyarakat pra sejahtera (masyarakat miskin) agar tumpang tindih data dapat teratasi dengan baik.</p>	<p>Dalam hal ini kami sangat sepatutnya dengan Pansus bahwa kedepan terkait kegiatan sembako gratis untuk data penerima sembako gratis harus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk Kecamatan dan Kelurahan. Namun perlu kami laporkan kembali kepada Pansus bahwa kegiatan sembako gratis yang Dinas Perindag laksanakan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut merupakan relokasi kegiatan dan anggaran yang semula merupakan sembako murah (bersubsidi) menjadi sembako gratis, dikarenakan status darurat pandemi Covid19 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia (terlepas dan berbeda dengan sembako gratis yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), sehingga data penerima sudah Dinas Perindag terima dari Kelurahan dan Kecamatan paralel saat proses persiapan pelaksanaan sembako murah.</p>	
		<p>2. Terkait kelangkaan BBM yang terjadi setiap tahun, walau hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,</p>	<p>2. Dengan ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya termaktub hal-hal yang menjadi pembagian urusan antara</p>	

			<p>Disperindag hendaknya sudah menyiapkan langkah strategis sebagai antisipasi dari kelangkaan BBM. Kejadian yang berulang seperti ini sudah cukup membuat dinas belajar dalam mengatasi permasalahan ini.</p>	<p>Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perindag Kota Batam harus mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan BUMN/BUMD termasuk dengan PT. Pertamina terkait ketersediaan pasokan BBM dan LPG untuk Kota Batam. Setiap tahunnya Dinas Perindag senantiasa menyampaikan surat penambahan kuota BBM dan LPG kepada PT. Pertamina dan ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi. Besar harapan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi memberikan atensi yang diharapkan dan dibutuhkan Kota Batam dengan pertimbangan peningkatan penduduk dan menjadi mayoritas penduduk terbesar di Provinsi Kepri.</p>	
			<p>3. Disperindag Kota Batam harus segera melakukan tera ulang terkait meteran air dan meteran listrik di perumahan-perumahan. Hal ini dikarenakan sudah cukup lama tidak dilakukan tera, sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, disamping dapat menjadi</p>	<p>3. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang tertib niaga, tertib ukur, kemetrolagian dan perlindungan konsumen, serta menghitung prognosis pendapatan, Dinas Perindag Kota Batam sudah beberapa kali mengundang rapat dan menyampaikan surat terkait meteran air dan meteran listrik kepada perusahaan pengelola air dan listrik di Kota Batam. PT. PLN Batam bersedia untuk dilakukan tera/ tera ulang meteran dan sudah</p>	

			potensi pendapatan daerah Kota Batam.	menyiapkan perhitungan untuk tera/ tera ulang, namun karena keterbatasan dana maka kegiatan dilakukan bertahap. Sedangkan perusahaan air Kota Batam yang saat itu masih dikelola PT. ATB merespon dengan cakupan pelayanan yang luas, maka proses penggantian semua meteran yang kadaluarsa sedang dilakukan dan memerlukan waktu untuk menyelesaikan penggantian semuanya, namun dengan berubahnya pengelola air di Kota Batam menjadi PT. Moya, maka hal yang sama kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada PT. ATB.	
9	DINAS PENDIDIKAN	Sebagai OPD dengan pengguna anggaran terbesar yakni 20% dari APBD Kota Batam dan sebagai OPD penyelenggara urusan pemerintahan dasar, Dinas Pendidikan juga terkena dampak dari Pandemi Covid-19, banyak program kegiatan yang difokusing. Selain itu, pelaksanaan sekolah daring, gejala PPDB setiap tahunnya, keterbatasan jumlah guru, kesejahteraan tenaga kependidikan, tunda bayar, dan berbagai masalah	1. Dinas Pendidikan perlu membuat sebuah perencanaan yang matang untuk setiap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.	Dinas Pendidikan Kota Batam menyusun perencanaan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Batam yang merupakan penerjemahan dari visi misi Walikota terpilih yang diuraikan dalam dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan. Penyusunan program dan kegiatan prioritas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan. Untuk permasalahan tunda bayar, kebijakan Dinas Pendidikan di tahun 2021 tidak ada kegiatan pembayaran pekerjaan	

		lainnya menambah sejumlah masalah dan catatan atas kinerja dari Dinas Pendidikan.		yang ditundabayarkan dari pekerjaan tahun 2020. Hal ini dikarenakan telah dilakukan refocusing anggaran. Untuk tahun 2021, penyusunan perencanaan berdasarkan anggaran yang tersedia. Ketika ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan dikarenakan refocusing. Kebijakan Dinas Pendidikan tidak melaksanakan kegiatan tersebut.	
			2. Tidak hanya guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan seyogyanya meningkatkan kualitas tenaga teknis bidang perencanaan agar berbagai permasalahan yang ada tidak selalu terjadi menjadi pengulangan.	a. Untuk permasalahan ketersediaan Pendidik di satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan menyusun analisa kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Batam dalam pemenuhan kebutuhan Pendidik. Kebijakan yang diambil adalah dengan mengadakan penerimaan ASN melalui P3K.  b. Dinas Pendidikan merencanakan melakukan pengusulan Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani bidang Perencanaan ke BKPSDM Kota Batam, baik segi kualitas maupun kuantitas SDM.	
			3. Dinas Pendidikan perlu segera merencanakan	Dalam merumuskan kebijakan sekolah tatap muka Pemerintah Kota Batam	Surat Dinas Pendidikan No.469/419.5/DISDIK/II/

			<p>kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar kualitas pendidikan di Kota Batam dapat terjaga dengan baik.</p>	<p>melalui Dinas Pendidikan Kota Batam berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kota Batam. Sehingga penetapan pelaksanaan sekolah tatap muka tetap mendapatkan masukan dan pertimbangan SATGAS. Dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 TAHUN 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p>2021 Perihal Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap pada Satuan Pendidikan.</p>
			<p>Beberapa rekomendasi berkaitan dengan Dinas Pendidikan juga disampaikan</p>	<p>Sudah ditanggapi di atas.</p>	

			di evaluasi kinerja ekonomi makro dan pembangunan sosial diatas.		
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	<p>Refocussing anggaran akibat Pandemi Covid-19 membuat dinas pemuda dan olahraga Kota Batam tidak dapat menyelenggarakan program dan kegiatannya. Hal ini tentu berpengaruh langsung pada pencapaian RPJMD Kota Batam 2016 - 2021.</p> <p>Namun demikian, kegiatan yang bersumber dari APBN khususnya hibah tetap terselenggara dan tidak di-refocussing. salah satunya adalah bantuan dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam. Sebagai OPD yang melakukan review terhadap proposal hibah sudah sepatutnya Dispora juga mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah tersebut. Sehingga, Dispora dapat mengetahui secara lengkap dan rinci dari penggunaan uang negara bidang keolahragaan tersebut.</p>	<p>Agar dana hibah bantuan yang diperoleh KONI Kota Batam untuk dapat dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan ditembuskan ke Dispora dan DPRD Kota Batam. Harapannya, penggunaan uang negara dapat dilakukan secara transparan dan Dispora dapat mengetahui secara detail penyelenggaraan olahraga di Kota Batam sehingga dapat terwujudnya sinergitas yang baik antara KONI Kota Batam dengan Dispora.</p>	<p>1. Setiap tahun anggaran KONI Kota Batam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hibah KONI kepada Walikota Batam c.q. BPKAD Kota Batam dan ditembuskan kepada Dispora Kota Batam. Untuk laporan pertanggungjawaban hibah KONI TA. 2021 akan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Batam.</p> <p>2. Hibah KONI Tahun 2020 juga telah mengalami rasionalisasi dari Anggaran APBD Murni sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>	
11	DINAS KEBUDAYAAN	Sebagai daerah yang memiliki kekhasan melayu, Kota Batam sudah	1. Bidang kebudayaan agar dipisahkan dari OPD ini,	Bidang kebudayaan dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	

	<p>DAN PARIWISATA</p>	<p>selayaknya mengedepankan budaya melayu (dengan tanpa mengesampingkan budaya-budaya lainnya yang ada di Kota Batam) dalam meningkatkan sektor pariwisata. Namun sepertinya hal ini tidak terjadi. Terbukti sangat jarang ada event kegiatan berbasis budaya di Kota Batam, salah satu sebabnya karena alokasi anggaran bidang kebudayaan dari tahun ke tahun selalu kecil.</p> <p>Kecilnya alokasi anggaran juga menjadi perhatian Pansus LKPJ tahun lalu dan menjadi rekomendasi agar ditingkatkan besarnya, namun hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Disamping itu, DPRD Kota Batam juga sudah sering memberikan masukan dan mendorong kepada Pemerintah Kota Batam guna melakukan penambahan alokasi anggaran untuk bidang kebudayaan pada OPD ini.</p> <p>Pandemi Covid-19 yang menghantam tidak hanya dunia, namun juga Indonesia khususnya Kota Batam membuat sektor pariwisata terkena dampak yang paling signifikan.</p>	<p>sehingga dapat berdiri sendiri menjadi sebuah dinas dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.</p>	<p>telah melakukan berbagai program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.</p> <p>Meskipun anggaran terbatas bidang kebudayaan telah melakukan pengembangan nilai2 kebudayaan dan mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu diantaranya dengan mensosialisasikan ke seluruh hotel, restoran, pelabuhan dan bandara serta fasilitas pelayanan publik di Kota Batam untuk memperdengarkan musik melayu, menyajikan masakan melayu dan menggunakan busana melayu. Sebagian hotel dan bandara serta fasilitas publik lainnya sudah menerapkan hal tersebut.</p> <p>Selain itu dalam pengembangan kesenian melayu event Kenduri Seni Melayu terus dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam Calender of Event (CoE) Nasional dan menghadirkan kesenian melayu dalam setiap penyelenggaraan event2 di Kota Batam. Bidang Kebudayaan juga telah memanfaatkan Ex Gedung Astaka MTQ Nasional sebagai Museum Batam Raja Ali Haji dan telah ditetapkan melalui Perwako No.18 Tahun 2021 tentang Pembentukan UPTD Museum Batam Raja Ali Haji. Selain itu sebagai upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia</p>	
--	-----------------------	---	---	--	--

		<p>Banyak pusat pariwisata tutup dan mengakibatkan banyak pekerja sektor pariwisata menjadi pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan, kerugian ditaksir milyaran juga dirasakan oleh para pengusaha bidang pariwisata. Untuk itu, Pemerintah Pusat tidak tinggal diam dan memberkan stimulus tidak hanya kepada para pekerja namun juga pengusaha bidang pariwisata melalui pemberian dana hibah sebagai bantuan akibat Pandemi Covid-19. Melalui Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dana hibah langsung disalurkan kepada sektor usaha bidang pariwisata.</p>		<p>yang memiliki kompetensi telah ditetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Batam sebanyak 7 orang dan telah lulus ujian sertifikasi Ahli Cagar Budaya Tingkat Pratama.</p> <p>Untuk menerapkan ungkapan 'miskin struktur kaya fungsi' bidang kebudayaan dapat memaksimalkan fungsi dan perannya terlebih bila didukung dengan anggaran yang memadai di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.</p>	
			<p>2. Meminta kepada Inspektorat untuk masuk dan mengaudit penggunaan dana hibah bagi pelaku pariwisata tersebut dan melaporkan kepada DPRD pada kesempatan pertama</p>	<p>2. Menanggapi rekomendasi pansus agar Inspektorat Daerah Kota Batam masuk dan mengaudit Dana Hibah Pariwisata dapat disampaikan bahwa mengacu Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Tekhnis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan</p>	

				Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan internal atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2020 pasal 25). Sementara Inspektorat Daerah Kota Batam bertugas melakukan Reviu atas pelaksanaan Program Hibah pariwisata .	
		Berdasarkan hasil rapat Pansus bersama dengan OPD, ditemukan fakta bahwa: a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki data yang valid terhadap pelaku usaha bidang pariwisata yang tersebar di Kota Batam dan jumlah pekerja bidang pariwisata yang terdampak akibat Pandemi Covid-19;		a. Data pelaku usaha bidang pariwisata terkait jumlah Hotel dan Restoran dan jumlah pekerja diberbagai sektor usaha pariwisata kami sampaikan sebagaimana data terlampir.	
		b. Tidak adanya sinergitas yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menanggulangi para pekerja yang terdampak Covid-19;		b. Terkait data jumlah pekerja yang terdampak Covid 19 kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Adapun data jumlah pekerja yang terdampak Covid 19 kami sampaikan sebagaimana data terlampir.	
		c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat menjelaskan		c. Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-244/MK.7/2020 hal penetapan	

		<p>secara rinci dan jelas terkait pemberian dana hibah kepada para pelaku usaha bidang pariwisata sebagai bantuan stimulus dari Pemerintah Pusat. Dana hibah sebesar Rp. 69 Miliar tidak dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik kepada para pelaku pariwisata di Kota Batam;</p>		<p>pemberian hibah Pariwisata TA 2020 tanggal 12 Oktober 2020. Kota Batam mendapat alokasi dana hibah Pariwisata TA 2020 sebesar Rp. 69.667.720.000. Berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : KM/704/DL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata, Kota Batam memenuhi kriteria sebagai daerah penerima hibah pariwisata yaitu sebagai kota yang memiliki lebih dari 15% PAD berasal dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) merupakan daerah destinasi Brending pariwisata daerah dengan kegiatan yang termasuk kedalam 100 Calendar of Events (Kenduri Seni Melayu masuk dama 100 COE nasional). Dana hibah pariwisata yang di alokasikan sesuai Juknis 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri Hotel dan Restoran dan 30 % untuk pemerintah daerah digunakan untuk penaganan dampak ekonomi dan sosial karena Pandemi Covid19 pada pelaku pariwisata. Secara ringkas alokasi dana hibah pariwisata TA 2020 Kota Batam adalah sebagai berikut:</p>	
--	--	--	--	---	--

				<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alokasi hibah pariwisata</td> <td>69.667.720.000</td> <td>50.494.681.494</td> <td>pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah</td> <td>48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032</td> <td>28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)</td> <td>sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/XI/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemerintah Kota Batam (30 %)</td> <td>20.900.316.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam</td> <td>11.808.556.000</td> <td>9.816.727.786,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan	1	Alokasi hibah pariwisata	69.667.720.000	50.494.681.494	pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494	2	Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah	48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032	28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)	sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/XI/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota	3	Pemerintah Kota Batam (30 %)	20.900.316.000				Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	11.808.556.000	9.816.727.786,70		
NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan																										
1	Alokasi hibah pariwisata	69.667.720.000	50.494.681.494	pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494																										
2	Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah	48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032	28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)	sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/XI/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota																										
3	Pemerintah Kota Batam (30 %)	20.900.316.000																												
	Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	11.808.556.000	9.816.727.786,70																											
				<p>Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai petunjuk teknis hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa hotel dan restoran yang berhak menerima dana hibah adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1. Hotel dan restoran sesuai data wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 (data di BP2RD yang telah diaudit BPK tahun 2019)</p>																										

				<p>2. Hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga pelaksanaan hibah pada agustus 2020.</p> <p>3. Hotel dan restoran yang memiliki perijinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku.</p> <p>4. Hotel yang membayar dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.</p>	
				<p>Berdasarkan kriteria tersebut maka alokasi dana yang sudah dihitung untuk semua hotel dan restoran yang telah membayar pajak sebanyak 1032, hanya 107 hotel dan restoran yang memenuhi syarat dan berhak menerima dana hibah pariwisata TA 2020 dengan 104 hotel dan restoran. Sehingga alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 48.767.404.000 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.406.302.990.51</p>	
		<p>d. Bidang kebudayaan bukan menjadi prioritas utama dalam pengembangan pariwisata di Kota Batam, hal ini terlihat dari kecilnya alokasi anggaran.</p>		<p>d. Dengan anggaran yang ada bidang Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya berbagai program dan kegiatan kebudayaan termasuk penyelenggaraan event Kenduri Seni Melayu, terwujudnya Museum Batam Raja Ali Haji, antusiasme para pelaku pariwisata dalam menyemarakkan budaya dan seni musik Melayu pada setiap kesempatan dan</p>	

				<p>penyelenggaraan event yang dilaksanakan. Ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Kedepan kami mengajukan anggaran untuk bidang kebudayaan lebih dari alokasi anggaran Tahun 2020 agar dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan objek-objek kebudayaan yang tertuang dalam Pokok Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Batam.</p>	
12	DINAS PERTANAHAN	<p>Setelah dilakukan refocussing anggaran, alokasi anggaran untuk OPD ini pada tahun 2020 hanya sebesar kurang lebih 600 juta.</p> <p>Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah Kota Batam tidak memberikan perhatian terhadap OPD ini atau dengan kata lain keberadaan OPD ini tidak terlalu "dibutuhkan" oleh Pemerintah Kota Batam.</p> <p>Disamping itu, secara tugas dan fungsi OPD ini juga tidak terlalu signifikan, sebab hanya menyangkut persoalan pertanahan di Kota Batam. Sementara secara kewenangan</p>	<p>Agar Dinas Pertanahan sebaiknya dilebur saja ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan seperti itu diharapkan akan lebih efektif dan efisien dari sisi kinerja dan pemanfaatan anggaran.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 12 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Pertanahan.</p> <p>Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>Dinas Pertanahan Kora Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p>	

		<p>untuk pengalokasian lahan adalah kewenangan dari BP Batam.</p>		<p>Berdasarkan Perwako Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan, pada Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat 3 bidang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Penatagunaan Dan Pendayagunaan Tanah,</li> <li>2. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah</li> <li>3. Bidang Pengawasan Pertanahan Dan Penanganan Masalah Pertanahan.</li> </ol> <p>Tugas Dinas Pertanahan Kota Batam yang didukung dengan sistem penganggaran APBD adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua</li> <li>2. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam</li> <li>3. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat.</li> </ol> <p>Selain pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan anggaran APBD diatas, terdapat juga beberapa kegiatan yang</p>	
--	--	---	--	---	--

				<p>dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pertimbangan teknis menyangkut pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Kota Batam di wilayah mainland dan hinterland</li> <li>2. Melakukan analisa kebutuhan lahan dan pengalokasian lahan untuk pembangunan insfrastruktur Pemerintah Kota Batam</li> <li>3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti Sekolah, Puskesmas, Jalan, tanah makam, dll</li> <li>4. Melakukan survey dan peninjauan lapangan terkait pemanfaatan lahan di Kota Batam</li> <li>5. Melakukan mediasi terhadap permasalahan tanah di Kota Batam</li> <li>6. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penatagunaan, pemanfaatan, dan pengadaan lahan di Kota Batam.</li> </ol>	
				<p>Selain tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas, seluruh kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan</p>	

				<p>sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam kecuali yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.</p> <p>Mengingat pentingnya penyelesaian urusan Pertanahan di daerah, maka Dinas Pertanahan untuk tetap dipertahankan sebagai salah satu OPD di lingkungan Kota Batam.</p>	
13	DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN RSUD EMBUNG FATIMAH	Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib, namun demikian pelayanan kesehatan di Kota Batam dapat kita rasakan masih jauh dari harapan. Puskesmas sebagai ujung tombak, semestinya memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan, hal ini menandakan pelayanan kesehatan yang dilakukan masih harus ditingkatkan. Disisi lain, jumlah puskesmas juga harus terus ditingkatkan sehingga sesuai dengan	Agar Dinas Kesehatan untuk melaksanakan amanat perda penyelenggaraan kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan terus meningkatkan koordinasi antara dinas kesehatan, puskesmas dan RSUD, dengan harapan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Batam.	<p>Dinas Kesehatan telah menyusun perencanaan untuk pembangunan Puskesmas setiap tahunnya sebanyak 1-2 unit setiap tahunnya dengan lokus diutamakan daerah yang memiliki ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk yang tinggi. Tahun 2022 sudah direncanakan 1 unit untuk pembangunan di kecamatan Sagulung.</p> <p>Dinas kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan penambahan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan</p>	

		<p>rasio ideal penduduk yang harus dilayani.</p> <p>Kota Batam telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, dan didalamnya telah mengatur berbagai norma terkait penyelenggaraan kesehatan di Kota Batam. Melihat fakta pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, menegaskan bahwa pelaksanaan perda penyelenggaraan kesehatan tidak berjalan dengan baik.</p> <p>Selanjutnya, ditemukan dalam pembahasan Pansus bahwa terdapat dana sebesar Rp. 800 an juta yang telah dipergunakan berkenaan dengan akreditasi puskesmas, namun pelaksanaan akreditasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ini tentu sangat disayangkan, dikarenakan kinerja tidak tercapai (0%) tapi penggunaan anggaran telah 100%. Dan, sayangnya permasalahan seperti ini lolos dari pengawasan Inspektorat. setelah dikonfirmasi ke Inspektorat ternyata</p>		<p>melalui peningkatan akreditasi Puskesmas.</p> <p>Berkenaan dengan pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2020, tidak dilaksanakan sama sekali karena pandemi Covid-19, dengan demikian realisasi keuangan dan realisasi fisiknya adalah 0%.</p>	
--	--	--	--	--	--

		mereka tidak melakukan pengawasan.			
			Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan audit atas penggunaan dana Rp 800 an juta di Dinas Kesehatan dan melaporkan hasil auditnya kepada DPRD pada kesempatan pertama.	Menanggapi catatan pansus tentang pelaksanaan kegiatan akreditasi Puskesmas sebesar Rp.800 an juta, tidak dapat dilaksanakan dan permasalahan seperti ini lolos dari pengawasan Inspektorat Daerah Kota Batam. Bersama ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Dinas Kesehatan Kota Batam tidak memasukkan kegiatan dimaksud kedalam Register Risiko sebagai kegiatan yang mempunyai risiko tinggi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021; dengan demikian, Inspektorat Daerah Kota Batam berasumsi kegiatan tersebut tidak memiliki kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga menjadi tanggung jawab OPD terkait.	
14	DINAS PERHUBUNGAN	Transportasi di Kota Batam secara umum sudah cukup baik, namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan, seperti masih adanya kendaraan transportasi umum yang sudah tidak layak namun masih beroperasi, selanjutnya pelaksanaan	Agar dinas perhubungan agar segera menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu dengan segera melakukan kajian atas sistem transportasi Kota Batam dan	1. Masih beroperasinya kendaraan Angkutan Umum yang sudah tidak layak.  Kendaraan umum yang sudah tidak layak, terbagi dalam 2 kategori, yaitu :  a. Tidak layak operasi sebab telah melampaui batas usia operasi.	

		<p>uji kendaraan bermotor (KIR) mesti dilaksanakan dengan rutin dan menyasar kepada sebanyak mungkin kendaraan di Kota Batam.</p>	<p>melaporkannya ke DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>b. Tidak layak operasi sebab kondisi kendaraan memang mengalami kerusakan meskipun masih termasuk dalam batasan layak usia operasi.</p> <p>Upaya yang dilakukan adalah :</p> <p>a. Menghimbau kepada pemilik kendaraan melalui badan usaha pada saat rapat koordinasi</p> <p>b. Menghimbau kepada pemilik kendaraan pada saat memasuki terminal</p> <p>c. Melakukan razia hunting bersama Satlantas Polresta Barelang</p> <p>ntuk razia secara stationary belum dapat dilaksanakan sebab petugas Dishub hanya boleh menghentikan dan memeriksa kendaraan di jalan dengan didampingi oleh petugas Kepolisian.</p> <p>Sedangkan dari Kepolisian sendiri (Satlantas) belum ada arahan untuk melakukan razia secara terpusat maupun secara mandiri disebabkan kondisi pandemic saat ini.</p> <p>d. Kendaraan yang telah habis usia operasi tidak dilakukan lagi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan untuk kendaraan yang mengalami kerusakan meskipun masih termasuk dalam batasan</p>	
--	--	---	---	---	--

				<p>layak usia operasi tidak lulus uji dan diarahkan untuk memperbaiki kerusakannya.</p> <p>2. Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Batam dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja sebab merupakan salah satu tupoksi Dishub dalam sektor pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Bahwa Dinas Perhubungan Kota Batam telah melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian, yaitu :</p> <p>a. Turun langsung ke perusahaan Angkutan</p> <p>b. Rapat dengan badan usaha Angkutan</p> <p>c. Himbauan di terminal</p> <p>d. Himbauan melalui media sosial.</p>	
				<p>Pengujian kendaraan bermotor terus berbenah dalam hal pelayanan dan system pengujian, dimana telah menggunakan system pembayaran non tunai dan menerapkan system smart card yang terintegrasi langsung kepada</p>	

				Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan juga selalu meminta arahan dari Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam hal peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor khususnya regulasi tentang penerapan Normalisasi kendaraan yang over dimensi dan over load (ODOL).	
		Kemudian, trans batam yang perlu ditingkatkan dari sisi jumlah dan penambahan trayeknya, sehingga dapat melayani sebanyak mungkin masyarakat Kota Batam.		Saat ini Bus Trans Batam sudah beroperasi di 8 koridor dr 10 koridor yg direncanakan. Di 8 koridor ini bus beroperasi dari jam 6 pagi sd jam 6 sore dg waktu tunggu bus rata 30 menit Utk membuka koridor baru dan menambah jam operasional dibutuhkan setidaknya 10 bus tambahan berikut biaya operasional yang lumayan besar, karena keterbatasan dana APBD maka pembukaan Koridor baru belum dapat direalisasikan, mengingat sekarang tdk ada program bantuan bus hibah dari kementerian.	
		Selanjutnya, pengelolaan parkir harus dikelola dengan baik dan paripurna. bila parkir ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup signifikan.		Pengelolaan Parkir di Kota Batam untuk pengelolaan pemungutan retribusi masih secara manual khususnya pada parkir OTS ( Pelayanan parkir dengan Juru Parkir), Dinas Perhubungan melalui UPTD Pelayanan Parkir saat ini berupaya mengelola sistem pungutan retribusi parkir dari manual menjadi non tunai	

				dengan menggunakan QRIS bekerjasama dengan Bank-bank Kas Daerah Kota Batam di bawah koordinasi Bank Indonesia khususnya yang telah siap mengelola sistem pungutan layanan parkir secara Non Tunai baik secara sistem dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
		Berbagai permasalahan transportasi di Kota Batam akan dapat dijawab dan diselesaikan melalui pembangunan sistem transportasi Kota Batam, yang ini merupakan rekomendasi Pansus LKPJ tahun lalu yang hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. atas tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut, tentu sangat disesalkan. Dan menetapkan kepala dinas definitif.	Selanjutnya, untuk kekosongan Kepala Dinas Perhubungan agar kiranya dapat segera diisi dengan kepala dinas definitif.	Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Btam akan ditata dengan sistem BRT (Bus Rapid Transit) dan ramah lingkungan, seperti di Bandung, Semarang , Pekanbaru dan Makasar. Melalui MOU antara Kementerian Perhubungan, Provinsi Kepri dan Kota Batam, Kota Batam telah ditunjuk sebagai salah satu kota dengan Program Sutrinama dan Indo Bus, yaitu satu program transportasi yang menempatkan angkutan bus dengan pola jalur khusus seperti Trans Jakarta. Tindak Lanjut MOU tersebut penyusunan dokumen pra FS telah dirampungkan pada tahun 2020 dan saat ini diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 Team akan menyelesaikan dokumen FS.  Tindak lanjut dari dokumen FS tersebut maka akan dijadikan Blue Print Bappenas untuk menjadi prioritas pembangunan	

				<p>yang selanjutnya akan dicarikan pembiayaan dr Pemerintah Pusat dan sharing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota untuk Fisiknya.</p> <p>Dengan realisasi sistem BRT ini angkot-angkot yang ada saat ini akan ditata dengan sistem trayek feeder.</p> <p>Sehubungan dengan posisi kepala Dinas Perhubungan yang sedang kosong, maka Pemerintah Kota Batam akan mengisi posisi tersebut diwaktu yang tepat sesuai dengan ketentuan pasca pelantikan kepala daerah.</p>	
15	DINAS TENAGA KERJA	<p>Kota Batam sebagai daerah industri dengan banyaknya perusahaan dan pekerja, tentu membutuhkan pengawasan hubungan industrial yang baik. Sebab, sejak kewenangan pengawasan “diambil alih oleh provinsi” praktis pengawasan pelaksanaan hubungan industrial sangat lemah di Kota Batam.</p> <p>Disamping itu, tingginya permasalahan hubungan industrial juga mengharuskan adanya ketercukupan tenaga mediator dari Dinas Tenaga Kerja.</p>	<p>1. Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Provinsi Kepri berkenaan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan hubungan industrial. Agar berbagai kasus hubungan industrial dapat ditekan dan diselesaikan dengan baik.</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja telah melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan hubungan industrial, dengan melakukan pertemuan secara bulanan antara mediator dengan pegawai pengawas provinsi.</p>	

		Banyaknya pekerja yang dirumahkan dan di PHK sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, tentu membutuhkan perhatian yang lebih tinggi dari Dinas Tenaga Kerja.			
			2. Dinas Tenaga Kerja perlu segera menambah tenaga mediator sehingga rasio antara jumlah tenaga kerja dengan banyaknya perusahaan di Kota Batam dapat terpenuhi.	Dinas Tenaga Kerja telah membuat usulan Diklat Teknis Mediator melalui BKPSDM sebanyak 5 (lima) orang. Surat Nomor : B.574/TK-1/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021	
			3. Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pelatihan bagi masyarakat harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Jangan terkesan asal berjalan dan untuk menghabiskan anggaran semata. Harus berbasis data dan kajian serta diusahakan output dari pelatihan tersebut diorientasikan untuk dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru.	Dalam merencanakan program pelatihan baik yang bersifat pencaker maupun peningkatan tenaga kerja kami meminta masukan dari forum pemagangan dan pelaku industri HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia), BSOA (Batam Shipyard Offshore Association, IPSM (Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia), tentang pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri, selain itu Dinas Tenaga Kerja juga mengadakan Training Need Analysis (TNA) bekerjasama dengan HRD Perusahaan untuk mendapatkan program pelatihan dan kompetensi.	

16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	<p>Sebagai daerah industri, persoalan lingkungan hidup di Kota Batam sangat kompleks dan dinamis. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola persoalan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar dan merugikan masyarakat Kota Batam secara luas.</p> <p>Disamping itu, permasalahan sampah juga membutuhkan perhatian yang lebih serius dari dinas lingkungan hidup.</p> <p>Dipakainya puluhan truck yang tidak layak jalan oleh dinas dalam mengangkut sampah, adalah contoh yang tidak baik dan bukti bila pengelolaan sampah belum optimal di Kota Batam.</p>	<p>1. Agar segera melakukan upaya pemenuhan tenaga pengawasan lingkungan. sehingga persoalan lingkungan hidup di Kota Batam dapat terpantau dan terawasi secara baik.</p>	<p>Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mempunyai Tenaga Pengawas sebanyak 18 orang dimana hanya 2 orang PPNS dan 2 orang yang telah mengikuti Diklat PPLHD untuk mengawasi sekitar 2000 kegiatan industri.</p> <p>Demi memenuhi Tenaga Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengusulkan anggaran untuk Diklat PPLHD 5 (Lima) tahun kedepan sebanyak 25 orang. Dimana tiap tahunnya 5 orang. Dan mengusulkan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 10 orang.</p>	Terlampir
			<p>2. Agar membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan profesional dengan memenuhi sarana dan prasarana yang</p>	<p>Terkait sarana dan prasara yang tersedia saat ini tidak memadai dikarenakan kondisi armada yang ada saat ini mengalami kerusakan berat dan ringan terutama pada armada becak motor kecamatan dan armada yang ada pada</p>	Terlampir

			<p>dibutuhkan termasuk tenaga pendukungnya.</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi saat ini ada 20 Amrol dan 7 Dumtruck yang mengalami rusak berat dan ringan sehingga saat mempengaruhi pelayanan pengangkutan sampah dan tercapainya target ritase dan tonase sampah yang disebabkan oleh kemampuan operasional masing-masing kendaraan tidak bekerja secara maksimal. Kerusakan meliputi kerusakan fisik, mesin kendaraan. Sehingga di butuhkan peremajaan armada yang telah mengalami kerusakan dan penambahan unit baru untuk mengakomodir objek pelayanan baru yang terus berkembang di Kota Batam.</p>	
			<p>3. Agar segera membuat kajian mengenai laboratorium lingkungan di Kota Batam sebagai amanat perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Atas ketiga rekomendasi tersebut, untuk dapat dilaporkan ke DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>Berdasarkan kajian UPTD laboratorium DLH Kota Batam maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kapasitas personil laboratorium Lingkungan (SDM)</li> <li>2. Ketersediaan peralatan dan bahan kimia untuk pengujian parameter yang akan diakreditasi.</li> <li>3. Fasilitas kondisi lingkungan gedung.</li> </ol> <p>Sehingga setiap tahun diharapkan penambahan jumlah parameter yang</p>	<p>Terlampir</p>

				akan diakreditasi dari tahun 2022 sampai dengan 2025.	
17	DINAS PERIKANAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<p>Ketiganya dapat dikatakan sebagai dinas yang paling sedikit mendapatkan alokasi anggaran. padahal menurut temuan dan kajian Pansus, ketiga dinas ini bersentuhan langsung dengan masyarakat luas dan terutama masyarakat menengah ke bawah, yang jumlahnya mayoritas di Kota Batam.</p> <p>Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil, rata-rata hanya Rp. 600-an juta per OPD, tentu ini sangat memprihatinkan, dan terlihat keberpihakan pemerintah Kota Batam kepada masyarakat menengah ke bawah masih sangat lemah.</p>	Agar Walikota dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap ketiga OPD ini dengan memberikan keleluasaan membuat, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan yang inovatif dengan memberikan alokasi anggaran yang memadai, sebagai wujud keberpihakan kepada urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan mayoritas masyarakat di Kota Batam.	<p><b>1. Dinas Perikanan</b></p> <p>Sebagaimana yang tertera di Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Perikanan TA 2022, pagu dana sebesar Rp. 10.010.296.079,- (di luar gaji dan tunjangan PNS) dinilai cukup untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mencapai target capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022. Ada peningkatan anggaran dibanding Tahun 2019 yang sebesar Rp 3.658.398.088,04 (di luar gaji dan tunjangan PNS) dan Tahun 2020 yang sebesar Rp. 9.597.220.048,00 (di luar gaji dan tunjangan PNS).</p>	
		Berdasarkan pembahasan di Pansus, cukup banyak inovasi program/kegiatan yang dapat dilakukan, seperti pada Dinas Perikanan dapat melaksanakan dan mengoptimalkan program/kegiatan yang terkait dengan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, demikian juga dengan Dinas Ketahanan Pangan, banyak program/kegiatan yang terkait		<p><b>2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam</b></p> <p>Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari dua Kegiatan,</p> <p>1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebesar Rp.</p>	

		dengan ketahanan pangan dan dibuat dan dilaksanakan, pun untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.		<p>1.107.350.000.</p> <p>2.Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sebesar Rp. 2.211.280.000.</p> <p>Total anggaran yang telah dianggarkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat T.A 2021 sebesar Rp. 3.318.630.000,-</p>	
				<p><b>3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam</b></p> <p>Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yaitu :</p> <p>1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang wilayah keanggotaan dalam Daerah/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebesar Rp. 390.304.000.</p> <p>2.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro</p>	

				<p>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sebesar Rp. 851.247.000.</p> <p>3. Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Sebesar Rp. 1.330.752.000</p> <p>Total anggaran yang telah dianggarkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat T.A 2021 sebesar Rp. 2.572.303.000.</p>	
			<p>Sengaja catatan dan rekomendasi atas ketiga dinas tersebut sama persis dengan tahun lalu, dikarenakan tidak adanya</p>	<p>1. Dinas Perikanan</p> <p>Pada Tahun 2020 ada peningkatan anggaran yang signifikan dibanding Tahun 2019. Tahun 2020 belanja langsung (di luar gaji dan tunjangan PNS)</p>	

			<p>tindaklanjut dari pihak pemerintah Kota Batam, dan kepada ketiga dinas yang bersangkutan agar melaporkan progres atau tindaklanjut ini kepada DPRD pada kesempatan pertama dengan membawa berbagai program dan kegiatan yang diusulkan untuk menjawab kebutuhan dan dinamika permasalahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>sebesar 9.597.220.048,00. Pada Tahun 2019 Anggaran belanja langsung (di luar gaji dan tunjangan PNS) sebesar Rp. 3.658.398.088,04 .</p> <p>2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya memaksimalkan dana bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Batam. Adapun Jumlah Penerima Bantuan Usaha Mikro (BPUM) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penerima BPUM sebanyak 39.167 pelaku usaha dengan jumlah anggaran : Rp. 94.000.800.000.</p> <p>Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah mengusulkan pelaku usaha mikro sebagai calon penerima BPUM sampai saat ini sebanyak : 2378 Pelaku Usaha Mikro.</p>	
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK	OPD ini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari juga merupakan OPD leading sector dalam beberapa peraturan daerah, yakni: Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan	Agar OPD ini memiliki pucuk pimpinan yang paham betul akan tugas pokok dan fungsi dari OPD. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas SDM khususnya pelaksana teknis dari program dan kegiatan dalam menerjemahkan kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan sejauh ini telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam indikator RPJMD 2016-2021. Penyelenggaraan perlindungan d anak dilaksanakan berpedoman kepada Perda Nomor 6 tahun 2016 yang dilaksanakan melalui 3 fungsi utama :	

	<p>DAN KELUARGA BERENCANA</p>	<p>Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam; dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.</p> <p>Jika ketiga perda ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka penyelenggaraan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan tidak hanya di hulu namun juga hilir. Namun sayangnya, pemahaman SDM pada OPD ini terhadap perda tersebut sangat tidak mumpuni, sehingga perda ini menjadi mandul dan tidak terimplementasi dengan baik.</p> <p>Begitu juga dengan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, hampir semua program dan kegiatan yang berkaitan pada kegiatan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Namun, hal inipun juga tidak dapat menjawab persoalan kependudukan di Kota Batam.</p>	<p>yang erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.</p>	<p>1. Fungsi pelayanan (P2TP2A), fungsi Pengawasan Anak ( KPPAD Kota Batam) dan Fungsi Pencegahan Kekerasan terhadap anak (melalui Pembentukan Forum Anak Kota Batam, PATBM, dan APSAI).</p> <p>Ketiga fungsi ini telah dilaksanakan secara berkorelasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya yang selama ini telah berjalan dengan maksimal sehingga kasus-kasus anak di kota Batam dapat tertangani dengan baik.</p> <p>KPPAD selaku mitra kerja dalam pengawasan anak Kota Batam telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Batam secara berkala yang turut mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam secara integratif dan berkesinambungan.</p> <p>Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif berpedoman kepada Perda Nomor 8 Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai upaya progresif untuk meningkatkan tumbuh kembang anak yang cerdas kreatif dan inovatif.</p>	
--	-------------------------------	---	--	--	--

				<p>Kegiatan utama pengembangan anak usia dini dituangkan melalui Bina Keluarga Balita (BKB) se-Kota Batam yang secara dini memberikan pemahaman bagaimana menata tumbuh kembang anak yang ideal sedari dini kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2016, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berbasis kepada aplikasi GAB/GBS yang berporos kepada anggaran yang responsif gender yang diaplikasikan oleh 80% OPD Kota Batam (dengan capaian persentase belanja anggaran responsif gender Kota Batam tahun 2020).</p> <p>Hal ini memacu indeks pembangunan gender Kota Batam pada tahun 2020 dengan capaian 94,42.</p> <p>Tentunya implementasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan ini perlu mendukung kompetensi sumber daya yang mumpuni yang saat ini terus dikembangkan melalui pembinaan dan konsolidasi integratif seluruh pegawai dalam pelaksanaan rencana kerja dan pelatihan kompetensi bidang kepada seluruh SDM yang ada sehingga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui</p>	
--	--	--	--	--	--

				dinas ini dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas Kota Batam.	
19	SEKRETARIAT DAERAH	Berdasarkan hasil rapat Pansus bersama Sekretaris Daerah dan jajarannya, ditemukan fakta bahwa Sekretariat Daerah tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terbukti dari tidak sinkronnya data yang dimiliki oleh Sekda dengan dokumen LKPJ 2020.	<p>Perlunya peningkatan kualitas SDM dari Sekretariat Daerah dalam memahami tupoksi dengan baik. Diklat merupakan salah satu jawaban dari permasalahan ini.</p> <p>Kiranya, tindak lanjut dari rekomendasi ini nantinya dapat dilaporkan kepada DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>Sekretariat Kota Batam akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Batam untuk pengiriman/pelaksanaan Diklat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis dan non teknis) guna peningkatan kualitas SDM di lingkungan Setdako Batam.</p> <p>Berdasarkan surat Nomor 04/SP/UM/VI/2021 kebutuhan diklat Setdako Batam adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Diklat Teknis = 160 peserta</li> <li>2. Jenis Diklat Struktural = 17 peserta</li> <li>3. Jenis Diklat Fungsional = 207 peserta.</li> </ol> <p>Selain itu dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Setdako Batam juga mengusulkan anggaran diklat dalam sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.</p>	
20	SEKRETARIAT DPRD	Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai supporting system terhadap DPRD, maka sudah seharusnya berbagai program/kegiatan yang dilakukan harus dipastikan mampu mendorong	Agar OPD ini memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas SDM melalui berbagai in-house training dan penyiapan Standar Operasional	Akan bekerjasama dengan BKPSDM untuk dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas SDM di Sekretariat DPRD Kota Batam, melalui pelatihan khususnya dibidang yang terkait Tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.	

		<p>peningkatan kinerja DPRD, seperti penyelenggaraan rapat-rapat, risalah/notulensi disetiap alat kelengkapan, peningkatan SDM setwan di setiap alat kelengkapan, standar dan prosedur kerja yang baik dan terukur.</p>	<p>Prosedur (SOP) di setiap lini organisasi di Sekretariat DPRD.</p> <p>Selanjutnya melaporkan tindaklanjut tersebut kepada DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>Untuk PNS lebih mengintensip kegiatan bimtek bagi pegawai guna meningkatkan kompetensi PNS, terutama yang berkaitan dengan tupoksi seperti: Diklat PIM, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan pengarsipan. Dan untuk THL jumlah 166 orang yang bertugas dibagian Legislasi, Humas dan protokol, Keuangan, dan Bagian Umum, diharapkan memperoleh pelatihan, sesuai dengan tugas masing-masing seperti: pengembangan kepribadian misal MC dan tata cara penerima tamu untuk bidang humas dan protokol, pengembangan pengetahuan tentang gukum dan notulen untuk bidang legislasi, pengembangan pengetahuan tentang pengamanan dan penanggulangan bencana untuk bidang pamdal.</p>	
--	--	---	---	---	--

### 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang meliputi peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang Kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah dituangkan dalam format sebagai berikut :

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi</li> <li>• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</li> </ul>	Mendorong tersedianya penyediaan cadangan bahan pangan pokok tingkat Daerah, mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan pasca bencana antara lain akibat terkena banjir, angin puting beliung, gangguan cuaca, tanah longsor, kebakaran, masyarakat dengan gizi buruk, kekurangan pangan/miskin serta saat terjadinya gejolak kenaikan harga pangan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal selama 2 (dua) minggu berturut-turut
2	Peraturan Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</li> <li>• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi</li> <li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di</li> </ul>	Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Batam, dan memberikan pedoman kepada Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		lingkungan Pemerintah Instansi	
3	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	Untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batam dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi
4	Peraturan Walikota Batam Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemakaman Di Tempat Pemakaman Kota Batam	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, pengelolaan Tempat Pemakaman	Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Batam telah meningkatnya kebutuhan tanah pemakaman sebagai salah satu kebutuhan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pengguna tanah untuk tempat pemakaman maka perlu diatur berdasarkan aspek keagamaan, sosial budaya, pendidikan, keamanan dan lingkungan.
5	Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2021 tentang Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi</li> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi</li> </ul>	Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya dan Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu Kota lokasi fokus penanganan Stunting di Indonesia sejak tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Terintegrasi Tahun 2021, sehingga diperlukan intervensi secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama (konvergensi stunting terintegrasi), mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kota Batam
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan</li> <li>• Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar</li> </ul>	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat belum terwujud sepenuhnya
7	Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> </ul>	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Batam dan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
8	Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional</li> </ul>	Dalam rangka menjawab kebutuhan terhadap akses pelayanan kesehatan bagi

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan</li> </ul>	Penduduk Kota Batam yang memenuhi kriteria di masukkan kedalam DTKS akan tetapi belum terdaftar dalam DTKS dan bukan penerima bantuan Iuran Pusat dan juga bukan peserta mandiri JKN di Daerah.
9	Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	Sebagai acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam mewujudkan penyempurnaan dan/atau optimalisasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta sebagai dasar dalam mengkoordinasikan pelaksanaan SP4N Daerah dan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman, kesatuan langkah dan tindakan seluruh Penyelenggara dalam mewujudkan ketercapaian target pengelolaan pengaduan nasional.
10	Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah	Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang

### 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan sebagai berikut :

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Indikator Makro Ekonomi dan Sosial setidaknya meliputi: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Perkembangan PDRB dan PDRB Perkapita, Tingkat Pengangguran Terbatas, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Disparitas antar Wilayah.</p> <p>Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada capaian kondisi makro ekonomi Kota Batam, beberapa indikator makro ekonomi mengalami penurunan yang cukup signifikan dari target</p>	<p>Guna terciptanya kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity) pada akhir tahun 2021, perlu dilakukan percepatan dan kelancaran pelayanan vaksinasi bagi kelompok rentan dan pelayanan publik serta pekerja ekonomi kerakyatan. Tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan pada semua aktifitas pemerintah kota batam dan masyarakat yang berpotensi besar terjadi penularan Covid-19.</p>	<p>Dinas Kesehatan sudah melaksanakan imunisasi Covid-19 pada saat ini sudah pada tahap 3 dengan sasaran adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, seperti guru, lansia dan Dinas Kesehatan dengan berkoordinasi dengan OPD lainnya telah melakukan pengawasan/ razia pelaksanaan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat umum</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>yang ditetapkan dalam RKPD 2020.</p> <p>Namun demikian, kontraksi ekonomi pada tahun 2020 Kota Batam paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri, demikian juga dampak sosialnya dibanding daerah lainnya, yakni pengangguran terbuka yang meningkat 3,98%, namun penduduk miskin dapat ditekan bahkan kemiskinan turun sebesar 0,10% disaat daerah lainnya kemiskinan meningkat di masa Pandemi Covid-19.</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yang</p>			

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>salah satunya adalah Indeks Pendidikan mesti menjadi perhatian khusus. Akibat dampak Pandemi Covid-19 proses pembelajaran dilaksanakan dengan daring, hal ini tentu berdampak pada capaian kualitas pendidikan, dan ini berpotensi menjadi ancaman baru bagi kualitas pendidikan di Kota Batam.</p> <p>Di masa pandemi, pendidikan seperti kekurangan asupan gizi, dan dalam jangka panjang berpotensi terjadinya “stunting pendidikan”. Sebagaimana dipahami bahwa tidak ada pendidikan yang lebih baik kecuali tatap muka di sekolah. Penanaman</p>			

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	kejujuran, kedisiplinan, dan perilaku luhur atau akhlak mulia, tentu harus dibelajarkan lewat tata muka dan tidak melalui daring. Sekali lagi, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah kota batam. untuk itu, Pansus mendorong harus ada kebijakan kreatif dan inovatif agar sumber daya manusia di Kota Batam tidak ikut menurun di tengah Pandemi Covid-19.			
		Guna terciptanya percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah Kota Batam harus segera melakukan peng-identifikasi-an sektor perekonomian penyumbang PDRB yang terdampak Pandemi Covid-19, dengan 3 (tiga) kategori, yakni sangat terpuruk,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Batam sedang sedang menggalakan program vaksinasi, program ini ditargetkan mampu mencegah dan/atau meminimalisasi penyebaran Covid-19, sehingga diharapkan aktivitas sosial masyarakat kembali berjalan normal, dan imbasnya perekonomian nasional bergerak cepat ke arah pertumbuhan ekonomi positif;</li> <li>2. Pemerintah Kota Batam memberikan Insentif Pajak Daerah berupa</li> </ol>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>terpuruk dan normal. Hal ini agar dapat dicarikan kebijakan yang tepat sasaran atau efektif.</p> <p>Dari data peng-identifikasi-an tersebut, pemerintah Kota Batam pada perubahan APBD 2021, segera mengambil langkah taktis dan strategis berupa kebijakan, baik regulasi maupun anggaran yang memadai, untuk: menyelamatkan sektor yang sangat terpuruk, pemulihan sektor yang terpuruk, dan akselerasi sektor yang masih normal, agar perekonomian segera recovery.</p> <p>Selanjutnya, mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat dengan cara menekan laju</p>	<p>penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap;</p> <p>3. Bahwa Pemerintah Kota Batam dan Kementerian Koperasi dan UMKM pada Tahun 2020 memberikan Bantuan Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 39.167 pelaku usaha dengan jumlah anggaran : Rp. 94.000.800.000 dan pada tahun 2021 akan mengusulkan kembali bantuan usaha mikro (BPUM);</p> <p>4. Pemerintah Kota Batam terus melakukan sosialisasi bantuan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing UMKM;</p> <p>5. Pelaksanak Bazar sembako murah,</p> <p>6. Pelaksanakan peningkatan kompetensi usaha mikro dan Industri kecil menengah di Kota Batam;</p> <p>7. Pemberian hibah Pariwisata kepada Industri Hotel dan Restoran untuk penanganan dampak ekonomi dan sosial</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>inflasi pada tingkat paling rendah, memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penciptaan lapangan kerja.</p> <p>Dan, yang tak kalah pentingnya adalah mempercepat realisasi konsumsi pemerintah Kota Batam (Belanja APBD) dengan mengutamakan sumber daya dan produk lokal agar produksi barang dan jasa masyarakat bergerak kembali.</p>	<p>karena Pandemi Covid19 pada pelaku pariwisata;</p> <p>8. Pemerintah Kota Batam berusaha uk memenuhi kebijakan travel bubble yang berusia 18 Tahun keatas, minimal 70 %;</p> <p>9. Pemerintah menghimbau dan sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi prokes dalam menjalankan usahanya;</p> <p>10. Pemerintah Kota Batam menggalakan transaksi belanja non tunai melalui keris dan lainnya dalam mencegas penyebaran covid-19;</p> <p>11. Pemerintah Kota Batam melakukan MOU dengan daerah Kab. Kerinci penghasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan Batam dan kerjasama bersama swasta dalam mewujudkan pasar TPID;</p> <p>12. Pemerintah Kota mempermudah akses penjualan dan pemasaran pelaku usaha mikro pada bazar, pameran dan bekerjasama dengan toko modern;</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			13. Melalui Mall pelayanan mempermudah pelayanan perizinan dan investasi di Kota Batam.	
		3. Guna terciptanya pemulihan kualitas pendidikan dan kesehatan maka pemerintah Kota Batam perlu segera melakukan perencanaan kebijakan sekolah tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, dengan pemanfaatan test Covid-19 bagi siswa setiap hari yang mudah dan cepat, dengan mempergunakan Genose	<p>Dalam merumuskan kebijakan sekolah tatap muka Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kota Batam. Sehingga penetapan pelaksanaan sekolah tatap muka tetap mendapatkan masukan dan pertimbangan SATGAS.</p> <p>Dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020</p> <p>Nomor 612 TAHUN 2020</p> <p>Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020</p> <p>Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	
		4. Melakukan reformasi pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kebijakan promotive dan preventive dibanding curative. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data tingkat kematian tinggi selama Pandemi Covid-19 adalah disebabkan comorbid (penyakit penyerta). Maknanya, penyakit tidak menular yang dimulai dari meja makan seperti diabetes, obesitas, tekanan darah	Untuk mengendalikan dan mencegah penyakit tidak menular (diabetes, hipertensi, stroke, jantung, obesitas dll) yang merupakan komorbid penyebab kematian Covid-19, maka sangat diperlukan skrining/ deteksi dini PTM, dan pelayanan terpadu PTM, sehingga masyarakat yang masih sehat bisa dicegah sedangkan masyarakat penyandang PTM (yang sudah menderita PTM) dapat terkontrol dengan edukasi dan minum obat teratur. Dalam hal ini Dinkes Batam sudah melakukan berbagai upaya baik dalam secara langsung melalui upaya deteksi dini dan secara	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		tinggi, jantung, stroke dan lainnya, dapat dicegah dengan program dan kegiatan yang orientasinya untuk membentuk pola hidup sehat.	tidak langsung dengan melibatkan lintas sektor dan tokoh masyarakat.	
<b>Evaluasi Kinerja Berdasarkan Misi Daerah</b>				
	Sebagaimana yang disajikan dalam dokumen LKPJ 2020, bahwa pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah penyusunannya didasarkan atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang termaktub pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020. Disamping itu, LKPJ 2020 juga disusun berdasarkan RPJMD kota batam tahun 2016	Kepada Bapelitbangda sebagai OPD atau leading sector atas penyusunan dokumen LKPJ 2020 bertanggungjawab dan kepada Walikota agar memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ini, kemudian memastikan agar tahun depan tidak terjadi kembali.	Dalam penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2020 tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan memang tidak dapat mewujudkan 100 persen pencapaian visi dan misi sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kota Batam pada Tahun Anggaran 2020 mengalami beberapa kendala terutama terkait pelaksanaan <i>refocusing</i> dan <i>realokasi</i> anggaran untuk penanggulangan dampak <i>Covid 19</i> .  Untuk tahun 2021 Pemerintah Kota Batam telah melakukan kebijakan dan menginventarisir permasalahan daerah	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	– 2021, dimana LKPJ 2020 merupakan tahun tahapan akhir RPJMD untuk mencapai visi dan misi daerah.		yang berhubungan dengan prioritas pembangunan yang masih belum tercapai pada tahun 2020 sehingga dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai tahun terakhir/tahun transisi.	
	Dari pengkajian data pada Bab III dokumen LKPJ 2020, ternyata masih sama dengan LKPJ tahun sebelumnya, yakni tidak seluruh indikator sasaran yang targetnya telah ditetapkan dalam RPJMD kota batam, dilaporkan hasil capaiannya dalam dokumen LKPJ 2020. Dari 76 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD kota batam yang dilaporkan dalam LKPJ 2020 hanya 59 indikator, sedangkan sisanya 17 indikator	1. Meminta agar Walikota menginstruksikan kepada Bapelitbangda untuk melakukan evaluasi bersama dengan OPD-OPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan target indikator sasaran pembangunan yang pada tahun 2020 gagal mencapai target RPJMD tersebut.  Harus diidentifikasi dengan baik masalah, hambatan dan penyebabnya sehingga banyak indikator sasaran pembangunan	Bapelitbangda telah melakukan evaluasi dan menyusun Perubahan RPJMD menyesuaikan dengan kondisi Kota Batam. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Batam melalui Bapelitbangda telah melakukan penyusunan dokumen perubahan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 salah satunya berdasarkan reviu dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) pada evaluasi SAKIP Kota Batam terkait tidak tepatnya indikator sasaran dan program yang masih berorientasi kepada <i>output</i> bukan <i>outcome</i> .  Dan pada tahun 2019 sudah dilakukan penyampaian Ranperda Perubahan RPJMD 2016-2021, namun Perubahan RPJMD tidak sampai pada pengesahan Perda. Sehingga permasalahan, hambatan dan penyebab banyaknya	-Ranperda Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021; - Kronologis Perubahan RPJMD Kota Batam 2016-2021

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	tidak dilaporkan capaian kinerjanya. Pemerintah kota batam pada tahun 2020 berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja sasaran misi pertama dan kelima dengan prestasi sedang (56% dan 60% target indikator sasaran tercapai).	yang menjadi target RPJMD tidak tercapai atau gagal. Dan hasil evaluasi serta indentifikasinya dilaporkan kepada DPRD Kota Batam pada kesempatan pertama.	indikator sasaran dan program tidak dapat tercapai hingga akhir periode RPJMD tidak dapat ditindaklanjuti dan hal ini yang menyebabkan rendahnya capaian indikator sasaran pembangunan Kota Batam.	
	Selanjutnya, berhasil mencapai atau melampaui target indikator kinerja sasaran misi kedua, ketiga, keempat dan keenam dengan prestasi rendah (target hanya tercapai dengan besaran 39%, 37%, 20% dan 43% dari target yang ditetapkan RPJMD).  Jika dinilai secara agregat keseluruhan dari 76 indikator	2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD kota batam tahun 2016 – 2021, sekaligus tahun transisi dengan RPJMD yang baru tahun 2021 – 2026, untuk itu perencanaan pembangunan tahun perubahan 2021 harus memperhatikan hasil-hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya.	Dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak lepas dari evaluasi pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Bapelitbangda setiap tahunnya melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Kota Batam yang dilaporkan ke Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, dokumen ini juga dijadikan bahan fasilitasi RKPD Kota Batam oleh Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya hasil evaluasi tahun sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam penyusunan perencanaan tahunan untuk tahun selanjutnya.	-Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2020

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>sasaran untuk tahun 2020 hanya sebesar 41% target indikator kinerja sasaran berhasil dicapai. Untuk tahun tahapan akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021 (tahun percepatan pembangunan), capaian sebesar 41% tersebut tentu sangat rendah, walaupun Pandemi Covid-19 dapat menjadi alibi atas kinerja yang rendah tersebut.</p>	<p>Keadaan darurat kesehatan sebagai dampak Pandemi Covid-19 harus menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan urusan kesehatan, sosial, ekonomi dan ketertiban masyarakat sampai terjadinya kekebalan kelompok masyarakat (herd immunity). Dengan demikian, arah kebijakan APBD Perubahan 2021 dapat menjadi solusi taktis atas dampak Pandemi Covid-19, sehingga perekonomian Kota Batam dapat segera pulih, pelayanan umum menjadi normal kembali dan keamanan serta ketertiban masyarakat terjamin.</p>		
<b>Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah</b>				

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Perlu diketahui bersama, SILPA indikatif (<i>unaudited</i> BPK) tahun berjalan tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2020, sehingga Pansus harus menghitung sendiri berapa besaran SILPA sebelum audit BPK tahun 2020. Dan ini kembali mengulang pada LKPJ tahun lalu. Hal ini tentu patut disayangkan dan mengurangi derajat transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2020.</p> <p>Pertanyaannya: Kenapa besaran SILPA Indikatif selalu tidak dilaporkan dalam dokumen LKPJ kepada DPRD?</p>	<p>1. Dalam melakukan penggalian potensi pendapatan daerah harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang saat ini kurang menguntungkan. Jangan sampai menimbulkan gejolak di masyarakat yang pada gilirannya akan mendistorsi kegiatan perekonomian di masa sulit sekarang ini.</p>	<p>Salah satu langkah yang dilakukan BPPRD Kota Batam dalam penggalian potensi pendapatan daerah serta dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dimasa pandemi yaitu dengan membuat kebijakan Insentif Pajak Daerah berupa penghapusan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu: Tahap I : 16 Maret 2020 s.d 30 Juni 2020 Tahap II : 1 Juli 2020 s.d 30 September 2020 sehingga dengan kebijakan tersebut dapat membantu meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak daerah.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>2. Sebelum terciptanya <i>herd immunity</i>, dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah hendaknya Pemerintah Kota Batam dapat sejalan dengan kebijakan nasional, seperti pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah serta berbagai bentuk kemudahan kepada dunia usaha dan masyarakat yang menjadi obyek PAD, dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini.</p>	<p>Dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam telah sejalan dengan kebijakan nasional, yaitu dengan membuat Kebijakan Insentif Pajak Daerah dalam rangka memberikan keringanan kepada dunia usaha berupa :</p> <p>A. Penghapusan Denda Administrasi Pajak Lainnya berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah (Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu :</p> <p>Tahap I : 15 April 2020 s.d 30 Juni 2020 Tahap II : 21 September 2020 s.d 31 Desember 2020</p> <p>B. Penundaan Pembayaran Pajak Daerah untuk jenis Pajak Self Assessment (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir) dan untuk jenis Pajak Official Assessment (PBB) yang dilakukan dalam dua tahap yaitu :</p> <p>Tahap I : berlaku selama 3 Bulan terhitung dari masa pajak Maret 2020 s.d masa pajak Mei 2020 Tahap II : berlaku selama 3 Bulan terhitung dari masa pajak Agustus 2020 s.d masa pajak Oktober 2020.</p>	
		<p>3. Peningkatan dan Optimalisasi</p>	<p>Beberapa upaya guna meningkatkan dan optimalisasi penerimaan Pendapatan</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha serta menekan potensi kebocoran dalam pengumpulan PAD.</p>	<p>Daerah khususnya Pajak Daerah serta untuk menekan potensi kebocoran dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pelayanan pajak antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>Disdukcapil Kota Batam terkait Pemanfaatan NIK untuk Pelayanan Pajak Daerah.</li> <li>DJPK Kanwil Provinsi Kepulauan Riau terkait Optimalisasi Peningkatan Pajak Pusat dan Pajak Daerah.</li> <li>BPN terkait Integrasi data pertanahan dengan PBB-P2 dan BPHTB</li> </ul> </li> <li>Pelaksanaan transaksi Non Tunai pembayaran pajak melalui e-billing serta Host to host untuk pembayaran PBB-P2 melalui e-commerce (Gopay, Link aja, Tokopedia, Bukalapak) dan Gerai (Indomaret/Alfamart).</li> <li>Kebijakan Insentif Pajak Daerah dalam rangka memberikan keringanan kepada dunia usaha dan masyarakat.</li> </ol>	
		<p>4. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi merebut Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat</p>	<p>1. Pada tanggal 16 Maret 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka penyiapan data Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021 untuk Tahun Anggaran 2022,</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		dengan dukungan program dan kegiatan yang berkualitas serta didukung anggaran yang cukup, sehingga DID dapat menjadi sumber pendapatan kreatif daerah, yakni memperoleh tambahan dana pembangunan melalui peningkatan prestasi.	dengan kesimpulan rapat perlu diterbitkan SK Kepala Daerah. 2. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 159/HK/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 Tentang Pembentukan TIM Penguatan Data dalam rangka pencapaian indikator pada Dana Insentif Daerah di Kota Batam. 3. Pada tanggal 27 April 2021 dilaksanakan Rapat Kerja TIM Penguatan Data dalam rangka pencapaian indikator pada Dana Insentif Daerah (DID) dengan kesimpulan adanya indikator data yang belum terupdate dengan instansi vertikal. 4. Direncanakan akan dilaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal terkait indikator yang belum terupdate.	
		5. Arah kebijakan belanja daerah tahun Perubahan APBD 2021 direkomendasikan agar difokuskan pada mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat (percepatan vaksinasi massal) dan reformasi pelayanan kesehatan, normalisasi pelayanan	Pemerintah Kota Batam telah melakukan upaya untuk mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat (percepatan vaksinasi massal) dan reformasi pelayanan kesehatan pada kebijakan belanja daerah tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan refocusing belanja kesehatan untuk vaksinasi massal yang akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2021, Selanjutnya terkait normalisasi pelayanan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		pendidikan untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan akibat tidak adanya tatap muka selama 3 semester, mempercepat pemulihan ekonomi dan pemantapan ketahanan pangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta normalisasi pelayanan umum kepada masyarakat.	pendidikan untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan akibat tidak adanya tatap muka selama 3 semester, percepatan pemulihan ekonomi dan pemantapan ketahanan pangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta normalisasi pelayanan umum kepada masyarakat telah dtuangkan dalam kebijakan belanja daerah pada APBD Tahun 2021.	
		6. Kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan Covid-19, dan selalu melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan	Terkait dengan kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan di tempat-tempat yang rawan terjadinya penularan COVID-19 dan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mengatasi Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Batam telah melakukan refocusing anggaran pada perubahan Peraturan Walikota Batam tentang penjabaran APBD Tahun 2021	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		Provinsi dalam mengatasi Pandemi Covid -19.	untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Masyarakat oleh SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan pembentukan Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di 64 Kelurahan.	
		<p>7. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.</p> <p>Perbaikan manajemen keuangan program dan kegiatan agar serapan anggaran tahun 2021 meningkat sehingga SILPA tahun berjalan tidak kembali semakin membesar setiap tahunnya.</p> <p>Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum (gagal) dilaksanakan</p>	<p>1. Surat Sekretaris Daerah Nomor 62/BPKAD-BEND/I/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Perihal Percepatan Realisasi APBD TA. 2021 Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.</p> <p>- Bahwa dikarenakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri masih belum berjalan lancar diminta kepada Setiap SKPD agar melakukan percepatan penyerapan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2021 secara manual (excel) dengan berpedoman dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Surat Sekretaris Daerah Nomor 83/BPKAD-BEND/IV/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		secara maksimal (akibat Pandemi Covid-19) dalam mendukung program unggulan daerah.	<p>- Merupakan tindak lanjut atas Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor : 903/235/Keuda tentang Tindak lanjut Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021.</p> <p>- Pemerintah Kota Batam dalam rangka mempercepat realisasi APBD TA. 2021 melakukan proses penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan SKPD tetap melakukan rekam dalam SIPD.</p> <p>3. Melakukan Online system yang terintegrasi antara BPKAD, SKPD dan Bank Mitra.</p> <p>4. Melakukan pematangan perencanaan penggunaan Digital Signature dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam rangka proses pengajuan pencairan.</p> <p>5. Meningkatkan penggunaan Cash Management System (CMS) sehingga memudahkan bendahara SKPD dalam melakukan pembayaran/pendebetn rekening bendahara.</p>	
		8. Terus meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas	Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik maka Pemerintah Kota Batam telah menyediakan layanan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selalu menyediakan informasi data/dokumen APBD kepada masyarakat secara rutin/berkala dalam <i>website</i> Pemerintah Daerah Kota Batam, agar masyarakat dapat dengan mudah cepat dan murah mengakses data APBD.</p>	<p>data/dokumen APBD kepada masyarakat secara berkala yang dapat diakses pada link <a href="https://bpkad.batam.go.id">https://bpkad.batam.go.id</a></p>	
		<p>9. Meningkatkan mutu proses dan output Musrenbang di semua tingkatan (Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota) agar arah dan kebijakan APBD tidak menyimpang dari aspirasi/kebutuhan masyarakat. Meningkatkan mutu</p>	<p>Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengikuti prioritas pembangunan di tahun berikutnya dan evaluasi pada tahun berjalan. Hasil evaluasi pasca pelaksanaan musrenbang menjadi bahan dalam melakukan perbaikan dalam menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan tahunan dan musrenbang tahun selanjutnya.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		proses dan output reses DPRD dan forum RKPD agar perencanaan daerah komprehensif dan aspiratif, sinkron antara aspirasi masyarakat, DPRD dan kebutuhan OPD.		
<b>Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah</b>				
Inspektorat Kota Batam	Sebagai OPD yang bertanggungjawab atas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Batam, Pansus melihat pelaksanaan tugas dan fungsinya masih kurang optimal. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Banyaknya OPD di Kota	1. Perlunya peningkatan dan penambahan SDM baik dari segi kualitas juga kuantitas di lingkungan Inspektorat Kota Batam.	1. Terhadap rekomendasi pansus tentang perlunya penambahan SDM baik dari segi kuantitas juga peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Batam, dapat disampaikan bahwa Inspektorat Daerah Kota Batam telah melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta mengusulkan kepada Walikota Batam melalui surat Nomor.217/INS-BTM/VI/2020 tentang Pemenuhan ASN Inspektorat Daerah Kota Batam. Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor.542 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	Batam tidak sebanding dengan jumlah tenaga Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.		Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebanyak 24 orang dengan rincian sbb: untuk JFA 20 orang dan Jabatan Pelaksana 4 orang. Untuk peningkatan kualitas SDM, telah dan akan terus mengikutsertakan ASN mengikuti Diklat Fungsional dan dan Diklat Tekhnis/Substansi setiap tahunnya sesuai kebutuhan.	
		2. Dalam menyusun program dan kegiatannya OPD ini lebih inovatif sehingga dapat menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang makin dinamis. Jangan terjebak dengan program dan kegiatan yang bersifat rutinitas semata.	2. Inspektorat Daerah Kota Batam dalam menyusun program dan kegiatan selalu mengacu dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta peraturan kementerian dalam negeri tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang setiap tahun selalu dijadikan pedoman untuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
Badan Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Sebagai OPD yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan dan leading sector dalam penyusunan dan penyajian data dokumen LKPJ tahun 2020, biarpun sudah ada langkah perbaikan namun dengan masih adanya ketidaksesuaian antara data yang disajikan dalam dokumen LKPJ tahun 2020 dengan yang disampaikan oleh OPD-OPD, termasuk tidak dilaporkannya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam dokumen LKPJ tahun 2020.	1. Meminta agar bapelitbangda mengevaluasi OPD-OPD berkenaan dengan penyajian data dan memastikan bahwa berkaitan dengan data pada LKPJ tahun depan tidak bermasalah kembali	1. Akan dilakukan evaluasi tim penyusun LKPJ Pemerintah Kota Batam bersama OPD-OPD terkait guna mengantisipasi dan memperbaiki dokumen LKPJ.	
	Terlalu lamanya Kepala Bapelitbangda menduduki jabatan tersebut, disamping melanggar peraturan	2. Terkait potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan berkenaan terlalu lamanya kepala	2. Terkait tentang jabatan kepala Bapelitbangda merupakan kewenangan prerogatif Walikota Batam, Sepanjang memenuhi kriteria dan melalui proses seleksi jabatan sehingga bukan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen ASN, juga berdasarkan hasil konsultasi Pansus ke Kemendagri bahwa praktik seperti ini akan mengganggu proses regenerasi atau kaderisasi di tubuh ASN.	bapelitbangda menduduki jabatan tersebut, agar dapat menjadi perhatian Walikota dan meminta tindaklanjut dari permasalahan ini untuk dapat disampaikan ke DPRD pada kesempatan pertama. Selanjutnya, Pansus sebagaimana hasil konsultasi ke Kemendagri akan melaporkan permasalahan ini kepada Gubernur selaku pembina Pemerintah Daerah	kewenangan Bapelitbangda untuk menentukan jabatan eselon II.	
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	OPD ini mempunyai tugas pokok manajemen pengelolaan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam, mulai dari pelayanan kepegawaian, mutasi, pengembangan SDM,	1. Perlunya penambahan anggaran kepada BKPSDM khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas SDM di lingkungan	Terkait Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM perlu disampaikan bahwa Penyelenggaraan Diklat baik yang dilakukan secara mandiri maupun dengan pola pengiriman peserta Diklat membutuhkan anggaran yang cukup besar yang saat ini anggarannya belum dapat dipenuhi secara optimal sebagaimana mestinya. Belum terpenuhinya anggaran Diklat	Terlampir bukti salinan Job Fit, Profil Kompetensi dan Rekomendasi KASN

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>serta pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Dari sisi SDM perlu dilakukan penguatan dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat lebih optimal dalam pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam.</p> <p>Pengalokasian anggaran pada OPD ini juga mesti sebanding dengan beban kerja, terutama dengan kebutuhan SDM yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui diklat. Kecilnya alokasi anggaran mengakibatkan tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas SDM di lingkungan Pemerintah</p>	<p>Pemerintah Kota Batam.</p>	<p>tersebut tentu saja terkait kemampuan keuangan daerah yang masih sangat terbatas yang semakin diperburuk dengan adanya pandemi covid 19 saat ini.</p> <p>Pandemi covid 19 menyebabkan turunnya Pendapatan Asli Daerah yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap capaian APBD Kota Batam sehingga pada akhirnya untuk mengatasi defisit anggaran maka semua program/kegiatan mengalami refocusing anggaran termasuk anggaran berkenaan Diklat SDM.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	Kota Batam. Terlebih, adanya kebijakan bahwa peningkatan kualitas SDM hanya melalui satu pintu yakni di OPD ini.			
			Namun demikian mengingat pentingnya kualitas SDM yang handal sebagai ujung tombak penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka kedepannya Pemerintah Kota Batam akan berupaya untuk memperhatikan pemenuhan anggaran terkait Pendidikan dan Pelatihan SDM di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang saat ini anggaran dan penyelenggaraannya berada di BKPSDM Kota Batam, tentu saja tetap dengan mengacu kepada kebutuhan organisasi dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.	
		2. Dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi Pansus LKPJ 2019, terkait pimpinan OPD yang telah lama menjabat (puluhan tahun) pada suatu OPD, Pansus	Terkait rekomendasi Pansus berkenaan penggantian pimpinan OPD yang sudah puluhan tahun menjabat, perlu disampaikan bahwa sesuai Pasal 133 ayat 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN disebutkan bahwa Kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun dapat diperpanjang	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>kembali merekomendasikan agar dapat diganti, sehingga terjadi regenerasi, disamping itu juga bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Manajemen ASN, tepatnya pasal 133</p>	<p>untuk menduduki jabatan berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian Kinerja;</li> <li>Kesesuaian Kompetensi;</li> <li>Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK;</li> <li>Rekomendasi KASN.</li> </ol> <p>Berdasarkan kriteria di atas, Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan evaluasi kepada seluruh kepala OPD dengan melaksanakan job fit pada tahun 2016 dengan hasil sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil tersebut maka Kepala OPD yang masih memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diperpanjang masa jabatannya pada OPD tersebut maka akan didudukkan kembali pada jabatan Kepala OPD yang sama, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan digantikan oleh pejabat baru. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa terkait adanya Kepala OPD yang sudah menjabat lebih dari 5 (lima) tahun sudah dilakukan proses evaluasi dengan mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		3. Agar BKPSDM membuat kajian dan hasil kajiannya disampaikan ke DPRD pada kesempatan pertama	Dokumen Terlampir	
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	<p>Pandemi Covid-19 yang melanda Kota Batam membuat BP2RD sebagai OPD penghasil bagi pendapatan asli daerah harus bekerja keras agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan.</p> <p>Apresiasi yang tinggi Pansus berikan kepada BP2RD, walau target pendapatan daerah tahun 2020 tidak tercapai, namun dengan langkah dan kebijakan yang tepat, dampak yang diakibatkan Pandemi Covid-19 tidak</p>	1. Perlunya penguatan dalam pengelolaan parkir tepi jalan dikarenakan potensi kebocoran yang cukup besar.	Pengelolaan parkir tepi jalan merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Terkait hal tersebut BPPRD Kota Batam selaku koordinator pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selalu berkoordinasi dengan OPD terkait, antara lain dengan melakukan rapat evaluasi pendapatan pajak dan retribusi daerah secara berkala dengan OPD penghasil.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	begitu signifikan menggerus pendapatan daerah Kota Batam, yang mana disaat yang bersamaan di daerah lain mengalami kontaksi perekonomian yang sangat luar biasa.			
		2. Perlu disegerakan pemasangan tapping box pada sejumlah wajib pajak guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan memperkecil kebocoran.	BPPRD Kota Batam selalu berkoordinasi dengan Bank Riau Kepri selaku bank mitra dalam hal kerjasama pengadaan alat perekaman data transaksi pembayaran (tapping box). Saat ini jumlah tapping box yang telah terpasang sebanyak 525 unit dan pada tahun 2021 BPPRD Kota Batam telah menyurati Bank Riau Kepri dengan mengajukan usulan untuk penambahan alat tapping box sebanyak kurang lebih 100 unit.	
		3. Agar kebocoran disejumlah obyek pajak dan retribusi daerah dapat ditekan, maka perlu dilakukan audit oleh BPKP.	Kami menyambut baik adanya rekomendasi terkait audit oleh BPKP guna mencegah kebocoran pada objek pajak dan retribusi daerah sehingga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		Disamping rekomendasi diatas, ada sejumlah rekomendasi yang terkait dengan BP2RD, tepatnya rekomendasi terkait pengelolaan keuangan daerah.	Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres pencapaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK dalam optimalisasi pajak daerah.	
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan dan aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam laporan kinerja telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan Pansus mengapresiasi atas kinerja tersebut.	1. Dalam hal kebijakan refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19 tidak melakukannya dengan pukol rata kepada semua OPD. Namun melalui kajian yang baik, sehingga didapatkan mana program dan kegiatan yang tidak perlu dan kurang penting dari masing-masing OPD yang dapat dilakukan refocussing.  Dengan kebijakan refocussing berbasis	1. Pemerintah Kota Batam melalui BPKAD mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan kepada kami atas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah berkinerja dengan baik.  2. Terkait dengan pelaksanaan refocusing tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 atas APBD Kota Batam dapat dijelaskan bahwa refocusing yang dilakukan telah mempedomani ketentuan: a. Pasal 4 Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, Pemerintah Daerah	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		data dan kajian tersebut, diharapkan kinerja dari masing-masing OPD masih dapat dioptimalkan.	menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.	
		Disamping itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pansus juga memberikan rekomendasi yang disampaikan di bagian evaluasi kinerja keuangan daerah diatas.	b. Lampiran Inmendagri No 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona virus disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, diantaranya dari hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya.	
			c. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I dan Menteri Keuangan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>R.I Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan corona virus disesase 2019 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional, yang menyatakan bahwa rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;</li> <li>2. Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;</li> <li>3. Cetak dan penggandaan;</li> <li>4. Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;</li> <li>5. Pemeliharaan;</li> <li>6. Perawatan kendaraan bermotor;</li> <li>7. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;</li> <li>8. Sewa sarana mobilitas;</li> <li>9. Sewa alat berat;</li> <li>10. Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;</li> <li>11. Jasa konsultasi;</li> <li>12. Tenaga ahli/instruktur/narasumber;</li> <li>13. Uang yang diserahkan kepada pihak</li> </ol>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			ketiga/masyarakat; 14. Makanan dan minumari, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau 15. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.	
			Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk: 1. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional; 2. Pengadaan mesin dan alat berat; 3. Pengadaan tanah; 4. Renovasi ruangan/gedung, meubelier, dan perlengkapan perkantoran; 5. Pembangunan gedung baru; dan/atau 6. Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.	
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	Sebagai OPD yang bertanggungjawab terhadap perizinan usaha dan investasi,	1. Membuat terobosan program dan kegiatan	Terobosan yang dilakukan oleh DPMPSTP Kota Batam dalam rangka menarik investasi di Kota Batam di tahun 2021, yakni dengan menyusun Rencana	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp)	<p>Dinas PM-PTSP semestinya dapat lebih inovatif dalam menyusun program dan kegiatan, terlebih dalam kondisi Pandemi Covid-19.</p> <p>OPD ini juga perlu membangun sistem yang terintegrasi dengan beberapa OPD lainnya, yang terkait dengan perizinan, baik izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya. Semisal, tidak sedikit rumah di Kota Batam yang sudah dilakukan renovasi, namun tidak melapor sehingga IMB masih mempergunakan IMB yang lama. Bila potensi ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi</p>	dalam rangka menarik investasi di Kota Batam.	Umum Penanaman Modal (RUPM), guna memberikan informasi mengenai potensi investasi daerah kepada investor dan melakukan promosi investasi melalui media sosial.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	pendapatan daerah yang cukup signifikan. Dan ini dapat terjawab dengan membangun sistem terintegrasi dengan beberapa OPD dan/atau instansi yang berkaitan.			
		2. Membangun sistem terintegrasi dengan berbagai OPD dan instansi terkait dalam kaitannya dengan perizinan.	DPMPSTSP Kota Batam telah membangun sistem terinterasi dengan BP2RD terkait dengan perizinan online, yakni data PBB yang tidak valid tidak dapat melanjutkan proses perizinan online.	
		3. Mengoptimalkan gedung milik Pemerintah Kota Batam dan tidak melakukan sewa ruangan kembali yang nilai sewanya sangat besar yakni 5,8 miliar per tahun dan hingga saat ini telah mencapai angka sekitar 22 Miliar (sejak 2017).	DPMPSTSP Kota Batam telah melakukan upaya dalam rangka memanfaatkan gedung milik Pemerintah Kota Batam, dengan adanya surat permohonan inventarisasi kebutuhan lahan di tahun 2020 Nomor : 040/DPMPSTSP.01/02/2020 tanggal 23 Februari 2020 dan tahun 2021 Nomor: 198/DPMPSTSP.01/03/2021 tanggal 26 Maret 2021.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	<p>Tahun 2020 adalah tahun dimana Pandemi Covid-19 melanda tidak hanya dunia namun juga Indonesia. sebagai salah satu OPD yang mendapat anggaran besar akibat Pandemi Covid-19, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mendapatkan tugas berat dan mulia yakni menyelenggarakan bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 disamping juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dinas sendiri.</p> <p>Berdasarkan penelusuran dan hasil rapat yang telah dilakukan, dinas sosial</p>	<p>1. Perlu membuat sebuah sistem yang terintegrasi dengan melibatkan tidak hanya instansi vertikal namun juga horizontal dalam mengatasi permasalahan sosial dan kemasyarakatan di Kota Batam khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat pra sejahtera.</p>	<p>Langkah OPD Dinsos adalah membangun sistem Aplikasi yang terintegrasi secara Online di setiap Kelurahan.data tersebut setelah dilakukan Musyawarah Kelurahan (MusKel) selanjutnya di verivikasi oleh Tim pencacah di setiap kelurahan. kemudian data tersebut di import ke Pusdatin Kemensos (SIKS-NG).</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>dan pemberdayaan masyarakat dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, tidak bersumber dari data yang valid. Hal ini terbukti bahwa tidak sinkronnya data yang diberikan oleh dinas dengan dokumen LKPJ 2020 yang merupakan dokumen pijakan yang digunakan dalam pembahasan di Pansus.</p> <p>Selain itu, dikarenakan tidak sinkronnya data tersebut membuat penyelenggaraan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 menjadi tumpang tindih pada tataran kecamatan dan kelurahan.</p>			

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Dengan adanya refocusing anggaran yang terjadi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mengakibatkan tidak tercapainya indikator, baik kinerja maupun keuangan yang telah termaktub dan terencana pada rencana strategis dan rencana kerja dinas, dan hal ini berpengaruh langsung pada pencapaian RPJMD Kota Batam 2016-2021.</p> <p>Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Batam bagi masyarakat pra sejahtera, sampai dengan saat ini belum valid dan pasti. Koordinasi antara tim pencacah di tingkat</p>			

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	kelurahan dengan lurah dan camat tidak terjalin baik. Selain itu, keterbatasan jumlah dari tim pencacah membuat verifikasi dan validasi DTKS tidak berjalan maksimal.			
		2. Peningkatan kualitas SDM di dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan <i>right man in the right place</i> .	Untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM dimaksud sudah terpadu di OPD BKPSDM (Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai)	
		3. Meminta kepada Inspektorat untuk dapat melakukan pembinaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan di OPD ini, dan hasilnya dapat dilaporkan ke DPRD pada kesempatan pertama	3. Inspektorat Daerah Kota telah melakukan pembinaan berupa consulting dan rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Kota Batam juga telah melakukan pendampingan dalam bentuk monitoring agar penyelenggaraan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat terdampak Covid-19 sesuai ketentuan yang berlaku.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam	Dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19, terdapat beberapa langkah dan kebijakan strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, antara lain: melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di bidang perdagangan dan perindustrian; menerapkan pasar online; melakukan jaring pengamanan sosial; bekerjasama dengan distributor sembako memberikan sembako kepada masyarakat yang terpapar Covid-19; himbauan kepada para pengusaha untuk tidak melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok; membuat surat kepada bea cukai agar IKM dapat mendapatkan bahan baku dengan mudah	1. Terkait pemberian sembako gratis kepada masyarakat terdampak Covid-19 sebagai bagian dari kegiatan jaring pengamanan sosial yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat, Disperindag perlu menjalin sinergitas dan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, kecamatan dan kelurahan dalam memvalidasi data masyarakat pra sejahtera (masyarakat miskin) agar tumpang tindih data dapat teratasi dengan baik.	1. Apresiasi Pansus LKPJ DPRD Kota Batam terkait kebijakan strategis yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinas Perindag) Kota Batam dalam menghadapi dampak pandemi Covid19 kami haturkan terima kasih, semoga senantiasa menjadi mitra kerja yang terus bersinergi dan bersifat membangun. Begitu juga masukan yang diberikan melalui rekomendasi terkait data penerima sembako gratis yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2020.  Dalam hal ini kami sangat sepakat dengan Pansus bahwa kedepan terkait kegiatan sembako gratis untuk data penerima sembako gratis harus dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk Kecamatan dan Kelurahan. Namun perlu kami laporkan kembali kepada Pansus bahwa kegiatan sembako gratis yang Dinas Perindag laksanakan pada Tahun Anggaran 2020 tersebut merupakan relokasi kegiatan dan anggaran yang semula merupakan sembako murah (bersubsidi) menjadi sembako gratis, dikarenakan status darurat pandemi Covid19 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia (terlepas dan berbeda	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>h;melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DID (dana insentif daerah); dan bekerjasama dengan Pertamina dan BRI dalam penyaluran BBM bersubsidi.</p> <p>Langkah dan kebijakan strategis tersebut, Pansus berikan apresiasi mengingat masa Pandemi merupakan masa yang sulit khususnya bagi sektor perindustrian dan perdagangan.</p>		<p>dengan sembako gratis yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat), sehingga data penerima sudah Dinas Perindag terima dari Kelurahan dan Kecamatan paralel saat proses persiapan pelaksanaan sembako murah.</p>	
		<p>2. Terkait kelangkaan BBM yang terjadi setiap tahun, walau hal ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Disperindag hendaknya sudah menyiapkan</p>	<p>2. Dengan ditetapkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya termaktub hal-hal yang menjadi pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perindag Kota Batam harus mampu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		langkah strategis sebagai antisipasi dari kelangkaan BBM. Kejadian yang berulang sepertinya sudah cukup membuat dinas belajar dalam mengatasi permasalahan ini.	dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan BUMN/BUMD termasuk dengan PT. Pertamina terkait ketersediaan pasokan BBM dan LPG untuk Kota Batam. Setiap tahunnya Dinas Perindag senantiasa menyampaikan surat penambahan kuota BBM dan LPG kepada PT. Pertamina dan ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi. Besar harapan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi memberikan atensi yang diharapkan dan dibutuhkan Kota Batam dengan pertimbangan peningkatan penduduk dan menjadi mayoritas penduduk terbesar di Provinsi Kepri.	
		3. Disperindag Kota Batam harus segera melakukan tera ulang terkait meteran air dan meteran listrik di perumahan-perumahan. Hal ini dikarenakan sudah cukup lama tidak dilakukan tera, sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat,	3. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan bidang tertib niaga, tertib ukur, kemetrologian dan perlindungan konsumen, serta menghitung prognosis pendapatan, Dinas Perindag Kota Batam sudah beberapa kali mengundang rapat dan menyampaikan surat terkait meteran air dan meteran listrik kepada perusahaan pengelola air dan listrik di Kota Batam. PT. PLN Batam bersedia untuk dilakukan tera/ tera ulang meteran dan sudah menyiapkan perhitungan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		disamping dapat menjadi potensi pendapatan daerah Kota Batam.	untuk tera/ tera ulang, namun karena keterbatasan dana maka kegiatan dilakukan bertahap. Sedangkan perusahaan air Kota Batam yang saat itu masih dikelola PT. ATB merespon dengan cakupan pelayanan yang luas, maka proses penggantian semua meteran yang kadaluarsa sedang dilakukan dan memerlukan waktu untuk menyelesaikan penggantian semuanya, namun dengan berubahnya pengelola air di Kota Batam menjadi PT. Moya, maka hal yang sama kami sampaikan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada PT. ATB.	
Dinas Pendidikan Kota Batam	Sebagai OPD dengan pengguna anggaran terbesar yakni 20% dari APBD Kota Batam dan sebagai OPD penyelenggara urusan pemerintahan dasar, Dinas Pendidikan juga terkena dampak dari	1. Dinas Pendidikan perlu membuat sebuah perencanaan yang matang untuk setiap pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.	Dinas Pendidikan Kota Batam menyusun perencanaan berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Batam yang merupakan penerjemahan dari visi misi Walikota terpilih yang diuraikan dalam dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan. Penyusunan program dan kegiatan prioritas disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Pandemi Covid-19, banyak program kegiatan yang difocusing. Selain itu, pelaksanaan sekolah daring, gejala PPDB setiap tahunnya, keterbatasan jumlah guru, kesejahteraan tenaga kependidikan, tunda bayar, dan berbagai masalah lainnya menambah sejumlah masalah dan catatan atas kinerja dari Dinas Pendidikan.</p>		<p>Untuk permasalahan tunda bayar, kebijakan Dinas Pendidikan di tahun 2021 tidak ada kegiatan pembayaran pekerjaan yang ditundabayar dari pekerjaan tahun 2020. Hal ini dikarenakan telah dilakukan refocusing anggaran. Untuk tahun 2021, penyusunan perencanaan berdasarkan anggaran yang tersedia. Ketika ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk kegiatan dikarenakan refocusing. Kebijakan Dinas Pendidikan tidak melaksanakan kegiatan tersebut.</p>	
		<p>2. Tidak hanya guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan seyogyanya meningkatkan kualitas tenaga teknis bidang perencanaan agar berbagai permasalahan yang ada tidak selalu terjadi menjadi pengulangan.</p>	<p>a. Untuk permasalahan ketersediaan Pendidik di satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan menyusun analisa kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan dan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Batam dalam pemenuhan kebutuhan Pendidik. Kebijakan yang diambil adalah dengan mengadakan penerimaan ASN melalui P3K.</p> <p>b. Dinas Pendidikan merencanakan melakukan pengusulan Peningkatan</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			Kapasitas SDM yang menangani bidang Perencanaan ke BKPSDM Kota Batam, baik segi kualitas maupun kuantitas SDM.	
		3. Dinas Pendidikan perlu segera merencanakan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar kualitas pendidikan di Kota Batam dapat terjaga dengan baik.	Dalam merumuskan kebijakan sekolah tatap muka Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 Kota Batam. Sehingga penetapan pelaksanaan sekolah tatap muka tetap mendapatkan masukan dan pertimbangan SATGAS. Dasar pelaksanaan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di sekolah berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020 Nomor 612 TAHUN 2020 Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020 Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan	Surat Dinas Pendidikan No.469/419.5/DISDIK/II/2021 Perihal Pemberian Izin Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap pada Satuan Pendidikan.

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).	
		Beberapa rekomendasi berkaitan dengan Dinas Pendidikan juga disampaikan di evaluasi kinerja ekonomi makro dan pembangunan sosial diatas.	Sudah ditanggapi di atas.	
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Batam	Refocussing anggaran akibat Pandemi Covid-19 membuat dinas pemuda dan olahraga Kota Batam tidak dapat menyelenggarakan program dan kegiatannya. Hal ini tentu berpengaruh langsung pada pencapaian RPJMD Kota Batam 2016 - 2021.	Agar dana hibah bantuan yang diperoleh KONI Kota Batam untuk dapat dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan ditembuskan ke Dispora dan DPRD Kota Batam. Harapannya, penggunaan uang negara dapat dilakukan secara transparan dan Dispora dapat mengetahui secara detail penyelenggaraan olahraga di Kota Batam	1. Setiap tahun anggaran KONI Kota Batam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Hibah KONI kepada Walikota Batam c.q. BPKAD Kota Batam dan ditembuskan kepada Dispora Kota Batam. Untuk laporan pertanggungjawaban hibah KONI TA. 2021 akan ditembuskan kepada Ketua DPRD Kota Batam.  2. Hibah KONI Tahun 2020 juga telah mengalami rasionalisasi dari Anggaran APBD Murni sebesar Rp.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Namun demikian, kegiatan yang bersumber dari APBN khususnya hibah tetap terselenggara dan tidak di-refocussing. salah satunya adalah bantuan dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam. Sebagai OPD yang melakukan review terhadap proposal hibah sudah sepatutnya Dispora juga mendapatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran hibah tersebut. Sehingga, Dispora dapat mengetahui secara lengkap dan rinci dari penggunaan uang negara bidang keolahragaan tersebut.</p>	<p>sehingga dapat terwujudnya sinergitas yang baik antara KONI Kota Batam dengan Dispora.</p>	<p>7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam	<p>Sebagai daerah yang memiliki kekhasan melayu, Kota Batam sudah selayaknya mengedepankan budaya melayu (dengan tanpa mengesampingkan budaya-budaya lainnya yang ada di Kota Batam) dalam meningkatkan sektor pariwisata. Namun sepertinya hal ini tidak terjadi. Terbukti sangat jarang ada event kegiatan berbasis budaya di Kota Batam, salah satu sebabnya karena alokasi anggaran bidang kebudayaan dari tahun ke tahun selalu kecil.</p> <p>Kecilnya alokasi anggaran juga menjadi perhatian Pansus LKPJ tahun lalu dan menjadi rekomendasi agar ditingkatkan</p>	<p>1. Bidang kebudayaan agar dipisahkan dari OPD ini, sehingga dapat berdiri sendiri menjadi sebuah dinas dan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.</p>	<p>Bidang kebudayaan dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam telah melakukan berbagai program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya.</p> <p>Meskipun anggaran terbatas bidang kebudayaan telah melakukan pengembangan nilai2 kebudayaan dan mengimplementasikan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu diantaranya dengan mensosialisasikan ke seluruh hotel, restoran, pelabuhan dan bandara serta fasilitas pelayanan publik di Kota Batam untuk memperdengarkan musik melayu, menyajikan masakan melayu dan menggunakan busana melayu. Sebagian hotel dan bandara serta fasilitas publik lainnya sudah menerapkan hal tersebut.</p> <p>Selain itu dalam pengembangan kesenian melayu event Kenduri Seni Melayu terus dilaksanakan setiap tahun dan masuk dalam Calender of Event (CoE) Nasional dan menghadirkan kesenian melayu dalam setiap penyelenggaraan event2 di Kota Batam. Bidang Kebudayaan juga telah memanfaatkan Ex Gedung Astaka MTQ</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>besarannya, namun hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti. Disamping itu, DPRD Kota Batam juga sudah sering memberikan masukan dan mendorong kepada Pemerintah Kota Batam guna melakukan penambahan alokasi anggaran untuk bidang kebudayaan pada OPD ini.</p> <p>Pandemi Covid-19 yang menghantam tidak hanya dunia, namun juga Indonesia khususnya Kota Batam membuat sektor pariwisata terkena dampak yang paling signifikan. Banyak pusat pariwisata tutup dan mengakibatkan banyak pekerja sektor</p>		<p>Nasional sebagai Museum Batam Raja Ali Haji dan telah ditetapkan melalui Perwako No.18 Tahun 2021 tentang Pembentukan UPTD Museum Batam Raja Ali Haji. Selain itu sebagai upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi telah ditetapkan Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Batam sebanyak 7 orang dan telah lulus ujian sertifikasi Ahli Cagar Budaya Tingkat Pratama.</p> <p>Untuk menerapkan ungkapan 'miskin struktur kaya fungsi' bidang kebudayaan dapat memaksimalkan fungsi dan perannya terlebih bila didukung dengan anggaran yang memadai di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>pariwisata menjadi pengangguran dan tidak memiliki pekerjaan, kerugian ditaksir milyaran juga dirasakan oleh para pengusaha bidang pariwisata. Untuk itu, Pemerintah Pusat tidak tinggal diam dan memberkan stimulus tidak hanya kepada para pekerja namun juga pengusaha bidang pariwisata melalui pemberian dana hibah sebagai bantuan akibat Pandemi Covid-19. Melalui Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dana hibah langsung disalurkan kepada sektor usaha bidang pariwisata.</p>			
		<p>2. Meminta kepada Inspektorat untuk masuk dan mengaudit penggunaan dana hibah</p>	<p>2. Menanggapi rekomendasi pansus agar Inspektorat Daerah Kota Batam masuk dan mengaudit Dana Hibah Pariwisata dapat disampaikan bahwa mengacu</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		bagi pelaku pariwisata tersebut dan melaporkan kepada DPRD pada kesempatan pertama	Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. KM/704/PL.07.02/M-K/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor. KM/694/PL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Tekhnis Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020 bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan internal atas pelaksanaan Program Hibah Pariwisata Tahun 2020 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.23 Tahun 2020 pasal 25). Sementara Inspektorat Daerah Kota Batam bertugas melakukan Reviu atas pelaksanaan Program Hibah pariwisata .	
	Berdasarkan hasil rapat Pansus bersama dengan OPD, ditemukan fakta bahwa: a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak memiliki data yang valid terhadap pelaku usaha		a. Data pelaku usaha bidang pariwisata terkait jumlah Hotel dan Restoran dan jumlah pekerja diberbagai sektor usaha pariwisata kami sampaikan sebagaimana data terlampir.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	bidang pariwisata yang tersebar di Kota Batam dan jumlah pekerja bidang pariwisata yang terdampak akibat Pandemi Covid-19;			
	b. Tidak adanya sinergitas yang baik antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menanggulangi para pekerja yang terdampak Covid-19;		b. Terkait data jumlah pekerja yang terdampak Covid 19 kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Adapun data jumlah pekerja yang terdampak Covid 19 kami sampaikan sebagaimana data terlampir.	
	c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat menjelaskan secara rinci dan jelas terkait pemberian dana hibah kepada para pelaku usaha bidang pariwisata sebagai bantuan stimulus dari Pemerintah Pusat. Dana hibah sebesar Rp.		c. Sesuai surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-244/MK.7/2020 hal penetapan pemberian hibah Pariwisata TA 2020 tanggal 12 Oktober 2020. Kota Batam mendapat alokasi dana hibah Pariwisata TA 2020 sebesar Rp. 69.667.720.000. Berdasarkan keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor : KM/704/DL.07.02/M-K/2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata, Kota Batam memenuhi kriteria sebagai daerah penerima hibah pariwisata yaitu sebagai	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	69 Miliar tidak dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik kepada para pelaku pariwisata di Kota Batam;		kota yang memiliki lebih dari 15% PAD berasal dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) merupakan daerah destinasi Brending pariwisata daerah dengan kegiatan yang termasuk kedalam 100 Calendar of Events (Kenduri Seni Melayu masuk dama 100 COE nasional). Dana hibah pariwisata yang di alokasikan sesuai Juknis 70% dialokasikan untuk bantuan langsung kepada industri Hotel dan Restoran dan 30 % untuk pemerintah daerah digunakan untuk penaganan dampak ekonomi dan sosial karena Pandemi Covid19 pada pelaku pariwisata. Secara ringkas alokasi dana hibah pariwisata TA 2020 Kota Batam adalah sebagai berikut:	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.																									
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI																											
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Uraian</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Alokasi hibah pariwisata</td> <td>69.667.720.000</td> <td>50.494.681.494</td> <td>pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah</td> <td>48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032</td> <td>28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)</td> <td>sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/X1/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemerintah Kota Batam (30 %)</td> <td>20.900.316.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam</td> <td>11.808.556.000</td> <td>9.816.727.786,70</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan	1	Alokasi hibah pariwisata	69.667.720.000	50.494.681.494	pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494	2	Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah	48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032	28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)	sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/X1/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota	3	Pemerintah Kota Batam (30 %)	20.900.316.000				Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	11.808.556.000	9.816.727.786,70		
NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan																									
1	Alokasi hibah pariwisata	69.667.720.000	50.494.681.494	pencairan tahap I Rp. 34.833.860.000  pencairan tahap II Rp. 15.660.821.494 total pencairan Rp. 50.494.681.494																									
2	Alokasi untuk industri Hotel dan Restoran 70 % dari alokasi dana hibah	48.767.404.000 jumlah hotel : 222 jumlah restoran : 810 total : 1032	28.406.302.990,51 yang memenuhi syarat hotel : 72 restoran : 35 total : 107 realisasi hotel : 71 restoran : 33 total : 104 (1 hotel dan 2 restoran mengundurkan diri.)	sesuai Perwako No. 68 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan hibah pariwisata kepada industri hotel dan restoran di Kota Batam TA 2020  sesuai SK Walikota Batam nomor Kpst.425/HK/X1/2020 tentang pemberian hibah kepada industri hotel dan restoran di Kota																									
3	Pemerintah Kota Batam (30 %)	20.900.316.000																											
	Alokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	11.808.556.000	9.816.727.786,70																										
			<p>Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa sesuai petunjuk teknis hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa hotel dan restoran yang berhak menerima dana hibah adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>1. Hotel dan restoran sesuai data wajib pajak hotel dan restoran tahun 2019 (data</p>																										

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>di BP2RD yang telah diaudit BPK tahun 2019)</p> <p>2. Hotel dan restoran yang masih berdiri dan beroperasi hingga pelaksanaan hibah pada agustus 2020.</p> <p>3. Hotel dan restoran yang memiliki perijinan berusaha yaitu TDUP yang masih berlaku.</p> <p>4. Hotel yang membayar dan memiliki bukti pembayaran PHPR pada tahun 2019.</p>	
			<p>Berdasarkan kriteria tersebut maka alokasi dana yang sudah dihitung untuk semua hotel dan restoran yang telah membayar pajak sebanyak 1032, hanya 107 hotel dan restoran yang memenuhi syarat dan berhak menerima dana hibah pariwisata TA 2020 dengan 104 hotel dan restoran. Sehingga alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 48.767.404.000 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 28.406.302.990.51</p>	
	d. Bidang kebudayaan bukan menjadi prioritas utama dalam pengembangan		d. Dengan anggaran yang ada bidang Kebudayaan tetap menjadi prioritas. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya berbagai program dan kegiatan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	pariwisata di Kota Batam, hal ini terlihat dari kecilnya alokasi anggaran.		kebudayaan termasuk penyelenggaraan event Kenduri Seni Melayu, terwujudnya Museum Batam Raja Ali Haji, antusiasme para pelaku pariwisata dalam menyemarakkan budaya dan seni musik Melayu pada setiap kesempatan dan penyelenggaraan event yang dilaksanakan. Ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Kedepan kami mengajukan anggaran untuk bidang kebudayaan lebih dari alokasi anggaran Tahun 2020 agar dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan objek-objek kebudayaan yang tertuang dalam Pokok Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Batam.	
Dinas Pertanahan Kota Batam	Setelah dilakukan refocussing anggaran, alokasi anggaran untuk OPD ini pada tahun 2020 hanya sebesar kurang lebih 600 juta.  Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah Kota	Agar Dinas Pertanahan sebaiknya dilebur saja ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan seperti itu diharapkan akan lebih efektif dan efisien dari sisi kinerja dan pemanfaatan anggaran.	Berdasarkan Pasal 12 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Pertanahan.  Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 menetapkan 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Batam tidak memberikan perhatian terhadap OPD ini atau dengan kata lain keberadaan OPD ini tidak terlalu “dibutuhkan” oleh Pemerintah Kota Batam.</p> <p>Disamping itu, secara tugas dan fungsi OPD ini juga tidak terlalu signifikan, sebab hanya menyangkut persoalan pertanahan di Kota Batam. Sementara secara kewenangan untuk pengalokasian lahan adalah kewenangan dari BP Batam.</p>		<p>dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>Dinas Pertanahan Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.</p> <p>Berdasarkan Perwako Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan, pada Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat 3 bidang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Penatagunaan Dan Pendayagunaan Tanah,</li> <li>2. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah</li> <li>3. Bidang Pengawasan Pertanahan Dan Penanganan Masalah Pertanahan.</li> </ol> <p>Tugas Dinas Pertanahan Kota Batam yang didukung dengan sistem penganggaran APBD adalah sebagai berikut:</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>1. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua</p> <p>2. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam</p> <p>3. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat.</p> <p>Selain pelaksanaan kegiatan yang didukung dengan anggaran APBD diatas, terdapat juga beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai berikut:</p> <p>1. Memberikan pertimbangan teknis menyangkut pemanfaatan lahan untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Kota Batam di wilayah mainland dan hinterland</p> <p>2. Melakukan analisa kebutuhan lahan dan pengalokasian lahan untuk pembangunan insfrastruktur Pemerintah Kota Batam</p> <p>3. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti Sekolah, Puskesmas, Jalan, tanah makam, dll</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>4. Melakukan survey dan peninjauan lapangan terkait pemanfaatan lahan di Kota Batam</p> <p>5. Melakukan mediasi terhadap permasalahan tanah di Kota Batam</p> <p>6. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penatagunaan, pemanfaatan, dan pengadaan lahan di Kota Batam.</p>	
			<p>Selain tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas, seluruh kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam kecuali yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.</p> <p>Mengingat pentingnya penyelesaian urusan Pertanahan di daerah, maka Dinas Pertanahan untuk tetap</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			dipertahankan sebagai salah satu OPD di lingkungan Kota Batam.	
Dinas Kesehatan Kota Batam, Puskesmas Dan Rsud Embung Fatimah	<p>Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib, namun demikian pelayanan kesehatan di Kota Batam dapat kita rasakan masih jauh dari harapan. Puskesmas sebagai ujung tombak, semestinya memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan, hal ini menandakan pelayanan kesehatan yang dilakukan masih harus ditingkatkan. Disisi lain, jumlah puskesmas juga harus terus ditingkatkan sehingga sesuai</p>	<p>Agar Dinas Kesehatan untuk melaksanakan amanat perda penyelenggaraan kesehatan dengan sebaik-baiknya, dan terus meningkatkan koordinasi antara dinas kesehatan, puskesmas dan RSUD, dengan harapan terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Batam.</p>	<p>Dinas Kesehatan telah menyusun perencanaan untuk pembangunan Puskesmas setiap tahunnya sebanyak 1-2 unit setiap tahunnya dengan lokus diutamakan daerah yang memiliki ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk yang tinggi. Tahun 2022 sudah direncanakan 1 unit untuk pembangunan di kecamatan Sagulung.</p> <p>Dinas kesehatan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan penambahan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia dan meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan melalui peningkatan akreditasi Puskesmas.</p> <p>Berkenaan dengan pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2020, tidak dilaksanakan sama sekali karena pandemi Covid-19, dengan demikian realisasi keuangan dan realisasi fisiknya adalah 0%.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>dengan rasio ideal penduduk yang harus dilayani.</p> <p>Kota Batam telah memiliki Perda nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, dan didalamnya telah mengatur berbagai norma terkait penyelenggaraan kesehatan di Kota Batam. Melihat fakta pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan, menegaskan bahwa pelaksanaan perda penyelenggaraan kesehatan tidak berjalan dengan baik.</p> <p>Selanjutnya, ditemukan dalam pembahasan Pansus bahwa terdapat dana sebesar Rp. 800</p>			

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>an juta yang telah dipergunakan berkenaan dengan akreditasi puskesmas, namun pelaksanaan akreditasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ini tentu sangat disayangkan, dikarenakan kinerja tidak tercapai (0%) tapi penggunaan anggaran telah 100%. Dan, sayangnya permasalahan seperti ini lolos dari pengawasan Inspektorat. setelah dikonfirmasi ke Inspektorat ternyata mereka tidak melakukan pengawasan.</p>			
		<p>Kepada Inspektorat untuk dapat melakukan audit atas penggunaan dana Rp 800 an juta di Dinas Kesehatan dan melaporkan hasil</p>	<p>Menanggapi catatan pansus tentang pelaksanaan kegiatan akreditasi Puskesmas sebesar Rp.800 an juta, tidak dapat dilaksanakan dan permasalahan seperti ini lolos dari pengawasan Inspektorat Daerah Kota</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		auditnya kepada DPRD pada kesempatan pertama.	Batam. Bersama ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Dinas Kesehatan Kota Batam tidak memasukkan kegiatan dimaksud kedalam Register Risiko sebagai kegiatan yang mempunyai risiko tinggi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor.23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021; dengan demikian, Inspektorat Daerah Kota Batam berasumsi kegiatan tersebut tidak memiliki kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga menjadi tanggung jawab OPD terkait.	
Dinas Perhubungan Kota Batam	Transportasi di Kota Batam secara umum sudah cukup baik, namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan, seperti masih adanya kendaraan transportasi umum yang sudah tidak layak namun masih beroperasi, selanjutnya pelaksanaan uji kendaraan bermotor	Agar dinas perhubungan agar segera menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu dengan segera melakukan kajian atas sistem transportasi Kota Batam dan melaporkannya ke DPRD pada kesempatan pertama.	1. Masih beroperasinya kendaraan Angkutan Umum yang sudah tidak layak.  Kendaraan umum yang sudah tidak layak, terbagi dalam 2 kategori, yaitu :  a. Tidak layak operasi sebab telah melampaui batas usia operasi.  b. Tidak layak operasi sebab kondisi kendaraan memang mengalami kerusakan meskipun masih termasuk dalam batasan layak usia operasi.	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	(KIR) mesti dilaksanakan dengan rutin dan menysasar kepada sebanyak mungkin kendaraan di Kota Batam.		<p>Upaya yang dilakukan adalah :</p> <p>a. Menghimbau kepada pemilik kendaraan melalui badan usaha pada saat rapat koordinasi</p> <p>b. Menghimbau kepada pemilik kendaraan pada saat memasuki terminal</p> <p>c. Melakukan razia hunting bersama Satlantas Polresta Bareleng</p> <p>ntuk razia secara stationary belum dapat dilaksanakan sebab petugas Dishub hanya boleh menghentikan dan memeriksa kendaraan di jalan dengan didampingi oleh petugas Kepolisian.</p> <p>Sedangkan dari Kepolisian sendiri (Satlantas) belum ada arahan untuk melakukan razia secara terpusat maupun secara mandiri disebabkan kondisi pandemic saat ini.</p> <p>d. Kendaraan yang telah habis usia operasi tidak dilakukan lagi pengujian kendaraan bermotor, sedangkan untuk kendaraan yang mengalami kerusakan meskipun masih termasuk dalam batasan layak usia operasi tidak lulus uji dan</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>diarahkan untuk memperbaiki kerusakannya.</p> <p>2. Pengujian Kendaraan Bermotor</p> <p>Pelayanan Pengujian kendaraan bermotor di Dishub Kota Batam dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja sebab merupakan salah satu tupoksi Dishub dalam sektor pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Bahwa Dinas Perhubungan Kota Batam telah melakukan himbauan kepada pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Turun langsung ke perusahaan Angkutan</li> <li>b. Rapat dengan badan usaha Angkutan</li> <li>c. Himbauan di terminal</li> <li>d. Himbauan melalui media sosial.</li> </ol>	
			<p>Pengujian kendaraan bermotor terus berbenah dalam hal pelayanan dan system pengujian, dimana telah menggunakan system pembayaran non</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			tunai dan menerapkan system smart card yang terintegrasi langsung kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan juga selalu meminta arahan dari Balai Pengelola Transportasi darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri dalam hal peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor khususnya regulasi tentang penerapan Normalisasi kendaraan yang over dimensi dan over load (ODOL).	
	Kemudian, trans batam yang perlu ditingkatkan dari sisi jumlah dan penambahan trayeknya, sehingga dapat melayani sebanyak mungkin masyarakat Kota Batam.		Saat ini Bus Trans Batam sudah beroperasi di 8 koridor dr 10 koridor yg direncanakan. Di 8 koridor ini bus beroperasi dari jam 6 pagi sd jam 6 sore dg waktu tunggu bus rata 30 menit Utk membuka koridor baru dan menambah jam operasional dibutuhkan setidaknya 10 bus tambahan berikut biaya operasional yang lumayan besar, karena keterbatasan dana APBD maka pembukaan Koridor baru belum dapat direalisasikan, mengingat sekarang tdk ada program bantuan bus hibah dari kementerian.	
	Selanjutnya, pengelolaan parkir harus dikelola dengan		Pengelolaan Parkir di Kota Batam untuk pengelolaan pemungutan retribusi masih secara manual khususnya pada parkir	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	baik dan paripurna. bila parkir ini dikelola dengan baik, maka akan menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup signifikan.		OTS ( Pelayanan parkir dengan Juru Parkir), Dinas Perhubungan melalui UPTD Pelayanan Parkir saat ini berupaya mengelola sistem pungutan retribusi parkir dari manual menjadi non tunai dengan menggunakan QRIS bekerjasama dengan Bank-bank Kas Daerah Kota Batam di bawah koordinasi Bank Indonesia khususnya yang telah siap mengelola sistem pungutan layanan parkir secara Non Tunai baik secara sistem dan aturan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	Berbagai permasalahan transportasi di Kota Batam akan dapat dijawab dan diselesaikan melalui pembangunan sistem transportasi Kota Batam, yang ini merupakan rekomendasi Pansus LKPJ tahun lalu yang hingga saat ini tidak ditindaklanjuti. atas tidak ditindaklanjutinya	Selanjutnya, untuk kekosongan Kepala Dinas Perhubungan agar kiranya dapat segera diisi dengan kepala dinas definitif.	Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Btam akan ditata dengan sistem BRT (Bus Rapid Transit) dan ramah lingkungan, seperti di Bandung, Semarang , Pekanbaru dan Makasar. Melalui MOU antara Kementerian Perhubungan, Provinsi Kepri dan Kota Batam, Kota Batam telah ditunjuk sebagai salah satu kota dengan Program Sutrinama dan Indo Bus, yaitu satu program transportasi yang menempatkan angkutan bus dengan pola jalur khusus seperti Trans Jakarta. Tindak Lanjut MOU tersebut penyusunan dokumen pra FS	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	rekomendasi tersebut, tentu sangat disesalkan. Dan menetapkan kepala dinas definitif.		<p>telah dirampungkan pada tahun 2020 dan saat ini diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 Team akan menyelesaikan dokumen FS.</p> <p>Tindak lanjut dari dokumen FS tersebut maka akan dijadikan Blue Print Bappenas untuk menjadi prioritas pembangunan yang selanjutnya akan dicarikan pembiayaan dr Pemerintah Pusat dan sharing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota untuk Fisiknya.</p> <p>Dengan realisasi sistem BRT ini angkot-angkot yang ada saat ini akan ditata dengan sistem trayek feeder.</p> <p>Sehubungan dengan posisi kepala Dinas Perhubungan yang sedang kosong, maka Pemerintah Kota Batam akan mengisi posisi tersebut diwaktu yang tepat sesuai dengan ketentuan pasca pelantikan kepala daerah.</p>	
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Kota Batam sebagai daerah industri dengan banyaknya perusahaan dan pekerja, tentu membutuhkan pengawasan hubungan	1. Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dengan Provinsi Kepri berkenaan dengan pelaksanaan	Dinas Tenaga Kerja telah melakukan koordinasi dengan fungsi pengawasan hubungan industrial, dengan melakukan pertemuan secara bulanan antara	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>industrial yang baik. Sebab, sejak kewenangan pengawasan “diambil alih oleh provinsi” praktis pengawasan pelaksanaan hubungan industrial sangat lemah di Kota Batam.</p> <p>Disamping itu, tingginya permasalahan hubungan industrial juga mengharuskan adanya ketercukupan tenaga mediator dari Dinas Tenaga Kerja.</p> <p>Banyaknya pekerja yang dirumahkan dan di PHK sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, tentu membutuhkan perhatian yang lebih tinggi dari Dinas Tenaga Kerja.</p>	<p>fungsi pengawasan hubungan industrial. Agar berbagai kasus hubungan industrial dapat ditekan dan diselesaikan dengan baik.</p>	<p>mediator dengan pegawai pengawas provinsi.</p>	
		<p>2. Dinas Tenaga Kerja perlu segera menambah tenaga</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja telah membuat usulan Diklat Teknis Mediator melalui BKPSDM sebanyak 5 (lima) orang.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		mediator sehingga rasio antara jumlah tenaga kerja dengan banyaknya perusahaan di Kota Batam dapat terpenuhi.	Surat Nomor : B.574/TK-1/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021	
		3. Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pelatihan bagi masyarakat harus sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Jangan terkesan asal berjalan dan untuk menghabiskan anggaran semata. Harus berbasis data dan kajian serta diusahakan output dari pelatihan tersebut diorientasikan untuk dapat melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru.	Dalam merencanakan program pelatihan baik yang bersifat pencaker maupun peningkatan tenaga kerja kami meminta masukan dari forum pemagangan dan pelaku industri HILSI (Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia), BSOA (Batam Shipyard Offshore Association, IPSM (Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia), tentang pelatihan yang dibutuhkan oleh dunia industri, selain itu Dinas Tenaga Kerja juga mengadakan Training Need Analysis (TNA) bekerjasama dengan HRD Perusahaan untuk mendapatkan program pelatihan dan kompetensi.	
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Sebagai daerah industri, persoalan	1. Agar segera melakukan upaya	Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mempunyai Tenaga Pengawas	Terlampir

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>lingkungan hidup di Kota Batam sangat kompleks dan dinamis. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola persoalan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar dan merugikan masyarakat Kota Batam secara luas.</p> <p>Disamping itu, permasalahan sampah juga membutuhkan perhatian yang lebih serius dari dinas lingkungan hidup.</p> <p>Dipakainya puluhan truck yang tidak layak jalan oleh dinas dalam mengangkut sampah,</p>	<p>memenuhi tenaga pengawasan lingkungan. sehingga persoalan lingkungan hidup di Kota Batam dapat terpantau dan terawasi secara baik.</p>	<p>sebanyak 18 orang dimana hanya 2 orang PPNS dan 2 orang yang telah mengikuti Diklat PPLHD untuk mengawasi sekitar 2000 kegiatan industri.</p> <p>Demi memenuhi Tenaga Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengusulkan anggaran untuk Diklat PPLHD 5 (Lima) tahun kedepan sebanyak 25 orang. Dimana tiap tahunnya 5 orang. Dan mengusulkan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 10 orang.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	adalah contoh yang tidak baik dan bukti bila pengelolaan sampah belum optimal di Kota Batam.			
		2. Agar membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan profesional dengan memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk tenaga pendukungnya.	Terkait sarana dan prasara yang tersedia saat ini tidak memadai dikarenakan kondisi armada yang ada saat ini mengalami kerusakan berat dan ringan terutama pada armada becak motor kecamatan dan armada yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi saat ini ada 20 Amrol dan 7 Dumtruck yang mengalami rusak berat dan ringan sehingga saat mempengaruhi pelayanan pengangkutan sampah dan tercapainya target ritase dan tonase sampah yang di sebab kan oleh kemampuan operasional masing-masing kendaraan tidak bekerja secara maksimal. Kerusakan meliputi kerusakan fisik, mesin kendaraan. Sehingga di butuhkan peremajaan armada yang telah mengalami kerusakan dan penambahan unit baru untuk mengakomodir objek pelayanan baru yang terus berkembang di Kota Batam.	Terlampir

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>3. Agar segera membuat kajian mengenai laboratorium lingkungan di Kota Batam sebagai amanat perda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Atas ketiga rekomendasi tersebut, untuk dapat dilaporkan ke DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>Berdasarkan kajian UPTD laboratorium DLH Kota Batam maka dapat kami simpulkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kapasitas personil laboratorium Lingkungan (SDM)</li> <li>2. Ketersediaan peralatan dan bahan kimia untuk pengujian parameter yang akan diakreditasi.</li> <li>3. Fasilitas kondisi lingkungan gedung.</li> </ol> <p>Sehingga setiap tahun diharapkan penambahan jumlah parameter yang akan diakreditasi dari tahun 2022 sampai dengan 2025.</p>	Terlampir
Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam Dan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam	Ketiganya dapat dikatakan sebagai dinas yang paling sedikit mendapatkan alokasi anggaran. padahal menurut temuan dan kajian Pansus, ketiga dinas ini bersentuhan langsung dengan masyarakat luas dan terutama masyarakat menengah ke bawah, yang jumlahnya	Agar Walikota dapat memberikan perhatian yang lebih serius terhadap ketiga OPD ini dengan memberikan keleluasaan membuat, menyusun dan melaksanakan program/kegiatan yang inovatif dengan memberikan alokasi anggaran yang memadai, sebagai	<p><b>1. Dinas Perikanan</b></p> <p>Sebagaimana yang tertera di Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Dinas Perikanan TA 2022, pagu dana sebesar Rp. 10.010.296.079,- (di luar gaji dan tunjangan PNS) dinilai cukup untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mencapai target capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022. Ada peningkatan anggaran dibanding Tahun 2019 yang sebesar Rp 3.658.398.088,04 (di luar gaji dan tunjangan PNS) dan Tahun 2020</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>mayoritas di Kota Batam.</p> <p>Dengan alokasi anggaran yang sangat kecil, rata-rata hanya Rp. 600-an juta per OPD, tentu ini sangat memprihatinkan, dan terlihat keberpihakan pemerintah Kota Batam kepada masyarakat menengah ke bawah masih sangat lemah.</p>	<p>wujud keberpihakan kepada urusan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan mayoritas masyarakat di Kota Batam.</p>	<p>yang sebesar Rp. 9.597.220.048,00 (di luar gaji dan tunjangan PNS).</p>	
	<p>Berdasarkan pembahasan di Pansus, cukup banyak inovasi program/kegiatan yang dapat dilakukan, seperti pada Dinas Perikanan dapat melaksanakan dan mengoptimalkan program/kegiatan yang terkait dengan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, demikian juga dengan</p>		<p><b>2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam</b>            Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yaitu Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari dua Kegiatan,            1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebesar Rp. 1.107.350.000.            2. Pengendalian dan Pengawasan</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	Dinas Ketahanan Pangan, banyak program/kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan dan dibuat dan dilaksanakan, pun untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.		<p>Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Sebesar Rp. 2.211.280.000.</p> <p>Total anggaran yang telah dianggarkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat T.A 2021 sebesar Rp. 3.318.630.000,-</p>	
			<p><b>3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam</b></p> <p>Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat yaitu :</p> <p>1. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang wilayah keanggotaan dalam Daerah/Kota dengan Sub Kegiatan: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi sebesar Rp. 390.304.000.</p> <p>2. Program Pemberdayaan Usaha</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			<p>Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Sebesar Rp. 851.247.000.</p> <p>3. Program Pengembangan UMKM Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Sebesar Rp. 1.330.752.000</p> <p>Total anggaran yang telah dianggarkan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat T.A 2021 sebesar Rp. 2.572.303.000.</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
		<p>Sengaja catatan dan rekomendasi atas ketiga dinas tersebut sama persis dengan tahun lalu, dikarenakan tidak adanya tindaklanjut dari pihak pemerintah Kota Batam, dan kepada ketiga dinas yang bersangkutan agar melaporkan progres atau tindaklanjut ini kepada DPRD pada kesempatan pertama dengan membawa berbagai program dan kegiatan yang diusulkan untuk menjawab kebutuhan dan dinamika permasalahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>1. Dinas Perikanan</p> <p>Pada Tahun 2020 ada peningkatan anggaran yang signifikan dibanding Tahun 2019. Tahun 2020 belanja langsung (di luar gaji dan tunjangan PNS) sebesar 9.597.220.048,00. Pada Tahun 2019 Anggaran belanja langsung (di luar gaji dan tunjangan PNS) sebesar Rp. 3.658.398.088,04</p> <p>2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</p> <p>Bahwa Pemerintah Kota Batam telah berupaya memaksimalkan dana bagi Pelaku Usaha Mikro di Kota Batam. Adapun Jumlah Penerima Bantuan Usaha Mikro (BPUM) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai penerima BPUM sebanyak 39.167 pelaku usaha dengan jumlah anggaran : Rp. 94.000.800.000.</p> <p>Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam telah mengusulkan pelaku usaha mikro sebagai calon</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
			penerima BPUM sampai saat ini sebanyak : 2378 Pelaku Usaha Mikro.	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam	OPD ini selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehari-hari juga merupakan OPD leading sector dalam beberapa peraturan daerah, yakni: Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam; dan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak	Agar OPD ini memiliki pucuk pimpinan yang paham betul akan tugas pokok dan fungsi dari OPD. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas SDM khususnya pelaksana teknis dari program dan kegiatan dalam menerjemahkan kebijakan yang erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.	Dinas Pemberdayaan Perempuan sejauh ini telah melaksanakan tupoksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam indikator RPJMD 2016-2021. Penyelenggaraan perlindungan d anak dilaksanakan berpedoman kepada Perda Nomor 6 tahun 2016 yang dilaksanakan melalui 3 fungsi utama :  1.Fungsi pelayanan (P2TP2A), fungsi Pengawasan Anak ( KPPAD Kota Batam) dan Fungsi Pencegahan Kekerasan terhadap anak (melalui Pembentukan Forum Anak Kota Batam, PATBM, dan APSAI).  Ketiga fungsi ini telah dilaksanakan secara berkorelasi dan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya yang selama ini telah berjalan dengan maksimal sehingga kasus-kasus anak di kota Batam dapat tertangani dengan baik.  KPPAD selaku mitra kerja dalam pengawasan anak Kota Batam telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja dan menyampaikan laporan	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>Usia Dini Holistik Integratif.</p> <p>Jika ketiga perda ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka penyelenggaraan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat dilaksanakan tidak hanya di hulu namun juga hilir. Namun sayangnya, pemahaman SDM pada OPD ini terhadap perda tersebut sangat tidak mumpuni, sehingga perda ini menjadi mandul dan tidak terimplementasi dengan baik.</p> <p>Begitu juga dengan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga</p>		<p>secara tertulis kepada Pemerintah Kota Batam secara berkala yang turut mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam secara integratif dan berkesinambungan.</p> <p>Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif berpedoman kepada Perda Nomor 8 Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dengan berbagai upaya progresif untuk meningkatkan tumbuh kembang anak yang cerdas kreatif dan inovatif.</p> <p>Kegiatan utama pengembangan anak usia dini dituangkan melalui Bina Keluarga Balita (BKB) se-Kota Batam yang secara dini memberikan pemahaman bagaimana menata tumbuh kembang anak yang ideal sedari dini kepada masyarakat.</p> <p>Sesuai amanat Perda Nomor 6 Tahun 2016, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender berbasis kepada aplikasi GAB/GBS yang berporos kepada anggaran yang responsif gender yang diaplikasikan oleh 80% OPD Kota Batam (dengan capaian persentase belanja</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	berencana, hampir semua program dan kegiatan yang berkaitan pada kegiatan ini bersumber dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus. Namun, hal inipun juga tidak dapat menjawab persoalan kependudukan di Kota Batam.		<p>anggaran resonsif gender Kota Batam tahun 2020).</p> <p>Hal ini memacu indeks pembangunan gender Kota Batam pada tahun 2020 dengan capaian 94,42.</p> <p>Tentunya implementasi program Dinas Pemberdayaan Perempuan ini perlu mendukung kompetensi sumber daya yang mumpuni yang saat ini terus dikembangkan melalui pembinaan dan konsolidasi integratif seluruh pegawai dalam pelaksanaan rencana kerja dan pelatihan kompetensi bidang kepada seluruh SDM yang ada sehingga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai melalui dinas ini dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas Kota Batam.</p>	
Sekretariat Daerah Kota Batam	Berdasarkan hasil rapat Pansus bersama Sekretaris Daerah dan jajarannya, ditemukan fakta bahwa Sekretariat Daerah tidak didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam pelaksanaan tugas	<p>Perlunya peningkatan kualitas SDM dari Sekretariat Daerah dalam memahami tupoksi dengan baik. Diklat merupakan salah satu jawaban dari permasalahan ini.</p> <p>Kiranya, tindak lanjut</p>	<p>Sekretariat Kota Batam akan mengusulkan dan berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Batam untuk pengiriman/pelaksanaan Diklat khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (struktural, fungsional, teknis dan non teknis) guna peningkatan kualitas SDM di lingkungan Setdako Batam.</p> <p>Berdasarkan surat Nomor</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	<p>pokok dan fungsinya. Hal ini terbukti dari tidak sinkronnya data yang dimiliki oleh Sekda dengan dokumen LKPJ 2020.</p>	<p>dari rekomendasi ini nantinya dapat dilaporkan kepada DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>04/SP/UM/VI/2021 kebutuhan diklat Setdako Batam adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Diklat Teknis = 160 peserta</li> <li>2. Jenis Diklat Struktural = 17 peserta</li> <li>3. Jenis Diklat Fungsional = 207 peserta.</li> </ol> <p>Selain itu dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 Setdako Batam juga mengusulkan anggaran diklat dalam sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan.</p>	
Sekretariat DPRD Kota Batam	<p>Sebagai OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai supporting system terhadap DPRD, maka sudah seharusnya berbagai program/kegiatan yang dilakukan harus dipastikan mampu mendorong peningkatan kinerja DPRD, seperti penyelenggaraan rapat-rapat, risalah/notulensi disetiap alat</p>	<p>Agar OPD ini memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas SDM melalui berbagai in-house training dan penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap lini organisasi di Sekretariat DPRD.</p> <p>Selanjutnya melaporkan tindaklanjut tersebut kepada DPRD pada kesempatan pertama.</p>	<p>Akan bekerjasama dengan BKPSDM untuk dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kualitas SDM di Sekretariat DPRD Kota Batam, melalui pelatihan khususnya dibidang yang terkait Tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.</p> <p>Untuk PNS lebih mengintersip kegiatan bimtek bagi pegawai guna meningkatkan kompetensi PNS, terutama yang berkaitan dengan tupoksi seperti: Diklat PIM, Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan pengarsipan. Dan untuk THL jumlah 166 orang yang bertugas dibagian Legislasi, Humas dan protokol, Keuangan, dan Bagian Umum,</p>	

NO	PANITIA KHUSUS LKPJ DPRD KOTA BATAM		TINDAK LANJUT	KET.
	CATATAN/URAIAN	REKOMENDASI		
	kelengkapan, peningkatan SDM setwan di setiap alat kelengkapan, standar dan prosedur kerja yang baik dan terukur.		diharapkan memperoleh pelatihan, sesuai dengan tugas masing-masing seperti: pengembangan kepribadian misal MC dan tata cara penerima tamu untuk bidang humas dan protokol, pengembangan pengetahuan tentang hukum dan notulen untuk bidang legislasi, pengembangan pengetahuan tentang pengamanan dan penanggulangan bencana untuk bidang pamdal.	

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

#### **4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

Amanat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan adalah hal-hal yang memiliki deskripsi sebagai berikut:

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat;
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa;
3. Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian /lembaga;
5. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah;
6. Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik;
7. Tidak memerlukan dana pendamping;
8. Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota.

#### **A. Tugas Pembantuan yang Diterima**

##### **1. Dasar Hukum**

Dasar hukum Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian Teknis ke Daerah diatur dalam Undang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dana tugas pembantuan diatur dalam Undang Undang 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

## **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Batam tidak mendapatkan dana tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

## **3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan**

Karena tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pusat, maka tahun 2021 tidak ada Perangkat Daerah yang melaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam Akhir Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu satu tahun yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, yang disebabkan karena faktor eksternal maupun internal. Kedepan semoga capaian target indikator ini dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kami berharap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja Pemerintah Kota Batam ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada kita dalam melanjutkan karya pengabdian membangun Kota Batam yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi.



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KOTA BATAM**  
Jl. Engku Putri No. 1, Lantai. VI. Batam Centre  
Telp. (0778)463045 Fax. (0778)461701  
Website : [bapelitbangda.batam.go.id](http://bapelitbangda.batam.go.id)  
Email. [bappedabatam@gmail.com](mailto:bappedabatam@gmail.com)